



**RENCANA
STRATEGIS
DINAS
PERHUBUNGAN
KOTA PONTIANAK
TAHUN 2020-2024**

DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK





KATA PENGANTAR

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah, Dinas Perhubungan Kota Pontianak menyusun Rencana Strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahunan yaitu Renstra Tahun 2020 s/d 2024.

Renstra adalah dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah yang memuat tentang visi, misi, arah dan kebijakan teknis serta rencana program dan kegiatan sesuai bidang dan kewenangan untuk jangka waktu lima tahunan yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-masing.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul serta memperhatikan isu-isu strategis yang kemudian diikuti dengan upaya pengembangan struktur, prosedur, operasionalisasi dan evaluasi serta berdasarkan masukan dan kebutuhan yang ada.

Dalam penyusunan Renstra ini, masukan dan saran tentunya sangat diharapkan untuk dapat lebih menyempurnakan Renstra Dinas menuju Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang responsive dan aspiratif.

Pontianak, 28 Juni 2019

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Pontianak,


Dra. Hj. UTIN SRI LENA CANDRAMIDI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680410 199503 2 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	7
II. GAMBARAN PELAYANAN OPD	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2. Sumber Daya OPD	27
2.3. Kinerja Pelayanan OPD	35
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	61
III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	66
3.1. Identifikasi Permasalahan	66
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program	69
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Rentra Propinsi	74
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	81
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	95
IV. TUJUAN DAN SASARAN	100
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	100
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	104
5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan	104
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	109
6.1. Program dan Sasaran Program 2020 - 2024	109
6.2. Kegiatan dan Indikator Kinerja	111
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	130
VIII. PENUTUP	138
LAMPIRAN	140

**BAB****I****PENDAHULUAN****1.1. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana yang di amanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Organisasi Perangkat Daerah/Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM/RKPD Kota Pontianak, serta keselarasan terhadap Renstra K/L dan Renstra Dishub Propinsi Kalbar.

Untuk mengantisipasi perubahan lingkungan yang terjadi baik di tingkat global, nasional, daerah maupun Dinas Perhubungan Kota Pontianak perlu mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi. Dalam kaitan ini Perencanaan Strategis (Strategic Planning) sangat penting, bahkan tidak dapat dihindari untuk memenuhi perubahan yang terjadi. Perencanaan strategis dapat disebut sebagai METODE yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan yang



seringkali berkaitan dengan kepentingan organisasi. Juga merupakan suatu Metode untuk menangani kompleksitas lingkungan internal yang di timbulkan oleh bermacam-macam kebutuhan dari Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum didalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pontianak adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008, tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008, tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kota Pontianak;
12. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2010 – 2014;
13. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota



Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 149);

15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 63 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak;
17. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 64 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 64);
18. Keputusan Walikota Pontianak Nomor 712/Dishubkominfo/Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2015-2019;
19. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019;
20. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019;



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dinas Perhubungan Kota Pontianak merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang juga berkewajiban untuk membuat Renstra Perangkat Daerah untuk Priode 5 Tahun (2020 – 2024) yang memuat tentang Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program serta Kegiatan yang mengacu kepada Visi dan Misi Walikota serta disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang berpedoman kepada RPJM Daerah Kota Pontianak dan bersifat indikatif.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dan semakin berubah dengan akselerasi yang tinggi dan kompleks sebagai akibat adanya globalisasi seperti dewasa ini, maka Dinas Perhubungan Kota Pontianak secara kontinyu melakukan perubahan – perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan, konsistensi, dan berkelanjutan, sehingga dapat optimal dalam melakukan kinerja yang berorientasi kepada Pembangunan Masyarakat Kota Pontianak.

Renstra merupakan suatu proses, sebagai suatu proses maka Perencanaan ini menentukan apa yang dikehendaki Dinas Perhubungan dimasa mendatang dan bagaimana upaya mencapainya, juga merupakan suatu kerangka berfikir logis dalam menentukan :

- ❖ Dimana Posisi kita sekarang (scanning) ?
- ❖ Akan kemana kita (Tujuan)
- ❖ Bagaimana kita menuju kesana (strategi)
- ❖ Apakah desain teknis untuk melaksanakan strategi ?
- ❖ Dan apakah kita sudah berjalan di jalan yang benar (evaluasi).



Perencanaan Strategis juga merupakan suatu proses yang mengarahkan para pemimpin Dinas dalam mengembangkan dan merefleksikan tujuan masa depan yang diinginkan.

Dengan demikian, perencanaan strategis bagi Dinas Perhubungan merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul pada Dinas Perhubungan untuk membayangkan, memvisualisasikan masa depan Dinas sekaligus Daerah, yang kemudian diikuti dengan upaya pengembangan Struktur, Prosedur, dan operasionalisasi serta evaluasi, sehingga secara gemilang mampu mencapai masa depan yang di inginkan tersebut.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan Dinas Perhubungan Kota Pontianak menerapkan manajemen Strategik sebagai langkah awal dalam menentukan strategi kedepan tentang apa yang akan dilaksanakan, bagaimana melaksanakannya serta evaluasi, untuk itu Dinas Perhubungan



Kota Pontianak memiliki Tujuan dan Sasaran yang dapat memudahkan bagi setiap orang untuk membaca, memahami dan mengerti apa yang diinginkan dan akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pontianak disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah, serta Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program periode yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini. Adapun Bab ini terdiri dari 4



(empat) Sub Bab, yaitu Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan mengenai Permasalahan Umum serta Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Pada Bab ini terdiri dari 5 (lima) Sub Bab yaitu Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Dinas Propinsi, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini diulas lebih lanjut mengenai rumusan pernyataan Tujuan Jangka Menengah dan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat uraian tentang rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.



BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Perhubungan sebagai unsur teknis pelaksanaan otonomi daerah di Kota Pontianak yang melaksanakan kewenangan di bidang Perhubungan serta tugas desentralisasi Pemerintah Kota Pontianak, dalam kurun waktu 2004 hingga 2019 ini telah mengalami beberapa kali perubahan Susunan dan Struktur Organisasi dan bahkan perubahan nama SKPD. Adapun perubahan-perubahan susunan dan struktur organisasi Dinas yang dapat memberikan gambaran terhadap perubahan peran dan fungsi dinas dapat diuraikan sebagaimana berikut ini :

2.1.1. Susunan dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak sebagai unsur pelaksanaan otonomi daerah tepatnya pada Pasal 13 ditetapkan Pembentukan Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pontianak terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bidang Tata Usaha
- c. Bidang Teknik Kendaraan dan Telekomunikasi

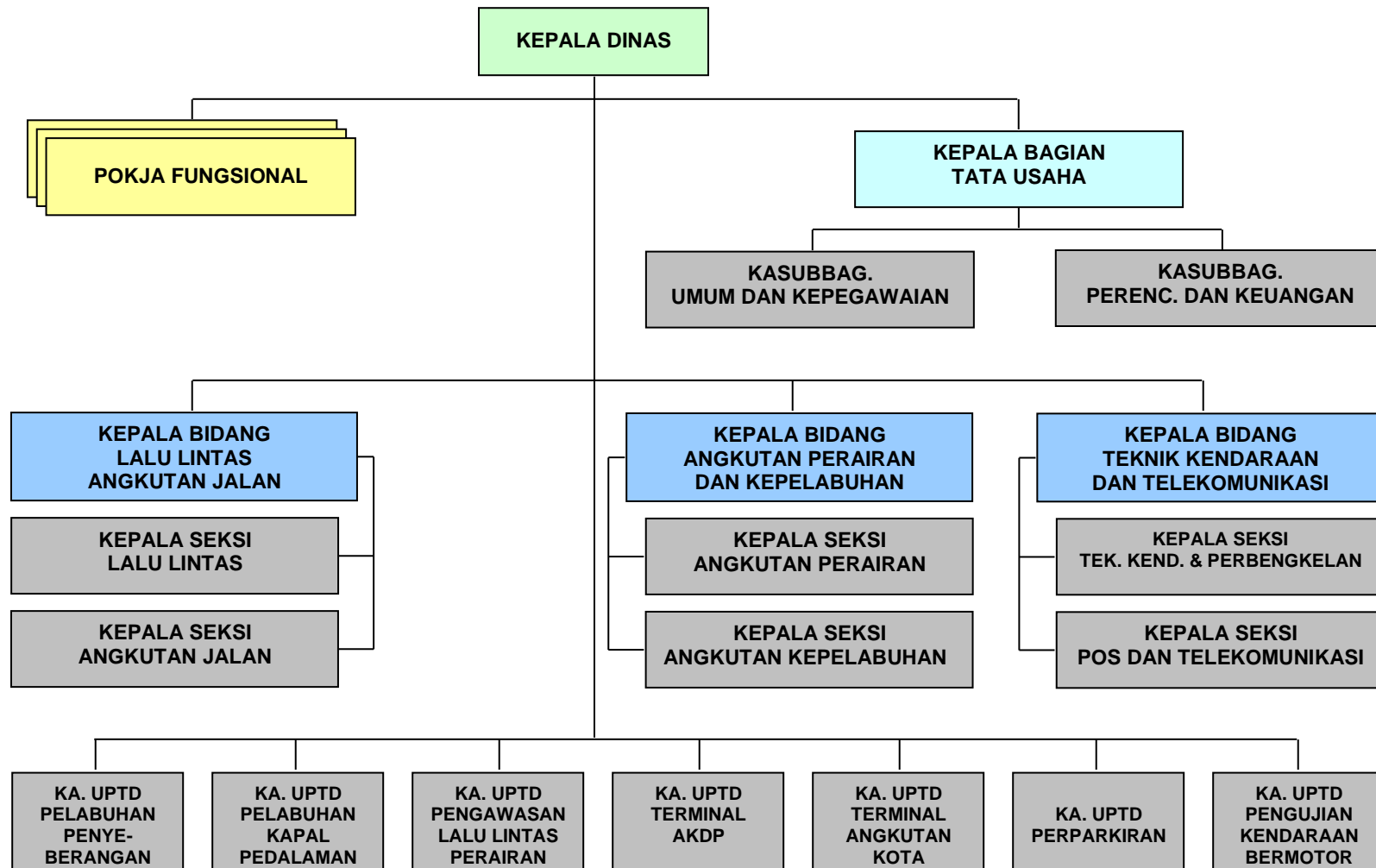


- d. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
- e. Bidang Angkutan Perairan dan Kepelabuhan
- f. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- g. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
- h. Seksi Pos dan Telekomunikasi
- i. Seksi Kendaraan dan Perbengkelan
- j. Seksi Angkutan Jalan
- k. Seksi Lalu Lintas
- l. Seksi Kepelabuhan
- m. Seksi Angkutan Perairan
- n. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- o. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara jelas dapat dilihat pada struktur berikut :



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK
(Berdasarkan PERDA Nomor 16 Tahun 2004/PERWA Nomor 32 Tahun 2005)**





Dengan berlakunya PP 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta berlakunya PP 41 Tahun 2007, maka Pemerintah Kota Pontianak telah melakukan penyesuaian dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak, sehingga yang semula Dinas Perhubungan Kota Pontianak menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

Sesuai dengan PERDA Nomor 11 Tahun 2008 serta Peraturan Walikota Pontianak Nomor 63 Tahun 2008, maka Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan
- c. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
 1. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 2. Kepala Seksi Angkutan Jalan
- d. Kepala Bidang Angkutan Perairan
 1. Kepala Seksi Angkutan Perairan
 2. Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Perairan



- e. Kepala Bidang Teknik Kendaraan, Terminal dan Perparkiran
 - 1. Kepala Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan
 - 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Terminal, Halte dan Perparkiran

- f. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika
 - 1. Kepala Seksi Pos, Telekomunikasi dan Telematika
 - 2. Kepala Seksi Penyebaran dan Penyerapan Informasi

- g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

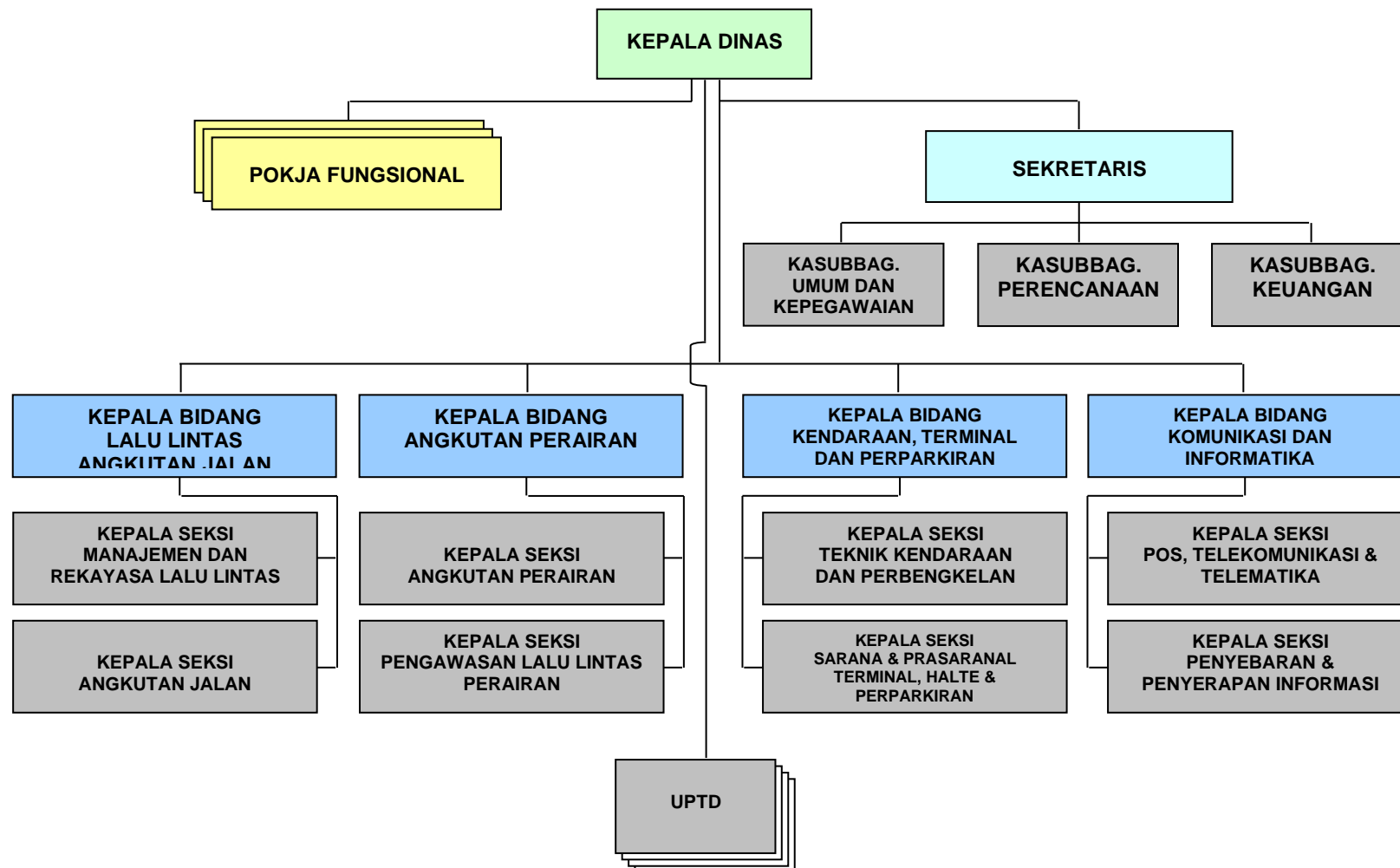
Adapun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak direncanakan menjadi 5 (lima) UPTD, yang terdiri dari ;

- 1. UPTD Perparkiran.
- 2. UPTD Terminal.
- 3. UPTD Pelabuhan.
- 4. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).
- 5. UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Secara jelas dapat dilihat pada struktur berikut :



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK
(Berdasarkan PERDA Nomor 11 Tahun 2008/PERWA Nomor 63 Tahun 2008)**





Pada Tahun 2016 dengan dikeluarkannya dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), maka Pemerintah Kota Pontianak telah melakukan penyesuaian terhadap Perangkat Daerah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 149), sehingga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak menjadi Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Sebagai penjabaran dari PERDA Nomor 7 Tahun 2016, ditetapkanlah Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 64).

Sesuai dengan PERDA Nomor 7 Tahun 2016 serta Peraturan Walikota Pontianak Nomor 64 Tahun 2016, sesuai dengan kriteria/tipe Dinas Perhubungan Kota Pontianak yaitu Tipe B, maka Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pontianak terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
 1. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas
 2. Kepala Seksi Angkutan Jalan
 3. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian LLAJ



- d. Kepala Bidang Perlengkapan Jalan
 - 1. Kepala Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
 - 2. Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum

- e. Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan
 - 1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Penyeberangan
 - 2. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Sungai dan Penyeberangan

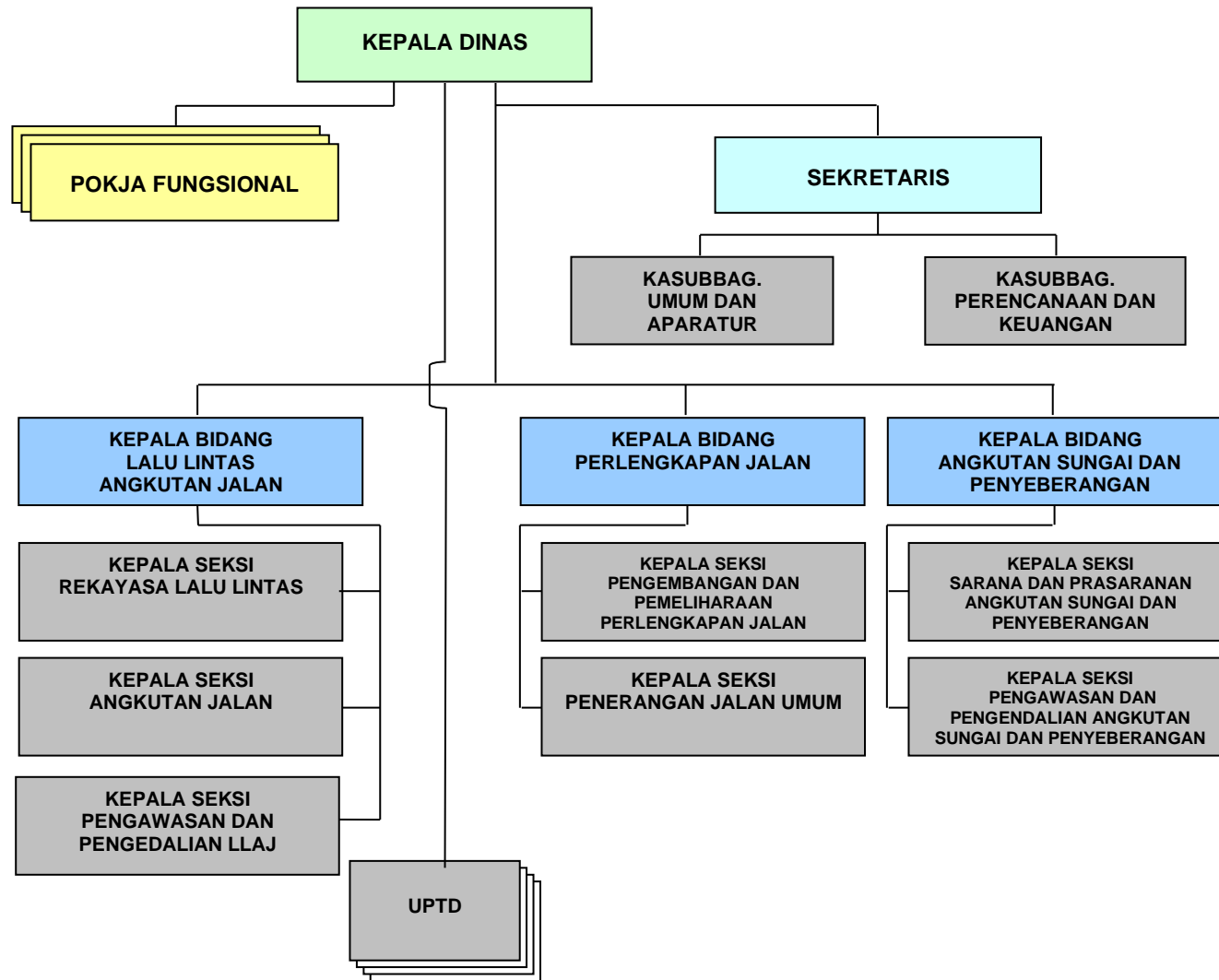
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
 - 1. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Secara jelas dapat dilihat pada struktur berikut :



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK
(Berdasarkan PERDA Nomor 7 Tahun 2016/PERWA Nomor 64 Tahun 2016)**





2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 64 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak, bahwa Kepala Dinas Perhubungan mempunyai Tugas Pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Dinas Perhubungan yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
- b. perumusan program dan rencana kerja dibidang perhubungan;
- c. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang perhubungan;
- d. pengendalian dan pembinaan teknis dibidang perhubungan;
- e. penyelenggaraan fasilitasi perizinan dibidang perhubungan;
- f. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perhubungan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang perhubungan yang diberikan oleh Walikota.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UPTD serta masing-masing Kasubbag dan Kasi. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :



A. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas

Tugas Pokok Sekretaris Dinas adalah merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
- b. perumusan rencana kerja dibidang kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- d. monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- e. pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- g. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang kesekretariatan meliputi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Tugas Pokok Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang lalu lintas angkutan jalan.



Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. perumusan rencana kerja dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - h. pengelolaan administrasi dibidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - a. pelaksanaan fungsi lain dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Ruang lingkup tugas bidang lalu lintas angkutan jalan meliputi rekayasa lalu lintas dan perparkiran, angkutan jalan dan terminal serta pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
 - Ruang lingkup tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas meliputi urusan fasilitasi persetujuan hasil Analisa Dampak Lalu lintas (ANDALALIN), menyusun Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan atau Tatanan Transportasi Lokal (TATRALOK), melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Pendataan Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) Ruas Jalan, melaksanakan fasilitasi izin penyelenggaraan dan



pembangunan fasilitas perparkiran serta pengelolaan retribusi perparkiran.

- Ruang lingkup tugas Seksi Angkutan Jalan meliputi urusan penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan, perencanaan Sistem Transportasi Perkotaan, melaksanakan fasilitasi izin trayek dan izin operasi angkutan orang dan barang, melaksanakan pengendalian angkutan jalan dan terminal, melaksanakan fasilitasi penetapan tarif dan angkutan kelas ekonomi, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taxi dalam kawasan perkotaan, fasilitasi penerbitan izin penyelenggaraan taxi dan angkutan kawasan tertentu dalam kota, melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan, pengelolaan terminal penumpang tipe C, melaksanakan pengelolaan retribusi terminal.
- Ruang lingkup tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi urusan pengawasan, pengendalian dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan serta perparkiran, penjagaan dan pengamanan lalu lintas dan angkutan jalan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perlengkapan Jalan.

Tugas Pokok Kepala Bidang Angkutan Perairan adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang perlengkapan jalan.



Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, kepala bidang Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang perlengkapan jalan;
 - b. perumusan rencana kerja dibidang Perlengkapan Jalan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang perlengkapan jalan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang perlengkapan jalan;
 - e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perlengkapan jalan;
 - f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang perlengkapan jalan;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perlengkapan jalan;
 - h. pengelolaan administrasi dibidang perlengkapan jalan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain dibidang perlengkapan jalan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Ruang lingkup tugas bidang perlengkapan jalan meliputi pengembangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan serta fasilitas penerangan jalan umum.
 - Ruang lingkup tugas Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan meliputi urusan perencanaan, pengembangan, pemeliharaan alat pengendali dan pengaman lalu lintas (APILL), marka, rambu, alat pengendali pemakai jalan, alat pengaman pemakai jalan, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas, dan fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas.



- Ruang lingkup tugas Seksi Penerangan Jalan Umum meliputi perencanaan dan pengembangan, pengawasan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan umum.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan.

Tugas Pokok Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang angkutan sungai dan penyeberangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang angkutan sungai dan penyeberangan;
- b. perumusan rencana kerja dibidang angkutan sungai dan penyeberangan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang angkutan sungai dan penyeberangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang angkutan sungai dan penyeberangan;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang angkutan sungai dan penyeberangan;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang angkutan sungai dan penyeberangan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang angkutan sungai dan penyeberangan;



- h. pengelolaan administrasi dibidang angkutan sungai dan penyeberangan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain dibidang angkutan sungai dan penyeberangan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Ruang lingkup tugas bidang angkutan sungai dan penyeberangan meliputi fasilitasi dan perencanaan angkutan sungai, penyeberangan dan pelabuhan serta pengawasan dan pengendalian angkutan sungai dan penyeberangan.
 - Ruang lingkup tugas Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Penyeberangan meliputi penetapan rencana umum angkutan sungai dan penyeberangan, penetapan rencana pelabuhan/dermaga umum diperairan sungai, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan sungai dan penyeberangan, penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan umum sungai dan penyeberangan, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal yang melayani penyeberangan, penetapan tarif angkutan sungai dan penyeberangan, melaksanakan fasilitasi izin usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal, melaksanakan fasilitasi izin usaha, operasi/trayek angkutan orang, barang khusus/ berbahaya di perairan sungai dan penyeberangan, fasilitasi pemakaian/pemanfaatan permukaan air di perairan sungai untuk pelabuhan/dermaga khusus serta kegiatan lainnya, fasilitasi izin pengerukan/reklamasi, melaksanakan proses fasilitasi pemeriksaan teknis/nautis kapal angkutan sungai, pengukuran, pendaftaran,



kelaikkan, alat-alat keselamatan, navigasi, surat tanda kecakapan nakhoda/motoris, melaksanakan, penetapan tarif angkutan sungai dan penyeberangan, melaksanakan pengelolaan retribusi kepelabuhanan.

- Ruang lingkup tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Sungai dan Penyeberangan meliputi urusan pengawasan di perairan sungai, pelabuhan/dermaga umum, pengawasan dan pengendalian izin usaha dan operasi/trayek angkutan orang, barang khusus/berbahaya di perairan sungai dan penyeberangan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemakaian/pemanfaatan permukaan air di perairan sungai untuk pelabuhan/dermaga khusus serta kegiatan lainnya, pengawasan pengerukan/reklamasi, kelaikkan, alat-alat keselamatan, navigasi, surat tanda kecakapan nakhoda/motoris kapal angkutan, pengawasan dan pengendalian terhadap Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan umum sungai dan penyeberangan, penanggulangan pencemaran dan bantuan SAR serta rambu-rambu.

F. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi UPTD PKB yaitu :

Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor, dan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan UPTD.
- b. Pelaksanaan pelayanan UPTD.
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD.
- d. Penyelenggaraan tugas lain UPTD yang diberikan oleh Kepala Dinas.



Ruang lingkup pekerjaan teknis UPTD PKB meliputi :

- a. Pengaturan ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam lokasi pengujian kendaraan bermotor,
- b. Pengaturan tentang penempatan kendaraan angkutan,
- c. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor,
- d. Pengelolaan pemungutan retribusi jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor,
- e. Pembinaan penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor,
- f. Fasilitasi administrasi pengelolaan pengujian kendaraan bermotor dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan sumber daya yang memadai agar kegiatan dapat terlaksana dengan cepat, tepat, transparan dan akuntabel, sehingga berdampak pada kinerja suatu instansi pemerintah.

Sumber daya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Honorar yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kedudukan jabatan masing-masing mulai dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, hingga Staf.



Pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak di dukung oleh 107 orang personil, yang terdiri dari 79 (tujuh puluh sembilan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 28 (dua puluh delapan) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang terbagi kedalam beberapa lokasi penempatan tugas sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

1. Formasi Kepangkatan Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

NO	GOL / RUANG	JUMLAH ASN (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
1	2	3	4	5
2	IV/c	-	1	1
3	IV/b	1	-	1
4	IV/a	2	-	2
5	III/d	10	1	11
6	III/c	4	1	5
7	III/b	13	6	19
8	III/a	3	4	7
9	II/d	5	2	7
10	II/c	12	2	14
11	II/b	10	-	10
12	II/a	1	1	2
JUMLAH		61	18	79

2. Rekap Formasi Kepangkatan Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

NO	GOL / RUANG	JUMLAH ASN (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
1	2	3	4	5
1	IV	3	1	4
2	III	30	12	42
3	II	28	5	33
4	I	-	-	-
JUMLAH		61	18	79



3. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Berdasarkan Status Pegawai.

NO	JENIS PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
1	2	3	4	5
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	61	18	79
2	Calon Aparatur Sipil Negara (ASN)	-	-	-
3	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	27	1	28
JUMLAH		88	19	107

4. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
1	2	3	4	5
1	Magister (S-2)	5	2	7
2	Sarjana (S-1)	15	9	24
3	Diploma IV (D-4)	2	-	2
4	Sarjana Muda (D-3)	-	3	3
5	Sarjana Muda (D-2)	4	-	4
6	SMA / Sederajat	35	3	38
7	SMP / Sederajat	-	-	0
8	SD	-	1	1
JUMLAH		61	18	79



5. Formasi Jabatan Struktural Pegawai Dinas Perhubungan

NO	NAMA / NIP	GOL	NAMA JABATAN	KEPUTUSAN JABATAN	
				NOMOR / TANGGAL	T M T
1	2	3	4	5	6
1.	Dra. Hj. UTIN SRI LENA C, M.Si	IV/c	Kepala Dinas	821.2.22/183/BKD-M/2015	03-08-2015
	19680410 199503 2 006			03 Agustus 2015	
2.	Drs. H. KHAIRUL AZHAR, M.Pd	IV/b	Sekretaris	821.2.23/103/BKPSDM-M/2017	06/07/2017
	19611223 198303 1 006			5 Juli 2017	
3.	Drs. AHMAD SUDIYANTORO	IV/a	Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan	821.2.23/230/BKD-M/2016	03/01/2017
	19690312 199703 1 009			30 Desember 2016	
4.	Ir. HADI SUTISNO	IV/a	Kepala Bidang Perlengkapan Jalan	821.2.23/230/BKD-M/2016	03/01/2017
	19621101 199003 1 007			30 Desember 2016	
5.	ALFRI, ST, MT	III/d	Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan	821.2.23/230/BKD-M/2016	03/01/2017
	19740522 200212 1 003			30 Desember 2016	
6.	Drs. RIDWAN	III/d	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur	821.2.24/234/BKD-M/2016	04/01/2017
	19690422 199312 1 001			30 Desember 2016	
7.	IMAN SETIADI, SE	III/d	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	821.2.24/234/BKD-M/2016	04/01/2017
	19710104 199803 1 006			30 Desember 2016	
8.	NUKE ENDANG NORMAYANTI, SE	III/d	Kasi Pengembangan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	821.2.24/234/BKD-M/2016	04/01/2017
	19650517 199307 2 001			30 Desember 2016	
9.	EKO PRIHANDONO, ST, MM	III/d	Kasi Penerangan Jalan Umum	821.2.24/234/BKD-M/2016	04/01/2017
	19770531 200312 1 003			30 Desember 2016	
10.	BURHAN	III/d	Kasi Pengawasan dan Pengendalian LLAJ	821.2.24/104/BKPSDM-M/2017	06/07/2017
	19611124 198302 1 005			5 Juli 2017	
11.	A. HERU PUDJI UTOMO, ST	III/d	Kepala Seksi Angkutan Jalan	821.2.24/234/BKD-M/2016	04/01/2017
	19670907 199803 1 005			30 Desember 2016	
12.	SYAMSUL BAHRI, SH	III/d	Kasi Rekayasa Lalu Lintas	821.2.24/234/BKD-M/2016	04/01/2017
	19710516 200604 1 016			30 Desember 2016	
13.	ISMAIL AS SUDDY	III/c	Kasi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Sungai dan Penyeberangan	821.2.24/234/BKD-M/2016	04/01/2017
	19640719 199202 1 001			30 Desember 2016	
14.	AWAN ROSIAN P. S.Sos	III/c	Kasi Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Penyeberangan	821.2.24/234/BKD-M/2016	04/01/2017
	19820908 200902 1 001			30 Desember 2016	
15.	ROHMAN S, ST	III/d	Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	821.2.24/234/BKD-M/2016	04/01/2017
	19720520 199203 1 011			30 Desember 2016	
16.	MUFLIHIN, ST	III/d	Kasubbag Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	821.2.24/234/BKD-M/2016	04/01/2017
	19780509 200312 1 004			30 Desember 2016	

6. Rekap Formasi Jabatan Struktural Pegawai Dinas Perhubungan

NO	ESELON	JUMLAH ASN (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
1	2	3	4	5
1	II.b	-	1	1
2	III.a	1	-	1
3	III.b	3	-	3
4	IV.a	9	1	10
5	IV.b	1	-	1
JUMLAH		14	2	16



Dari komposisi personil berdasarkan pendidikan memang dirasakan masih perlu peningkatan kemampuan personil baik melalui pengembangan SDM lewat diklat/pelatihan khusus bidang Perhubungan maupun pengembangan tingkat pendidikan (D-III, S-1, S-2) yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, sehingga kemampuan dan wawasan personil meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu juga perlu adanya penambahan personil baru yang sesuai dengan keahlian dan formasi yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

2.2.2. Sarana Prasarana Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak masalah sarana dan prasarana memang masih dirasakan kurang memadai, namun dengan keterbatasan yang ada tentunya kita berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas yang diemban dan tentunya ke depan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana yang ada sehingga efektifitas dan efisiensi dapat terus tercipta.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kota Pontianak diantaranya Peningkatan Fasilitas dan Perbaikan Gedung/Kantor serta peralatan yang rusak, Penggantian dan Pengadaan peralatan kantor, Penambahan/Pengadaan kendaraan operasional lapangan baik roda dua maupun roda empat guna mendukung pengawasan dan patroli, serta peningkatan sarana dan prasarana UPTD berupa sarana mobilitas, sarana efisiensi kerja dan



prasarana kantor serta peralatan pengujian kendaraan bermotor yang akan dilakukan secara bertahap.

Sebagai gambaran mengenai sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak, dapat dilihat sebagai berikut :

DAFTAR PRASARANA / ASET TANAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK									
No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal - Usul
					Hak	Sertifikat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tanah Perkantoran Dishub	4.500		Jl. Alianyang Ptk		7 Des 2000	196	Gedung Kantor	
2	Tanah Perkantoran PKB			Jl. Khatulistiwa Ptk				Gedung Kantor	
3	Terminal Batulayang	9.135		Jl. Khatulistiwa Ptk				Terminal	
4	Terminal Siantan	1.777		Pasar Siantan				Terminal	
5	Terminal Seruni	1.023		Pasar Seruni				Terminal	
6	Terminal Parit Mayor	525						Terminal	
7	Terminal Dahlia	691		Jl.				Terminal	
8	Terminal Nipah Kuning	855		Jl Komyos Sudarso				Terminal	
9	Terminal Pal V	745		Jl. Gusti Hamzah				Terminal	
10	Terminal Kemuning	375		Jl. Prof. M. Yamin				Terminal	
11	Terminal Soedarso	1.166						Terminal	
12	Terminal Harapan Jaya	2.025						Terminal	

DAFTAR PRASARANA/ASET GEDUNG DAN BANGUNAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK								
No	Nama Barang	N o m o r		Kondisi Bangunan B,KB,RB	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai M2	Letak/ Alamat
		Kode Barang	Register		Bertingkat Tidak	Beton Tidak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kantor Dishub	01.01.11.04.01	001	B	Bertingkat	Beton	769,5	Jl. Alianyang Ptk
2	Pos Terminal Batulayang			KB	Tidak	Beton		Jl. Khatulistiwa
3	Kantor PKB	01.01.11.04.01	001	B	Tidak	Beton	470	Jl. Khatulistiwa
4	Dermaga Seng Hie		001	B	Bertingkat	Beton		Jl. Sultan Muhamad
5	Pos UPTD Perparkiran		001	B	Bertingkat	Beton		Jl. Hosokrominoto
6	Kantor Pelabuhan Penyeberangan		001	B	Tidak	Beton	175 m2	Jl. Bardan
7	Kantor Pelabuhan Penyeberangan		001	B	Tidak	Beton	112 m2	Siantan



**DAFTAR KENDARAAN DINAS PENUNJANG OPERASIONAL LAPANGAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PONTIANAK**

No. Urut	Nama / Jenis Kendaraan	Merk/Model Type	Jumlah Unit	Ukuran CC	Tahun Pembelian					Asal Usul Cara Perolehan
						Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Mobil Patroli Pengawasan	Toyota Kijang	1 Unit	1783	2002	MHF11KF7010034645	7K-0453339	17 LL	C2480757K	APBD
2	Mobil Pick Up	T. Kijang KF.50	1 Unit		1994	MHF31KF500115993	5K-9245269	8650 AC		APBD
3	Mobil Pick Up	Toyota/Hilux 2,0 M/T	1 Unit	1998	2017	MROEW8BB1H0204420	1TR-A242422	8967AS	M06924062	APBD
4	Mobil Derek	Hino FG 235 JJ	1 Unit	7684	2012	MJFEG8JJKCJG014945	J08EUGJ29658	9813 WC		
5	Mobil Patroli Perhubungan	T. Rush Type G	1 Unit	1495	2012	MHFE2CJ2JCK026561	3SZ-DCN8398	111 AJ		
6	Mobil Patroli Perhubungan	T. Rush Type G	1 Unit	1495	2014	MHFE2CJ2JEK046912	DER8841	1094 WB		APBD
7	Mobil Patroli Perhubungan	T. Rush Type G	1 Unit	1495	2014	MHFE2CJ2JEK048133	DEV6940	1095 WB		APBD
9	Mobil Patroli Perhubungan	Toyota/Vios 1,5 G CVT	1 Unit	1497	2017	MHFB29F31H2007391	2NR-XI29841	1060 WJ	M06923973	APBD
10	Motor Patroli		1 Unit	200	2009	MHIMC22119KO39332	MC22EI039522	4497 AQ	8651418	APBD
11	Motor Patroli		1 Unit	200	2009	MHIMC22199KO40504	MC22EI039455	4210 AQ	8651417	APBD
12	Speed Boad Pengawasan	YAMAHA	1 Unit	40 HP	2011					APBD
13	Speed Boad Pengawasan	YAMAHA	1 Unit	115 AEDL	2017					APBD



**DAFTAR SARANA PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK**

No. Urut	Nama Barang / Jenis Barang	Nomor Register	Merk / Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asal - Usul Cara Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Body Speed Boat		Yamaha/40 HP		Besi	2003	Proyek
2	Mesin Genset				Besi	2004	Peralihan
3	Tuckle Elektrik				Besi	2004	Peralihan
4	Tuckle Manual					2004	Peralihan
5	Side Slip Tester		Iyasa			1982	
6	Carlif		Iyasa			1982	
7	Hide Light Tester		Iyasa			1982	
8	Break Tester		Iyasa			1982	
9	Speedo Meter Tester		Iyasa			1982	
10	Compresor		Iyasa			1982	
11	Generator Set 19 KWH		Denyo			1982	
12	Smoke Tester		Assamblade			1996	
13	CO HC Bosh					2000	
14	Exel Weight Beam					1982	
15	Body Speed Boat				Besi	2011	



2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam jangka waktu 5 tahun sebelumnya (tahun 2015-2019), telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai visi dan misi pembangunan Bidang Perhubungan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pada kurun waktu 2015-2019, terjadi perubahan/revisi terhadap Renstra Dinas yang disebabkan adanya perubahan terhadap SOPD sebagaimana dituangkan pada halaman sebelumnya, maka tujuan dan sasaran disesuaikan yaitu berdasarkan kurun waktu tahun 2015-2016 dan tahun 2017-2019. Adapun tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program yang dilaksanakan pada kurun waktu tersebut yaitu sebagaimana berikut :

1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2015-2016 :

a. **Tujuan 1** : Mewujudkan Profesionalisme Aparatur dan Profesionalisme Birokrasi.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Aparatur untuk mewujudkan pelayanan prima dan tata pemerintahan yang baik.

Strategi 1 : Penguatan Sumber Daya Aparatur

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi 1, yaitu :

- 1) Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai kebutuhan.
- 2) Penerapan sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*).
- 3) Penyediaan sarana prasarana kerja yang memadai.



Yang dicapai melalui pelaksanaan Program :

No.	URUSAN/PROGRAM UMUM
A.	Urusan Kesekretariatan (Rutin Administrasi Perkantoran).
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.	Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor
3.	Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.
6.	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan.
7.	Peningkatan Pelayanan Prima

b. **Tujuan 2** : Mewujudkan Transportasi Kota Pontianak Yang Disiplin, Tertib, Aman dan Lancar

Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan dan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Bidang Perhubungan.

Strategi 2 : Optimalisasi Pelayanan, Pengelolaan dan Penataan Fasilitas Sarana Dan Prasarana Perhubungan.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu :

- 1) Meningkatkan Pelayanan Publik melalui penyediaan fasilitas sarana dan prasarana perhubungan.
- 2) Meningkatkan Sistem Transportasi dan Angkutan Umum/Massal yang Mendukung kelancaran pergerakan penumpang dan distribusi barang/jasa dalam kerangka pengembangan konektivitas intrawilayah maupun interwilayah.



- 3) Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi.
- 4) Meningkatkan Fungsi dan Penataan Angkutan Sungai.
- 5) Mengembangkan Sistem dan Manajemen Perparkiran.
- 6) Meningkatkan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Darat dan Sungai.
- 7) Mendorong partisipasi peran swasta dalam penyediaan sarana angkutan dengan memperhitungkan efisiensi, daya beli masyarakat, serta memperhatikan kepentingan penyedia jasa angkutan (operator) terkait jaminan kelangsungan usaha.
- 8) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia transportasi guna mewujudkan penyelenggaraan bidang perhubungan yang efektif dan efisien.

Yang dicapai melalui pelaksanaan Program :

No.	URUSAN/PROGRAM STRATEGIS
B.	Urusan Perhubungan (Program Pokok Pembangunan).
1.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
2.	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
3.	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ.
4.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Angkutan Sungai dan Penyeberangan.
5.	Pembangunan Sarana dan Prasarana ASDP.
6.	Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
7.	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.



Tabel T-C. 23.a
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DISHUBKOMINFO
KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2016

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET IKK/IKU	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A. BIDANG PERHUBUNGAN																			
1.	Persentase Tingkat Keberfungsian APILL dan Fasilitas Perlengkapan Jalan.		100		100	100	-	-	-	76,59	55,59	-	-	-	76,59	55,59	-	-	-
2.	Persentase Terpeliharanya Terminal Dan Halte Dengan Baik.		80		80	85	-	-	-	75	79,17	-	-	-	93,75	93,14	-	-	-
3.	Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu-rambu, PJU, Marka dan Guardrail).		40		40	55	-	-	-	38,96	68,14	-	-	-	97,40	123,89	-	-	-
4.	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat.		90		90	100	-	-	-	86,19	84,8	-	-	-	95,77	84,80	-	-	-
5.	Persentase Kelancaran Arus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.		90		90	95	-	-	-	86,58	98,33	-	-	-	96,20	103,51	-	-	-
6.	Persentase Peningkatan Penertiban Parkir Pada Kawasan Perdagangan Dan Jasa.		100		100	100	-	-	-	81,67	98,75	-	-	-	81,67	98,75	-	-	-
7.	Persentase Peningkatan Potensi Parkir.		90		90,00	95,00	-	-	-	86,09	91,36	-	-	-	95,66	96,17	-	-	-
8.	Persentase Berfungsinya Dermaga Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan.		100		100	100	-	-	-	41,30	95,54	-	-	-	41,30	95,54	-	-	-
9.	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai.		97,5		97,50	97,50	-	-	-	68,8	96,93	-	-	-	70,56	99,42	-	-	-
10.	Persentase Jumlah Uji Kendaraan Angkutan Umum dan Barang.		65		65	95	-	-	-	59,82	92,83	-	-	-	11,54	15,76	-	-	-
B. BIDANG KOMINFO																			
11.	Persentase Ijin Usaha Jasa Telekomunikasi yang Memenuhi Syarat dan Ketentuan.		85		85	95	-	-	-	89,29	81,37	-	-	-	105,05	85,65	-	-	-
12.	Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi.		78		78	95	-	-	-	81,31	79,86	-	-	-	104,24	84,06	-	-	-
13.	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional.		100		100	100	-	-	-	46,67	33,33	-	-	-	46,67	33,33	-	-	-
14.	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).		33,33		33,33	66,66	-	-	-	33,33	50	-	-	-	100,00	75,01	-	-	-



Tabel 2.3.a.1

**TUJUAN 1 DAN SASARAN 1 JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2016**

TUJUAN	SASARAN	KINERJA (Outcomes)		TARGET TAHUN	
		Indikator	Satuan	2015	2016
1 Mewujudkan Profesionalisme Aparatur dan Profesionalisme Birokrasi	1 Meningkatnya Kinerja Aparatur Untuk Mewujudkan Pelayanan Prima dan Tata Pemerintahan Yang Baik.	1 Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100
		2 Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	%	95	95
		3 Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur	%	90	95
		4 Persentase Tertib Administrasi Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan	%	100	100



Tabel 2.3.a.2

**TUJUAN 2 DAN SASARAN 2 JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2016**

TUJUAN	SASARAN	KINERJA (Outcomes)			TARGET TAHUN	
		Indikator	Satuan	2015	2016	
2 Mewujudkan Transportasi Kota Pontianak Yang Disiplin, Tertib, Aman dan Lancar.	2 Meningkatnya Pelayanan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan.	1	Persentase Tingkat Keberfungsian APILL dan Fasilitas Perlengkapan Jalan.	%	100	100
		2	Persentase Terpeliharanya Terminal Dan Halte Dengan Baik.	%	80	85
		3	Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu-rambu, PJU, Marka dan Guardrail).	%	40	55
		4	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat.	%	90	100
		5	Persentase Kelancaran Arus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	%	90	95
		6	Persentase Peningkatan Penertiban Parkir Pada Kawasan Perdagangan Dan Jasa.	%	100	100
		7	Persentase Peningkatan Potensi Parkir.	%	90	95
		8	Persentase Berfungsinya Dermaga Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan.	%	100	100
		9	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai.	%	97,50	97,50
		10	Persentase Jumlah Uji Kendaraan Angkutan Umum dan Barang.	%	65	95



2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2017-2019 :

a. **Tujuan 1** : Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah.

Sasaran 1 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sasaran 2 : Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur.

Strategi 1 : Penguatan Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Pelayanan Prima.

Strategi 2 : Penguatan Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu :

- 1) Penerapan Monitoring, Evaluasi dan Kualitas Pelaporan secara berkala dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2) Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai kebutuhan.
- 3) Penerapan sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*).
- 4) Penyediaan sarana prasarana kerja yang memadai.

b. **Tujuan 2** : *Mewujudkan Kualitas Transportasi Kota Pontianak.*

Sasaran 3 : *Terwujudnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Pontianak.*

Sasaran 4 : *Terwujudnya Kinerja Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan.*

Strategi 3 : Optimalisasi Pengawasan dan Pembinaan serta Pelayanan Bidang Perhubungan.



Strategi 4 : *Pengelolaan dan Penataan Fasilitas Sarana Dan Prasarana Bidang Perhubungan.*

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu :

- 1) Meningkatkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana perhubungan.
- 2) Meningkatkan Sistem Transportasi dan Angkutan Umum/Massal yang Mendukung kelancaran pergerakan penumpang dan distribusi barang/jasa dalam kerangka pengembangan konektivitas intrawilayah maupun interwilayah.
- 3) Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi.
- 4) Meningkatkan Fungsi dan Penataan Angkutan Sungai.
- 5) Mengembangkan Sistem dan Manajemen Perparkiran.
- 6) Meningkatkan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Darat dan Sungai.
- 7) Mendorong partisipasi peran swasta dalam penyediaan sarana angkutan dengan memperhitungkan efisiensi, daya beli masyarakat, serta memperhatikan kepentingan penyedia jasa angkutan (operator) terkait jaminan kelangsungan usaha.
- 8) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia transportasi guna mewujudkan penyelenggaraan bidang perhubungan yang efektif dan efisien.



Tabel T-C. 23.b

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PONTIANAK TAHUN 2017-2019

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET IKK/IKU	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A. BIDANG KESEKRETARIATAN (UMUM)																			
1.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perhubungan.		SB		-	-	SB	SB	SB	-	-	SB	SB	-	-	-	SB	SB	-
2.	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan.		B		-	-	B	BB	A	-	-	BB	BB	-	-	-	BB	BB	-
3.	Persentase Temuan Yang Ditindaklanjuti Pada Dinas Perhubungan.		100		-	-	100	100	100	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-
B. BIDANG PERHUBUNGAN																			
4.	Tingkat Kinerja Pelayanan Ruas Jalan (Kelancaran Lalu Lintas) Kota Pontianak.		B		-	-	B	A	A	-	-	B	B	-	-	-	B	B	-
5.	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas.		90		-	-	90	95	100	-	-	82,01	83,79	-	-	-	91,12	88,20	-
6.	Persentase Angkutan Umum, Online dan Barang Yang Lulus Uji KIR.		98		-	-	98	100	100	-	-	91,27	78,39	-	-	-	93,13	78,39	-
7.	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Angkutan Sungai dan Penyeberangan.		80		-	-	80	85	90	-	-	70	70	-	-	-	87,5	82,35	-



Tabel 2.3.b.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2017-2019

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	KINERJA (Outcomes)		CAPAIAN					
			Indikator	Satuan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
					Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1 Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah.	1 Nilai Evaluasi AKIP	1 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	1 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perhubungan.	Predikat	SB	SB	SB	SB	SB	
		2 Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur.	2 Nilai Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan.	Predikat	B	BB	BB	BB	A	
		3 Persentase Temuan Yang Ditindaklanjuti. Pada Dinas Perhubungan.		%	100	100	100	100	100	

Tabel 2.3.b.2

TUJUAN DAN SASARAN 3 dan 4 JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2017-2019

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	KINERJA (Outcomes)		TARGET DAN REALISASI					
			Indikator	Satuan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2 Mewujudkan Kualitas Transportasi Kota Pontianak.	2 Tingkat Kinerja Pelayanan Ruas Jalan (Kelancaran Lalu Lintas) Kota Pontianak. <i>Formulasi:</i> <i>(Volume / Capacity Ratio)</i>	3 Terwujudnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Pontianak.	1 Tingkat Kinerja Pelayanan Ruas Jalan (Kelancaran Lalu Lintas) Kota Pontianak. <i>Formulasi:</i> <i>(Volume / Capacity Ratio)</i>	Tingkat Pelayanan	B	B	A	B	A	
			2 Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas. <i>Formulasi:</i> <i>(Fasilitas yg tersedia / Fasilitas yg seharusnya) x 100</i>	%	90	82,01	95	83,79	100	
			3 Persentase Angkutan Umum dan Barang Yang Lulus Uji KIR. <i>Formulasi:</i> <i>(Jumlah yg lulus KIR / Jumlah yg diuji KIR)</i>	%	98	91,27	100	78,39	100	
		4 Terwujudnya Kinerja Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan.	1 Tingkat Ketersediaan Fasilitas Angkutan Sungai dan Penyeberangan. <i>Formulasi:</i> <i>(Fasilitas yg tersedia / Fasilitas yg seharusnya) x 100</i>	%	80	70,0	85	70,00	90	



2.3.1. Pelayanan Di Bidang Perhubungan

1. Pelayanan Angkutan Jalan

Pelayanan angkutan jalan yang merupakan salah satu jenis pelayanan dasar pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak, yang terdiri dari :

a. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan.

Pelayanan dasar jaringan prasarana angkutan jalan merupakan pelayanan dalam penyediaan prasarana dasar berupa Terminal dan Halte dengan fasilitas yang layak yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan, kemudahan dan kelancaran bagi pengguna jasa. Adapun jumlah Halte dan Terminal di Kota Pontianak dari Tahun 2010-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Jumlah Halte Di Kota Pontianak
Hingga Tahun 2019**

NO.	LOKASI	TAHUN	Jumlah Halte	Kondisi
1	Halte Akcaya Jl. St. Syahrir	2016	1	Baik
2	Halte S. Parman Jl. S. Parman	2016	1	Baik
3	Halte SMAN 2 Jl. Martadinatha	2016	1	Baik
4	Halte SMP 5 Jl. Hasanudin	2016	1	Baik
5	Halte SMK4 Jl. Kom Yos Sudarso	2016	1	Baik
6	Halte Sekolah Terpadu Jl. Tj. Raya 2	2016	1	Baik
7	Halte Tugu Khatulistiwa Jl. Khatulistiwa	2016	1	Baik
8	Halte Tugu Digulis Jl A. Yani		1	Baik
9	Halte Mujahidin Jl. A. Yani		1	Baik
10	Halte MAN 2 Jl. A. Yani		1	Baik
11	Halte P. Natakusuma Jl. P. Natakusuma		1	Baik



NO.	LOKASI	TAHUN	Jumlah Halte	Kondisi
12	Halte Sultan Hamid Jl. St. Hamid		1	Baik
13	Halte Simpang Tanjung Raya Jl. Perintis Kemerdekaan		1	Baik
14	Halte Simpang Tanjung Raya Jl. Perintis Kemerdekaan		1	Baik
15	Halte Simpang Tanjung Hulu Jl. Perintis Kemerdekaan		1	Baik
16	Halte Simpang Tanjung Hulu Jl. Perintis Kemerdekaan		1	Baik
17	Halte Sekolah Asisi Jl. G. Situt Machmud		1	Baik
18	Halte STM1 Jl. Khatulistiwa		1	Baik

b. Fasilitas Perlengkapan Jalan.

Pelayanan Dasar penyediaan fasilitas perlengkapan jalan berupa Rambu-rambu lalu lintas, Marka Jalan dan Guardrill serta kelengkapan lainnya berupa Zebra Cross, Traffic Light, Warning Light dan CCTV. Adapun jumlah Traffic Light dan Zebra Cross hingga tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Jumlah Simpang Yang Terpasang Traffic Light
Di Kota Pontianak Hingga Tahun 2019**

NO	SIMPANG/LOKASI	TAHUN PEMBUATAN	KONDISI
1	SIMPANG POLDA	REHAB TOTAL 2017	BAIK
2	BUNDARAN DIGULIS	REHAB TOTAL 2017	BAIK
3	SIMPANG PAJAK	REHAB TOTAL 2017	BAIK
4	SIMPANG JOHAR	1998	BAIK
5	SIMPANG ALIANYANG	2013 (PERBAIKAN 2017)	BAIK
6	SIMPANG GERTAK 3	1998	BAIK
7	SIMPANG GARUDA	REHAB TOTAL 2018	BAIK
8	SIMPANG FLAMBOYAN	REHAB TOTAL 2018	BAIK
9	SIMPANG PARIT BESAR	2008	BAIK
10	SIMPANG PATIMURA	REHAB TOTAL 2018	BAIK



NO	SIMPANG/LOKASI	TAHUN PEMBUATAN	KONDISI
11	SIMPANG JUANDA	2000	BAIK
12	SIMPANG PANCASILA - ALIANYANG	2000 (PENINGKATAN 2018)	BAIK
13	SIMPANG SUWIGNYO - U. BAWADI	2011 (REHAB 2016)	BAIK
14	SIMPANG JIHAD	2000	BAIK
15	SIMPANG ST ABDURAHMAN - U. BAWADI	MILIK KEMENTERIAN	BAIK
16	SIMPANG PANCASILA - JERANDING	1998	BAIK
17	SIMPANG SYAKIRIN	2004	BAIK
18	SIMPANG WAHIDIN (PAL 3)	MILIK KEMENTERIAN	BAIK
19	SIMPANG DANAU SENTARUM	2000 (Rencana PENINGKATAN 2019)	BAIK
20	SIMPANG TANJUNG RAYA 1	2004	BAIK
21	SIMPANG TANJUNG HULU	2004	BAIK
22	SIMPANG 28 OKTOBER	2006 (2017 GANTI MESIN KONTROL)	BAIK

Pengecatan dan Jumlah Zebra Cross dan Kebutuhannya Hingga Tahun 2018

	2016	2017	2018
LOKASI ZEBRA CROSS	9 LOKASI	33 LOKASI	9 LOKASI
JUMLAH	51 LOKASI		

LOKASI	JUMLAH	HINGGA 2018	KURANG
SD/MI	84	16	68
SMP/MTS	26	5	19
SMA/MAN	15	3	12
RMH. IBADAH	89	8	81
PERSIMPANGAN	37	16	21
PASAR	10	0	10
LAINNYA (KANTOR, KAMPUS)	20	3	17
JUMLAH	281	51	230



► **RENCANA PENGECATAN ZEBRA CROSS TAHUN 2019 DENGAN LOKASI SEBAGAI BERIKUT:**

- SIMPANG SUWIGNYO
- SIMPANG 28 OKTOBER
- SIMPANG JUANDA
- SIMPANG FLAMBOYAN
- SIMPANG TANJUNG RAYA
- SIMPANG TANJUNG HULU
- DEPAN KANTOR WALIKOTA
- SD NEGERI 13 KEC. PTK TIMUR
- SD NEGERI 15 KEC. PTK SELATAN
- SD NEGERI 04 KEC. PTK TIMUR
- SD NEGERI 68 KEC. PTK BARAT

**Pengecatan Marka Jalan
Tahun 2016-2018**

	2016	2017	2018
LUAS MARKA JALAN	927,72 M2	1.527,53 M2	706,86 M2
JUMLAH	3.162,11 M2		

**Rencana Pengecatan Marka Jalan
Tahun 2019**

NO	MARKA	LOKASI
1	MARKA JALAN	JL. Suwignyo, Jl. Ahmad Yani, Jl. Gusti S. Lelanang, Jl. KH. Wahid Hasyim, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Jl. Johan Idrus, dan Jl. Danau Sentarum
2	Marka Sepeda Motor	Jl. Ahmad Yani (Pemeliharaan)
3	Marka Sepeda	Jl. KH. Ahmad Dahlan, Jl. KH. Wahid Hasyim, Jl. Sultan Abdurrahman (Pemeliharaan)



**Pengecatan YELLOW BOX JUNCTION
Tahun 2016-2018**

2016	2017	2018
SIMPANG PAJAK	SIMPANG PAJAK	TIDAK ADA
SIMPANG FLAMBOYAN	SIMPANG FLAMBOYAN	
SIMPANG PATIMURA	SIMPANG PATIMURA	
SIMPANG GARUDA	SIMPANG GARUDA	

- Tahun 2019 akan dilakukan Pemeliharaan Yellow Box di Simpang Pajak, Simpang Flamboyan, Simpang Patimura dan Simpang Garuda.
- Pengadaan Ruang Henti Khusus Tahun 2018 di Simpang Pajak.

**Pengadaan/Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)
Hingga Tahun 2018**

No	Lokasi	Kondisi	Tahun
1	SMP 9 JL. Natakusuma	Baik	2014
2	SD Negeri 34 Pontianak Kota	Terhapus	2014
3	SD Bawamai	Baik	2015
4	SD Negeri 34 Jl. Candramidi	Baik	2015
5	Perguruan Bina Utama Jl. Tj. Raya 2	Baik	2015
6	SD 03 Kec. Ptk Timur	Baik	2015
7	SMPN 1	Baik	2016
8	Sekolah Bawari	Baik	2016
9	MIN Pal 5 Jl. Husein Hamzah	Baik	2016
10	SDN 01 Ptk Selatan Jl. Suparpto	Baik	2016
11	SMKN 1 Jl. Danau Sentarum	Baik	2016



No	Lokasi	Kondisi	Tahun
12	SMPN 13 Jl. Tebu	Baik	2017
13	SMPN 5 Jl. Hasanudin	Baik	2017
14	SMKN 2 Jl. Khatulistiwa	Baik	2017
15	SDN 31 Jl. Tabrani Ahmad	Baik	2018
16	SMPN 16 Jl. Martadinata	Baik	2018
17	SMPN 10 Jl. WR. Supratman	Baik	2018

- Tahun 2019 Rencana Pengadaan/Pembuatan Zoss Dengan Lokasi : SDN 06 Jl. S.Parman Kec. Pontianak Selatan dan SDN 34 Kec. Pontianak Kota.

Pemasangan CCTV dan Fiber Optik

	2015	2016	2017	2018
Kamera CCTV	11 unit	14 unit	22 unit	25 unit
JUMLAH	72 unit			

RENCANA TAHUN 2019 :

- Pemasangan kamera : Gertak 1, Gertak 2, Simpang Jeranding, Simpang Syakirin, Simpang St. Abdurahman – Uray Bawadi dan Bundaran Kota Baru
- Rehabilitasi Ruang Control Room ATCS/CCTV

	2008	2017	2018
Panjang Fiber Optik	4000 meter	2840 meter	6950 meter
JUMLAH	13.790 meter		

RENCANA TAHUN 2019 :

- Pemasangan Fiber Optik: Jl. Hasanudin – Jl. HRA. Rahman – Jl. KH. Wahid Hasyim sepanjang ± 6 km



**Rekapitulasi Jumlah PJU di Kota Pontianak
Pada Jalan Primer/Arteri/Sekunder Per Januari 2018**

No.	LOKASI	SATUAN	YANG DI BUTUHKAN	BELUM ADA PJU	YG SUDAH TERPASANG
1.	Kecamatan Pontianak Selatan	Titik Lampu	994	142	852
2.	Kecamatan Pontianak Tenggara	Titik Lampu	533	167	366
3.	Kecamatan Pontianak Barat	Titik Lampu	503	143	360
4.	Kecamatan Pontianak Kota	Titik Lampu	580	171	409
5.	Kecamatan Pontianak Timur	Titik Lampu	438	172	266
6.	Kecamatan Pontianak Utara	Titik Lampu	490	292	198
	Jumlah	Titik Lampu	3.538	1.087	2.451

**Rekapitulasi Jumlah PJU di Kota Pontianak
Pada Jalan Gang/Lingkungan/Komplek Per Januari 2018**

No.	LOKASI	SATUAN	SUDAH ADA PJU	BELUM ADA PJU	YG SUDAH TERPASANG
1.	Kecamatan Pontianak Selatan	Titik Lampu	1.959	195	1.764
2.	Kecamatan Pontianak Tenggara	Titik Lampu	1.889	117	1.772
3.	Kecamatan Pontianak Barat	Titik Lampu	2.003	229	1.774
4.	Kecamatan Pontianak Kota	Titik Lampu	2.374	146	2.228
5.	Kecamatan Pontianak Timur	Titik Lampu	1.635	204	1.431
6.	Kecamatan Pontianak Utara	Titik Lampu	1.778	405	1.374
	Jumlah	Titik Lampu	11.638	1.296	10.342

Jumlah dan Kebutuhan Rambu Lalu Lintas di Kota Pontianak Hingga Tahun 2018

TAHUN	TARGET	JUMLAH HINGGA TAHUN KE	Capaian Target Kebutuhan(%)	Keterangan
2015	2.500 buah rambu	1.352 buah rambu	54,08	Jumlah Pengadaan Tahun 2015 sebanyak 294 buah
2016	2.500 buah rambu	1.614 buah rambu	64,56	Jumlah Pengadaan Tahun 2016 sebanyak 262 buah
2017	2.500 buah rambu	1.708 buah rambu	68,32	Jumlah Pengadaan Tahun 2017 sebanyak 94 buah
2018	2.500 buah rambu	1.772 buah rambu	70,88	Jumlah Pengadaan Tahun 2018 sebanyak 64 buah
2019	2.500 buah rambu	1.860 buah rambu	74,40	Rencana Pengadaan Tahun 2019 sebanyak 88 buah



c. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Untuk memenuhi standar laik jalan angkutan umum orang dan barang, Dinas Perhubungan Kota Pontianak secara intensif melakukan peningkatan proses Uji KIR Kendaraan Bermotor yang dilakakukan dan dikelola oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

**Jumlah Target dan Capaian Pengujian Kendaraan Bermotor
Dari Tahun 2015-2019**

TAHUN	TARGET	REALISASI	Capaian %
2015	13.299 Unit	12.239 Unit	92,03
2016	15.851 Unit	14.715 Unit	92,83
2017	15.492 Unit	14.139 Unit	91,27
2018	15.870 Unit	12.441 Unit	78,39
2019	15.942 Unit		

2. Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan

Jenis Pelayanan Dasar ini terdiri dari :

a. Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan.

Pelayanan ini merupakan kegiatan pelayanan bongkar muat orang dan barang serta penyediaan kapal penyeberangan yang memberikan kemudahan dan kelancaran bagi masyarakat dalam melintasi/ menyeberang sungai dalam kota.



**Jumlah Aktivitas Pelayanan
Ferry Penyeberangan Bardan-Siantan Tahun 2015-2018**

No.	Jenis/Golongan Pengguna Jasa Penyeberangan	Satuan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Penumpang Umum (PU)	Orang	215.468	131.947	143.633	132.147
2.	Sepeda (Gol.1)	Unit	11.652	10.679	12.859	8.556
3.	Sepeda Motor (Gol.2)	Unit	822.443	821.102	877.975	779.678
4.	Sepeda Motor Berboncengan (Gol.2.B)	Unit	510.931	491.804	525.449	469.205
5.	Sepeda Motor Diatas 500cc/Roda 3 (Gol.3)	Unit	1.640	1.388	1.268	1.257
6.	Kendaraan Roda 4 (Gol.4)	Unit	40.035	29.710	26.267	27.547
7.	Kendaraan Roda 4 Bermuatan (Gol.4.M)	Unit	61.469	56.513	56.502	60.988
8.	Kendaraan Roda 6 (Gol.5)	Unit	46.864	47.034	55.271	54.695
9.	Kendaraan Roda 6 Bermuatan (Gol.5.M)	Unit	55.575	46.078	55.050	54.713
10.	Jumlah Frekwensi Pelayanan	Trip	20.246	33.096	34.548	36.702

**Pelayanan Aktivitas Sandar Kapal Di Pelabuhan dan Dermaga
Kota Pontianak Tahun 2015-2018**

TAHUN	Aktivitas Sandar Kapal Di Pelabuhan Pedalaman				Sandar Kapal Laut	JUMLAH
	Satuan	Pel. Kapuas Indah	Pel. Kapuas Besar	Pel. Senghie	Pel. Senghie	
2015	Kali Sandar	2.101	1.342	2.402	1.822	7.667
2016	Kali Sandar	1.935	1.465	2.974	2.176	8.550
2017	Kali Sandar	2.042	1.901	2.639	2.070	8.652
2018	Kali Sandar	1.690	2.033	2.375	1.609	7.707
Jumlah	Kali Sandar	7.768	6.741	10.390	7.677	32.576

b. Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Penyeberangan.

Pelayanan dasar ini berupa penyediaan dermaga angkutan sungai dan sampan bermotor serta Dermaga Penyeberangan beserta fasilitasnya, yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan kemudahan/kelancaran pengguna jasa dermaga/pelabuhan penyeberangan.



2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Pontianak membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan dalam kurun waktu 2015-2019 sesuai dengan program yang ditetapkan dapat dilihat berikut ini.

- Tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 15 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.768.473.100,- dengan realisasi Rp6.439.284.912,- atau 82,89%.
- Tahun 2016 dilaksanakan 14 Program dengan anggaran Rp8.376.178.538,- dan realisasi sebesar Rp8.052.233.082,- atau 96,63%.
- Tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 14 program dengan anggaran sebesar Rp36.300.100.213,- dan realisasi Rp33.941.789.047,- atau 93,50%.
- Tahun 2018 dilaksanakan kegiatan sebanyak 14 program dengan anggaran sebesar Rp33.421.737.573,- dengan realisasi sebesar Rp32.155.549.410,- atau 96,21%.
- Tahun 2019 dilaksanakan kegiatan sebanyak 14 program dengan anggaran sebesar Rp34.858.512.573,-

Dari alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana diuraikan di atas, secara tabel dan grafik Pagu anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Perhubungan Kota Pontianak serta realisasinya dapat kita lihat perbandingannya sebagai berikut :



Tabel T-C. 24.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019

No	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
A.	PROGRAM URUSAN/BIDANG PERHUBUNGAN																	
1.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	468.740.000	369.270.250	24.650.241.893	21.306.112.653	23.842.539.429	449.471.600	364.071.589	22.858.858.082	21.169.053.770	-	95,89%	98,59%	92,73%	99,36%	-	1638,13%	2050,76%
2.	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ	1.619.140.500	1.865.862.750	2.345.022.000	3.025.547.760	3.985.050.840	1.577.097.200	1.853.828.000	2.322.692.000	2.633.155.691	-	97,40%	99,36%	99,05%	87,03%	-	25,41%	18,74%
3.	Pembangunan Sarana dan Fasilitas LLAJ	892.035.000	1.696.166.000	3.961.131.000	3.454.438.000	3.789.005.280	789.534.000	1.680.336.050	3.900.830.560	3.359.446.550	-	88,51%	99,07%	98,48%	97,25%	-	55,14%	77,03%
4.	Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	274.820.000	-	58.950.000	102.545.000	286.185.000	-	-	58.345.000	101.160.000	-	-	-	98,97%	98,65%	-	58,16%	73,38%
5.	Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai dan Pedalaman	343.940.000	-	-	781.692.000	-	323.200.000	-	725.003.500	-	-	93,97%	-	-	92,75%	-	127,28%	124,32%
6.	Pembangunan Sarana dan Prasarana ASDP	202.650.000	258.550.000	231.750.000	226.604.000	249.970.000	-	233.350.000	230.677.000	223.069.400	-	-	90,25%	99,54%	98,44%	-	6,33%	-2,22%
7.	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	663.996.000	264.116.000	267.860.000	301.140.000	700.767.000	553.209.000	205.659.100	265.413.000	291.412.800	-	83,32%	77,87%	99,09%	96,77%	-	21,58%	-7,99%
8.	Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	-	-	454.440.000	-	-	-	-	450.370.000	-	-	-	-	99,10%	-	-	0,00%	0,00%
9.	Peningkatan Pelayanan ASDP	-	443.168.000	-	-	905.904.400	-	435.939.000	-	-	-	-	98,37%	-	-	-	104,42%	0,00%
B.	PROGRAM URUSAN/BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
10.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	458.221.450	451.850.000	-	-	-	385.278.400	381.092.976	-	-	-	84,08%	84,34%	-	-	-	-1,39%	-1,09%
11.	Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	292.134.500	126.060.000	-	-	-	256.588.325	101.935.549	-	-	-	87,83%	80,86%	-	-	-	-56,85%	-60,27%
	Jumlah	5.215.677.450	5.475.043.000	31.969.394.893	29.198.079.413	33.759.421.949	4.334.378.525	5.256.212.264	30.087.185.642	28.502.301.711	-	83,10%	96,00%	94,11%	97,62%	-	123,96%	162,80%

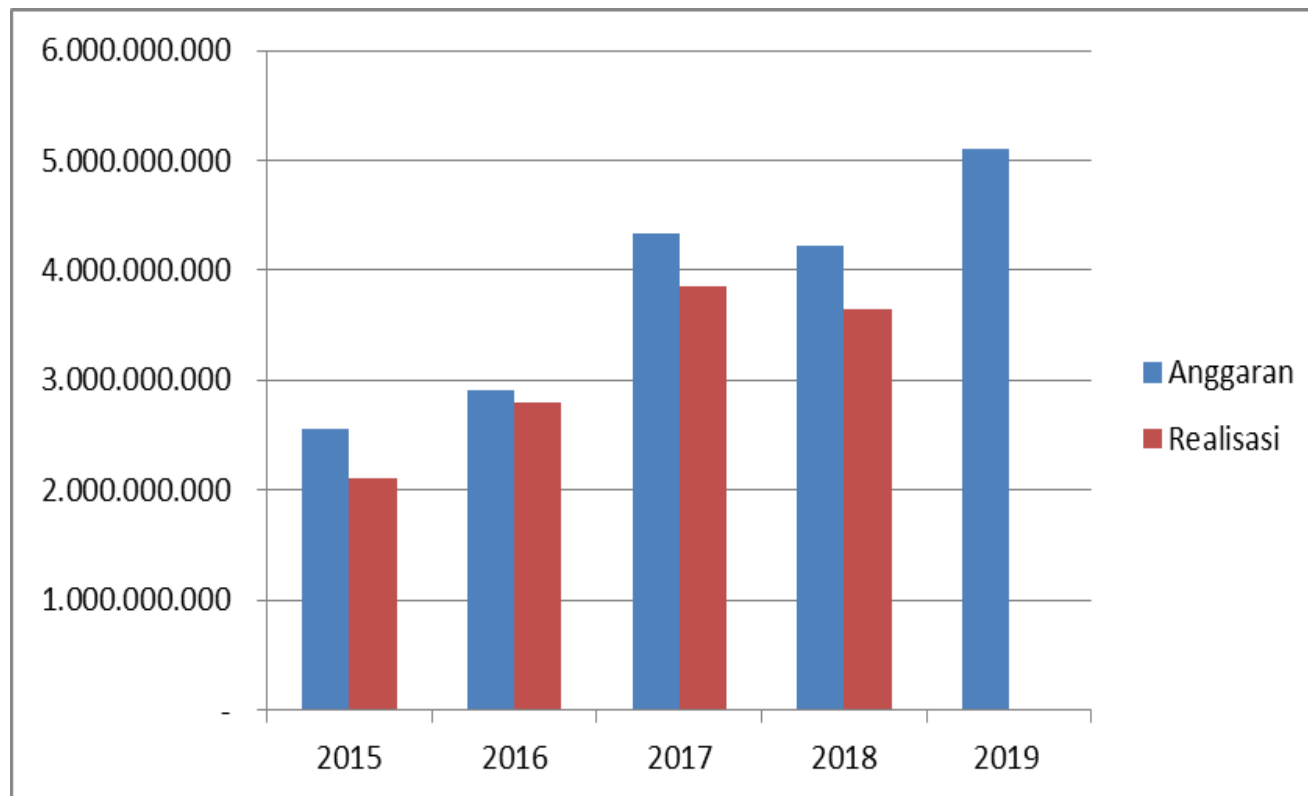


Tabel. 2.3.2.a
Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Umum (Keseekretariatan)
Pada Dinas Perhubungan Tahun 2015 - 2019

NO	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN												
		2015			2016			2017			2018			2019
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Program sesuai Renstra 2015-2019 sebelum Revisi Renstra.														
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.492.494.350	1.178.895.626	78,99	1.669.320.588	1.649.827.313	98,83	-	-	-	-	-	-	-
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	706.110.300	647.315.111	91,67	936.976.200	905.442.305	96,63	-	-	-	-	-	-	-
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	159.250.000	159.004.650	99,85	182.155.000	131.496.000	72,19	-	-	-	-	-	-	-
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000	-	0,00	20.000.000	19.000.000	95,00	-	-	-	-	-	-	-
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	107.650.000	107.400.000	99,77	80.350.550	78.075.900	97,17	-	-	-	-	-	-	-
6	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	12.291.000	12.291.000	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pelayanan Prima	-	-	-	12.333.200	12.179.300	98,75	-	-	-	-	-	-	-
Program sesuai Renstra 2015-2019 setelah Revisi Renstra. (Perubahan SOPD).														
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	-	-	1.950.719.470	1.812.140.384	92,90	2.511.446.960	2.296.617.467	91,45	2.767.204.000
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	-	-	25.000.000	-	0,00	75.000.000	14.875.000	19,83	75.000.000
3	Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	-	-	-	-	-	-	235.500.000	218.949.000	92,97	257.800.000	246.948.100	95,79	284.500.000
4	Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	2.030.573.400	1.735.135.946	85,45	1.228.614.800	949.778.832	77,30	1.7793.904.900
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja	-	-	-	-	-	-	59.479.250	59.341.275	99,77	99.297.400	95.788.700	96,47	125.288.610
6	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	-	-	-	-	-	-	6.650.000	6.650.000	100,00	32.943.000	30.805.100	93,51	36.142.540
7	Pelayanan Prima	-	-	-	-	-	-	22.783.200	22.395.800	98,30	18.556.000	18.434.500	99,35	18.448.920
	JUMLAH	2.552.795.650	2.104.906.387	82,45	2.901.135.538	2.796.020.818	96,38	4.330.705.320	3.854.612.405	89,01	4.223.658.160	3.653.247.699	86,49	5.100.488.970



Grafik. 2.3.2.a
Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Umum (Kesekretariatan)
Pada Dinas Perhubungan Tahun 2015 – 2019



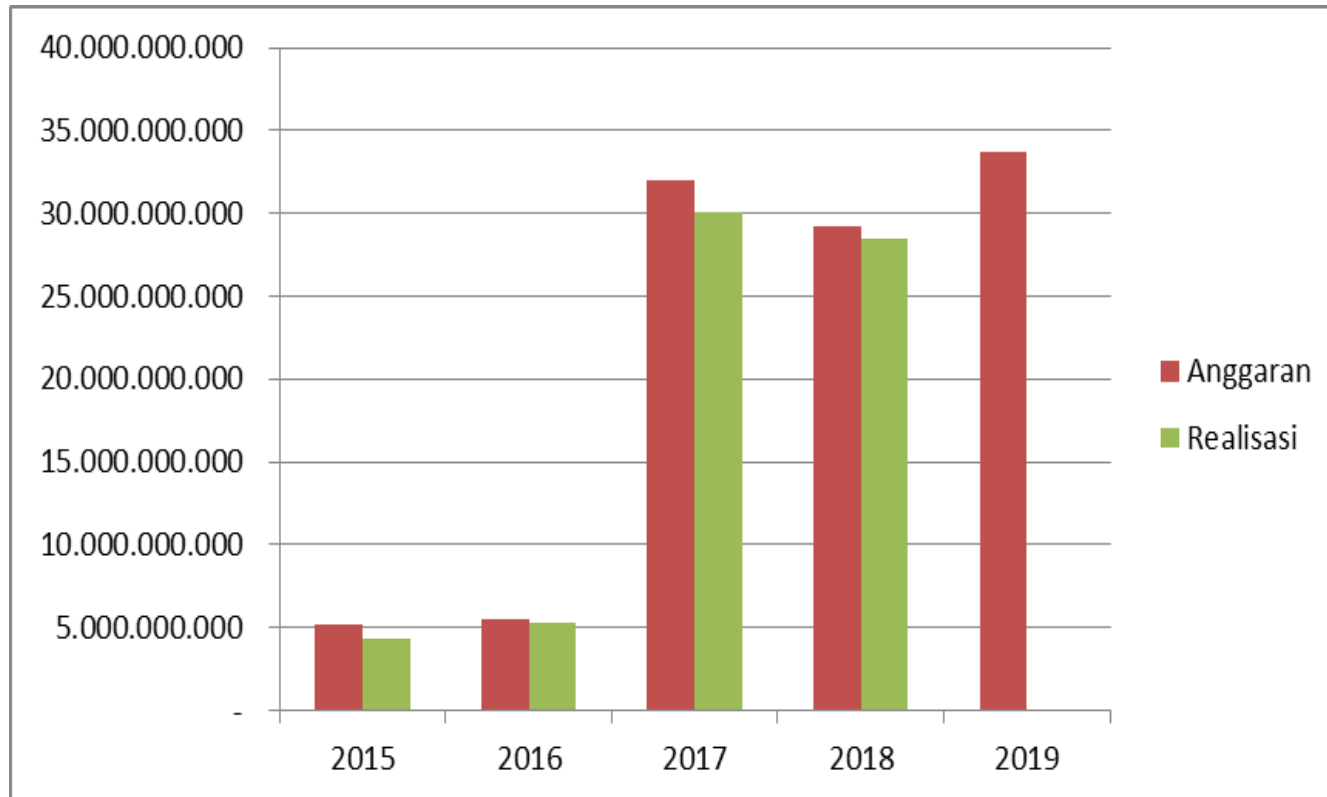


Tabel. 2.3.2.b
Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Strategis (Bidang Perhubungan)
Pada Dinas Perhubungan Tahun 2015 - 2019

NO	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN												
		2015			2016			2017			2018			2019
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Program sesuai Renstra 2015-2019 sebelum Revisi Renstra.														
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	468.740.000	449.471.600	95,89	369.270.250	364071589	98,59	-	-	-	-	-	-	-
2	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ	1.619.140.500	1.577.097.200	97,40	1.865.862.750	1853828000	99,36	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembangunan Sarana dan Fasilitas LLAJ	892.035.000	789.534.000	88,51	1.696.166.000	1680336050	99,07	-	-	-	-	-	-	-
4	Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	274.820.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai dan Pedalaman	343.940.000	323.200.000	93,97	443.168.000	435939000	98,37	-	-	-	-	-	-	-
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana ASDP	202.650.000	-	-	258.550.000	233350000	90,25	-	-	-	-	-	-	-
7	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	663.996.000	553.209.000	83,32	264.116.000	205659100	77,87	-	-	-	-	-	-	-
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	458.221.450	385.278.400	84,08	451.850.000	381092976	84,34	-	-	-	-	-	-	-
9	Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	292.134.500	256.588.325	87,83	126.060.000	101935549	80,86	-	-	-	-	-	-	-
Program sesuai Renstra 2015-2019 setelah Revisi Renstra. (Perubahan SOPD).														
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	-	-	-	-	-	-	24.650.241.893	22.858.858.082	92,73	21306112653	21169053770	99,36	23.842.539.429
2	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ	-	-	-	-	-	-	2.345.022.000	2.322.692.000	99,05	3025547760	2633155691	87,03	3.985.050.840
3	Pembangunan Sarana dan Fasilitas LLAJ	-	-	-	-	-	-	3.961.131.000	3.900.830.560	98,48	3454438000	3359446550	97,25	3.789.005.280
4	Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-	-	58.950.000	58.345.000	98,97	102545000	101160000	98,65	286.185.000
5	Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai dan Pedalaman	-	-	-	-	-	-	454.440.000	450.370.000	99,10	781692000	725003500	92,75	905.904.400
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana ASDP	-	-	-	-	-	-	231.750.000	230.677.000	99,54	226604000	223069400	98,44	249.970.000
7	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-	267.860.000	265.413.000	99,09	301140000	291412800	96,77	700.767.000
	JUMLAH	5.215.677.450	4.334.378.525	83,10	5.475.043.000	5.256.212.264	96,00	31.969.394.893	30.087.185.642	94,11	29.198.079.413	28.502.301.711	97,62	33.759.421.949



Grafik. 2.3.2.b
Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Strategis (Bidang Perhubungan)
Pada Dinas Perhubungan Tahun 2015 – 2019

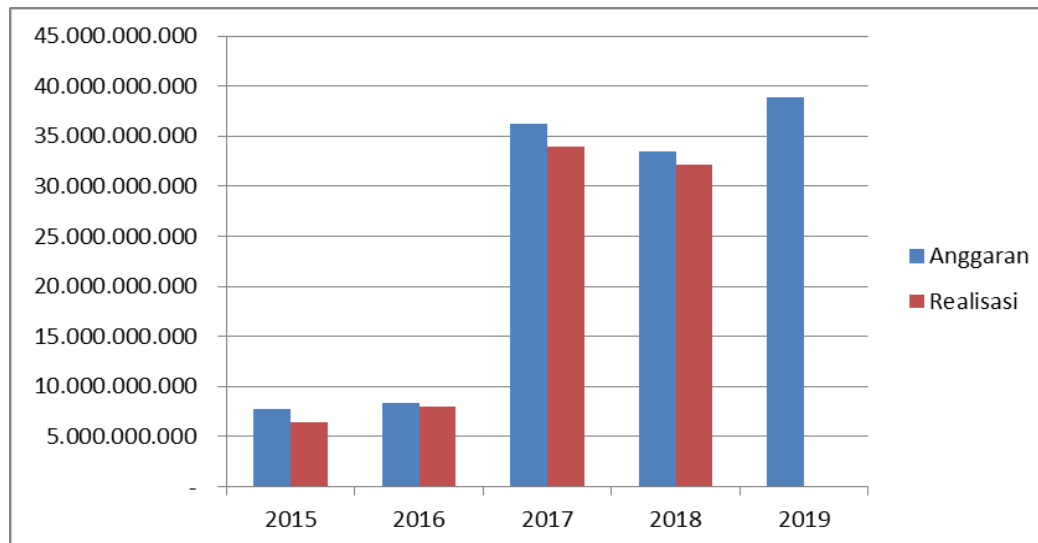




Tabel. 2.3.2.c
Total Alokasi dan Realisasi Anggaran (Bidang Sekretariat dan Perhubungan)
Pada Dinas Perhubungan Tahun 2015 - 2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Anggaran	7.768.473.100	8.376.178.538	36.300.100.213	33.421.737.573	38.859.910.919
Realisasi	6.439.284.912	8.052.233.082	33.941.798.047	32.155.549.410	-

Grafik.
Total Alokasi dan Realisasi Anggaran (Bidang Sekretariat dan Perhubungan)
Pada Dinas Perhubungan Tahun 2015 – 2019





2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam pengembangan pelayanan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kemacetan lalu lintas di perkotaan menjadi isu strategis. Penanganan kemacetan lalu lintas perlu pendekatan kebijakan multi facet (level macro = tata ruang, Level Mezzo = transport demand, dan Level Micro = Street level), serta dinamika Kota Pontianak semakin berkembang dan merupakan Ibukota Propinsi Kalimantan Barat sehingga tidak terlepas dari lonjakan penambahan jumlah kendaraan setiap hari/bulan/tahun serta pengguna jalan yang semakin meningkat.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat pemakai jalan dalam menjaga dan mematuhi ketentuan berlalu lintas sehingga perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas serta melakukan upaya yang intensif dalam hal pengawasan dan penertiban lalu lintas serta pembinaan kepada masyarakat. Selain itu perlu adanya pengembangan dan inovasi dalam upaya pembinaan dan pengawasan lalu lintas, seperti pemanfaatan perkembangan Teknologi, seperti pengembangan Inovasi BCL (Bisnis Cakep lalu lintas Lancar) yang sedang dikembangkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak.
3. Meningkatnya pertumbuhan usaha jasa dan perdagangan serta meningkatnya pertumbuhan kendaraan, sehingga perlu melakukan



penataan, pengawasan dan pembinaan yang intensif terhadap juru parkir, pemilik usaha serta pengguna jasa dalam upaya penertipan perparkiran. Selain itu perlu adanya upaya penataan pada Kawasan tertentu dengan kebijakan inovatif dalam menata perparkiran, seperti penataan dan pembangunan Gedung parkir dan penataan kembali Kawasan perdagangan dan jasa.

4. Pesatnya perkembangan kawasan pemukiman, perdagangan dan lainnya serta semakin berkurang angkutan umum sehingga perlu adanya kajian dalam hal penataan kembali trayek serta mencari pola/jenis angkutan umum yang dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kelancaran (tepat waktu) sehingga dapat menarik bagi masyarakat dalam menggunakan angkutan umum
5. Semakin meningkatnya teknologi yang diterapkan pada sistem transportasi sehingga perlu adanya penyesuaian dan peningkatan pendidikan sesuai kebutuhan dan perkembangan yang ada serta berkembangnya penerapan teknologi pada jenis kendaraan sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap peralatan pengujian kendaraan, dimana kondisi yang ada saat ini sebagian besar peralatan yang digunakan merupakan peralatan tua dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

Faktor peluang pengembangan pelayanan merupakan faktor yang menjadi variabel untuk menentukan pencapaian keberhasilan guna mencapai tujuan



Dinas. Faktor tersebut merupakan nilai strategis yang memberi pengaruh keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota. Adapun faktor-faktor dimaksud sebagai berikut :

1. Adanya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
2. Adanya potensinya retribusi yang belum tergali seperti perbengkelan, kepelabuhan, serta belum dikembangkannya potensi gedung parkir dan belum dikelolanya kaitan pemanfaatan transportasi sungai sehingga dapat dijadikan salah satu transportasi alternatif angkutan sungai dalam kota yang perlu dikembangkan dan di tata.
3. Adanya kerjasama yang baik/dukungan instansi terkait, Aparat Kepolisian dan Pelindo.
4. Berkembangnya teknologi dan media informasi, mempermudah dalam diseminasi dan pendistribusian informasi pembangunan daerah dan nasional.
5. Perubahan Paradigma Kewenangan Terkait Perubahan Perundangan (Undang - undang No 14 Tahun 1992 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah dilakukan perubahan pada bulan Juni 2009 menjadi UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ). Dengan adanya perubahan substansi undang-undang tersebut sangat berpengaruh terhadap koridor penanganan dan penyelenggaraan LLAJ di daerah khususnya adanya perubahan paradigma yaitu sebagai berikut :



**Perbandingan Paradigma Ketugasan
Dinas Perhubungan Berdasarkan Perundangan**

No	UU LAMA (No.14 Tahun 1992)	UU BARU (No.22 Tahun 2009)
1.	Lebih Banyak Penanganan Lapangan	Labi lebih banyak melakukan Menejemen Transportasi
2.	Bertanggungjawab terhadap operasional dan menejemen	Difokuskan terhadap menejemen dan penyusunan kebijakan
3.		Perumusan Menejemen Kebijakan LL
4.		Penyusunan Rencana Induk Transportasi
5.		Penataan dan Menejemen Perparkiran
6.		Penyediaan Prasarana LLAJ
7.		Melakukan Monitoring dan evaluasi kinerja transportasi

Sehingga dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa paradigma Perhubungan saat ini sangat berkonsentrasi dengan tanggungjawabnya dalam melakukan perumusan kebijakan dan kegiatan menejemen lalu lintas serta bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan prasarana LLAJ di wilayah. Adapun kewenangan yang telah di bagi antara Perhubungan dan instansi Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut :



**Pembagian Kewenangan Kepolisian RI dan
Perhubungan Sesuai UU No.22 Tahun 2009**

POLRI bertanggungjawab terhadap Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi :	PEMERINTAH bertanggungjawab terhadap Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan :
Program nasional Keamanan	Program nasional kegiatan keselamatan
Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keamanan	Penyediaan dan Pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan jalan
Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, bimbingan dan penyuluhan	Pengkajian Masalah Keselamatan
Pengkajian masalah keamanan	Menejemen Keselamatan LLAJ
Menejemen keamanan	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan prasarana keselamatan
Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan/atau patroli	
Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi	
Penegakkan hukum	

**BAB****III****PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN****3.1.1. Permasalahan Di Bidang Perhubungan.**

Adapun permasalahan Dinas Perhubungan Kota Pontianak secara umum yang perlu menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan Bidang Perhubungan, sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana perhubungan untuk mendukung terwujudnya sistem perkotaan sesuai hirarkhi rencana tata ruang masih belum optimal.
2. Masih lemahnya pemanfaatan dan penataan angkutan sungai sampan bermotor sebagai salah satu angkutan umum sungai dalam wilayah Kota Pontianak.
3. Masih kurangnya penataan dan pemanfaatan dermaga sampan bermotor sebagai salah satu prasarana/fasilitas transportasi sungai bagi masyarakat, yang memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kelancaran dalam menuju lokasi yang diinginkan.
4. Peningkatan fungsi pelabuhan penyeberangan yang ada sehingga perlu dilakukan penataan dan pengembangan sehingga dapat memberikan



kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kelancaran bagi masyarakat yang menggunakan angkutan penyeberangan.

5. Penyediaan bahan kebijakan teknis berupa dokumen perencanaan umum bidang transportasi dan pemutahiran data data lalu lintas belum diwujudkan dengan optimal, antara lain penyusunan masterplan transportasi (Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan – RIJLLAJ dan Tatanan Rencana Transportasi Lokal – TATRALOK).
6. Berkembangnya usaha jasa dan kegiatan ekonomi yang begitu pesat, perlu adanya penataan secara terpadu kaitan perparkiran melalui pengembangan sistem dan manajemen perparkiran secara terpadu dan terintegrasi.
7. Jumlah angkutan umum di Kota Pontianak semakin berkurang, hal tersebut disebabkan berkurangnya peminat/pengguna angkutan umum dan lebih banyak masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, sehingga perlu adanya kajian yang mendalam untuk mencari solusi angkutan perkotaan serta peningkatan partisipasi/peranserta masyarakat dalam penyediaan sarana transportasi.
8. Kondisi sebagian besar peralatan pengujian kendaraan bermotor merupakan peralatan tua serta kondisi bangunan gedung pengujian kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan kondisi dan jenis kendaraan saat ini (kendaraan besar dan berbadan tinggi) sehingga pengujian harus dilakukan secara manual yang tentunya berpengaruh pada keakuratan pengujian, sehingga perlu adanya solusi dan inovasi sebagai upaya peningkatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.



9. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas, sehingga perlu dilakukan mengoptimalkan pengawasan dan sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat berkenaan dengan standar keselamatan, peraturan lalu lintas dan perparkiran.
10. Masih kurangnya personil dan tenaga/SDM yang mempunyai keahlian khusus bidang terminal, pengujian kendaraan bermotor, MRL, evaluasi andalalin dan pengelolaan perparkiran.
11. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan konsolidasi antar instansi terkait dalam penataan dan rekayasa lalu lintas.
12. Terbatasnya anggaran yang menjadi pagu anggaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak menyebabkan kurang optimalnya dalam mengalokasikan untuk kegiatan Rutin, kegiatan operasional dan kegiatan Fisik (investasi/sarana prasarana) sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun masalah pokok dalam bidang perhubungan di Kota Pontianak dapat dirumuskan sebagai mana tabel T-B. 35. Berikut ini :



TABEL T-B. 35.
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sarana dan Prasarana Transportasi masih belum optimal	1.1. Belum Optimalnya Penyediaan dan Penataan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan.	1.1.1. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang Lalu Lintas Angkutan Jalan. 1.1.2. Kurang Optimalnya penataan dan peningkatan fungsi angkutan sungai dan penyeberangan. 1.1.3. Belum adanya master plan transportasi yang menyeluruh dan terintegrasi. 1.1.4. Belum optimalnya pengembangan sistem dan manajemen parkir. 1.1.5. Masih lemahnya partisipasi dan peran serta swasta dalam penyediaan sarana transportasi. 1.1.6. Kurang Optimalnya sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor.
2.	Kualitas Transportasi yang masih kurang baik	2.1. Belum Optimalnya Pengawasan dan Pembinaan serta Pelayanan Bidang Perhubungan.	2.1.1. Lemahnya kesadaran masyarakat akan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. 2.1.2. Belum Optimalnya sumberdaya manusia sesuai dengan spesifikasi keahlian bidang perhubungan. 2.1.3. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam penataan dan rekayasa lalu lintas. 2.1.4. Belum optimalnya pelayanan dan pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor.



3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024 dan merupakan bagian dari periode keempat pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 yang disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025, visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak adalah *“Pontianak Kota Khatulistiwa yang Sejahtera Melalui Perdagangan dan Jasa Berwawasan Lingkungan”*. Visi tersebut dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas, Berahlak Mulia, Berbudaya dan Beradab;
2. Mewujudkan Masyarakat Madani, Manusiawi, Berkurangnya Masalah Sosial, Makin Berdaya dan Terjamin Hak-Hak Warga;
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Penanaman Modal untuk Kesejahteraan dan Keadilan;
4. Mewujudkan Kota Perdagangan, Jasa, Koperasi dan UKM untuk Menyerap Tenaga Kerja dan Meningkatkan Kemakmuran;



5. Mewujudkan Sarana, Prasarana, Tata Ruang dan Wilayah Perkotaan untuk Perdagangan dan Jasa yang Berwawasan Lingkungan;
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Masyarakat yang Paham Politik dan Taat Hukum.

Visi dan misi jangka panjang tersebut didesain akan dicapai melalui empat periode pembangunan jangka menengah yang masing-masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri. RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 sendiri merupakan periode keempat pembangunan jangka menengah dalam kerangka pembangunan jangka panjang Kota Pontianak.

3.2.1. Visi Kota Pontianak.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka Visi pembangunan Kota Pontianak untuk lima tahun mendatang (2020-2024) adalah :

Visi Kota Pontianak 2020-2024 :

“PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA BERWAWASAN LINGKUNGAN, CERDAS DAN BERMARTABAT”

Penjelasan dari Visi ini yaitu :

1. Pontianak Kota Khatulistiwa,

“Kota Pontianak merupakan satu-satunya Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintasan garis khatulistiwa”.



Hal ini menunjukkan bahwa visi tersebut mengedepankan potensi yang dimiliki Kota Pontianak yaitu letak geografisnya yang berada di lintasan garis khatulistiwa mempunyai keunikan yang dapat ditonjolkan sebagai identitas. Posisinya yang strategis sebagai ibukota propinsi, dekat dengan ibukota Negara Jakarta dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia membuat Kota Pontianak sebagai kota transit yang strategis dalam kegiatan perdagangan dan jasa, baik lokal, regional maupun internasional, sehingga dalam pencapaian visi tersebut secara optimal akan memanfaatkan keunggulan-keunggulan tersebut.

2. Berwawasan Lingkungan.

“Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh”.

Dengan demikian setiap pemanfaatan dan pendayagunaan potensi dan sumber daya alam yang ada akan dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, berkeadilan, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kota yang sedang berkembang, pembangunan Kota Pontianak dilakukan secara berimbang dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, kebersihan, keindahan, kenyamanan, memberikan rasa aman serta tertib dan teratur sesuai dengan rencana tata ruang kota, sehingga menjadikan kota Pontianak yang Bersih, Sehat, Hijau dan Asri dengan mengutamakan kearifan lokal.



3. Cerdas,

“Memiliki pengertian Kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif, dan terintegrasi”.

Hal ini mengandung makna kesadaran akan sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan dan agen perubahan memerlukan perhatian dan penanganan yang serius. Pembangunan Kota Pontianak diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif, inovatif. Sehingga diharapkan dengan sumberdaya yang berkualitas dapat menggiring Kota Pontianak menuju kemajuan dan mendatangkan kemakmuran bagi penghuninya, sehingga Kota Pontianak menjadi kota yang dikelola dengan tata kelola pemerintahan dan tata ruang yang baik dengan sumberdaya manusia yang Cerdas dan Inovatif.

4. Bermartabat,

“Artinya Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang toleran terhadap keragaman, didukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani, transparan dan akuntabel”.



3.2.2. Misi Kota Pontianak.

Sebagai landasan operasionalisasi visi, maka perlu dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang akan mengarahkan tujuan dan sasaran pembangunan. Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya.
2. Menciptakan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Representatif.
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat yang didukung Teknologi Informasi, serta Aparatur yang Berintegritas, Bersih dan Cerdas.
4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing.
5. Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib dan Berkelanjutan.

3.2.3. Program Pembangunan Pemerintah Kota Pontianak.

Sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pontianak, ditetapkanlah program-program pembangunan jangka menengah yang akan direalisasikan pada kurun waktu 2020-2024. Adapun program pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Pontianak khususnya Bidang Perhubungan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Perhubungan
 - 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
 - 2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ



- 3) Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ
- 4) Program Pembangunan dan Pemeliharaan PJU
- 5) Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan
- 6) Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP
- 7) Program Peningkatan Pelayanan ASDP
- 8) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perhubungan Kota Pontianak khususnya pada program strategis pembangunan Bidang Perhubungan. Hal ini ditunjukkan melalui :

- ❖ **Pernyataan misi ke 2** : *Menciptakan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Representatif.*

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan yaitu dengan memberikan pelayanan berupa Peningkatan dan penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan yang berkualitas dan representatif.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI KALBAR.

3.3.1. Renstra Kementerian Perhubungan

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan



yang tertampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, berdimensi kewilayahan (per pulau) dan telah menyesuaikan dengan Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan Pembangunan. Berdasarkan Renstra tersebut ditetapkanlah Visi yang merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perhubungan melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Adapun Visi Kementerian Perhubungan adalah :

“TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERHUBUNGAN YANG HANDAL, BERDAYA SAING DAN MEMBERIKAN NILAI TAMBAH”

Penjelasan dari Visi ini yaitu :

- 1. Pelayanan Perhubungan yang handal**, yaitu penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 2. Pelayanan Perhubungan yang berdaya saing**, yaitu penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.
- 3. Pelayanan Perhubungan yang memberikan nilai tambah**, yaitu penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi



berkembangnya peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Sedangkan Misi Kementerian Perhubungan adalah :

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mempertahankan Tingkat Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititik beratkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (global warming) sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan. Selain itu, dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi ditengah kondisi keuangan negara yang masih diliputi krisis keuangan global, pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan



kualitas SDM transportasi, membenahan regulasi di bidang keselamatan / keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.

2. Melaksanakan Konsolidasi melalui Restrukturisasi dan Reformasi di Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Melalui restrukturisasi dan reformasi dalam penyelenggaraan transportasi semakin memperjelas peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (regulatory reform) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi. Restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasan global dengan tetap mempertahankan jatid dirinya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa Perhubungan.

Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di



kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah.

4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jasa Perhubungan Yang Handal dan Memberikan Nilai Tambah.

Pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Untuk itu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah harus dapat mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Pernyataan Visi dan Misi Kementerian Perhubungan memberikan arahan bagi daerah (provinsi/kabupaten/kota) didalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Perhubungan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak di Bidang Perhubungan, yaitu :



1. Peran Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam upaya penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), membenahi sistem keselamatan dan keamanan, penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan, peningkatan kualitas SDM transportasi, serta pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan.
2. Pembinaan regulasi dan mengoptimalkan Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi di Kota Pontianak.
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi dengan melakukan penataan moda transportasi Darat dan Sungai, serta jenis dan mekanisme transportasi di Kota Pontianak.
4. Peningkatan kinerja pelayanan berupa Peningkatan dan penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan yang berkualitas dan representatif, yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat sehingga tercipta kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang di Kota Pontianak.

3.3.2. Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Barat

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Barat, maka Visi dari Dinas Perhubungan Propinsi yaitu :



**“ TERWUJUDNYA PELAYANAN JASA TRANSPORTASI,
YANG TERTIB, TERATUR, SELAMAT, AMAN, NYAMAN DAN
HARGA YANG WAJAR ”.**

Adapun Misi dari Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Barat, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana Transportasi, dengan melibatkan pihak lain.
2. Membuka keterisolasian daerah pedalaman dan daerah terpencil.
3. Memberdayakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan jasa Transportasi.
4. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu, kreatif dan produktif.
5. Memperluas penyebaran produk sektor unggulan dan sektor lain di Propinsi Kalimantan Barat.
6. Mewujudkan masyarakat pengguna jasa transportasi yang berdisiplin.

Berdasarkan Pernyataan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Barat, beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak di Bidang Perhubungan, yaitu :

1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi.
2. Meningkatkan Aksesibilitas antar kawasan.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat di Bidang Perhubungan.
4. Meningkatkan SDM di Bidang Perhubungan.



5. Meningkatkan Disiplin dan Kesadaran Masyarakat dalam ber Lalu Lintas.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW).

3.4.1. Telaahan Terhadap RTRW Kota Pontianak

Berdasarkan Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi kota sesuai dengan RTRW Kota Pontianak, yaitu Pembangunan transportasi berperan sebagai urat nadi perekonomian, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan diarahkan untuk lebih meningkatkan sistem transportasi kota yang andal, luas, tertib, teratur, aman, lancar, cepat dan efisien serta mampu mendorong dinamika dan pemerataan pembangunan. Pembangunan jaringan jalan akan sangat mempengaruhi pola penggunaan lahan sehingga jaringan jalan dikembangkan dalam kerangka pengembangan kota. Pengembangan sistem transportasi kota diarahkan untuk membentuk kota yang cenderung konsentris daripada linier dan mendukung penciptaan subpusat-subpusat baru (desentralisasi). Pengembangan sistem transportasi ini juga diarahkan untuk memisahkan secara jelas antara pergerakan regional dan jalur pergerakan lokal serta mempertegas mekanisme peralihan dari pergerakan regional ke pergerakan lokal dan sebaliknya.

Pengembangan dan penerapan sistem transportasi kota dilandasi beberapa konsepsi dasar sebagai berikut:

1. Pembangunan transportasi diarahkan untuk pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan prasarana dan sarana transportasi yang telah ada;



2. Pembangunan jaringan jalan dalam kota diarahkan pada pengembangan sistem jaringan yang berjenjang sehingga tidak terjadi konflik antara perhubungan jalan regional dan jalan lokal;
3. Memperkuat titik simpul semua sistem transportasi yang ada, khususnya untuk arus perhubungan regional yang semakin berkembang pada masa mendatang. Dalam jangka panjang pendek yang dilakukan adalah pemantapan prasarana yang ada dan kemudian pembangunan terminal kota yang permanen dan memenuhi standar.
4. Penetapan jalur regional dan jalur kota dengan lebih integratif lagi, hal ini dilakukan untuk menghindari konflik antar arus perhubungan regional dengan arus perhubungan lokal;
5. Pengembangan sarana transportasi pada tingkat kota adalah untuk meningkatkan akses kepada seluruh penduduk kota secara merata dan mengaktifkan angkutan penumpang umum dalam kota. Sedangkan pengembangan sarana angkutan antar wilayah adalah untuk memperlancar arus barang dan penumpang serta untuk mendukung kegiatan industri yang dikembangkan;
6. Transportasi sungai tetap dikembangkan karena masih cukup efektif untuk mengangkut orang dan barang;

Strategi pengembangan transportasi kota adalah meningkatkan pelayanan transportasi kota melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang memadai dan menjamin keserasian sistem transportasi darat, di samping itu juga menyelaraskan antara jalur pergerakan regional dan lokal. Sebagai pusat pelayanan sosial dan pusat perdagangan skala regional, Kota Pontianak berperan penting dalam melayani transit barang dan penumpang.



Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi kota yang merata, dan nyaman dijabarkan sebagai berikut :

- a. menghubungkan tiga bagian kota yang terpisah oleh Sungai Kapuas dan Landak dengan jalan lingkar dan jembatan penyeberangan;
- b. membangun sistem transportasi yang terpadu ;
- c. mengembangkan sistem jaringan jalan yang hirarkis;
- d. mengembangkan sistem prasarana pejalan kaki;
- e. meningkatkan prasarana transportasi yang ada dan mengembangkan terminal kota yang permanen dan memenuhi standar;
- f. meningkatkan sistem angkutan penumpang umum dalam kota dan mengembangkan sarana angkutan antar wilayah untuk memperlancar arus barang dan penumpang serta mendukung kegiatan industri yang dikembangkan;
- g. mengembangkan efektivitas dan efisiensi sistem transportasi sungai dan penyebrangan;
- h. mengembangkan jaringan jalan yang berhimpit dengan sempadan sungai dan parit-parit besar untuk memudahkan inspeksi dan pemeliharaan sungai dan parit.
- i. Mendukung sistem jaringan perkeretaapian regional dengan merintis dan merencanakan sistem komuter dalam kota.

Rencana pengembangan struktur jaringan transportasi disusun untuk mewujudkan pelayanan aksesibilitas yang merata di seluruh wilayah Kota Pontianak, dan mengarahkan pertumbuhan wilayah dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumberdaya daerah. Rencana Struktur Jaringan Transportasi Kota Pontianak meliputi jaringan jalan dan terminal serta Transportasi sungai dan laut.



Pada dasarnya rencana pengembangan transportasi jalan meliputi (empat) hal yaitu berkaitan dengan fungsi dan hirarki jalan, kapasitas jalan, pengembangan jalan alternatif dan ketersediaan fasilitas parkir. Berkaitan dengan 4 (empat) hal tersebut diatas, maka rencana pengembangan transportasi jalan adalah sebagai berikut :

1. Penataan hirarki jalan untuk mendukung pengaturan perijinan guna lahan.
2. Pelebaran jaringan jalan yang belum memenuhi kriteria penampang jalan berdasarkan fungsi jalan.
3. Meningkatkan kualitas ketahanan fisik jaringan jalan yang tidak sesuai dengan beban angkutan yang melintasi ataupun yang kendala fisik lainnya yang mengakibatkan kerusakan permukaan jalan.
4. Memelihara fungsi jaringan jalan primer dengan membatasi jalan akses lokal dan pengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan jalan.
5. Meningkatkan fungsi jaringan jalan yang sudah ada dan pembangunan jaringan jalan baru untuk peningkatan kapasitas jaringan jalan.
6. Mengembangkan jalan-jalan penghubung yang diprioritaskan, yaitu: dibukanya lintas utara-selatan dan barat-timur.
7. Membangun jalan-jalan baru sebagai jalan alternatif di tengah kota untuk melengkapi hirarki jalan.
8. Mengakomodir jalur sepeda dan pedestrian termasuk keamanan dan kenyamanan penggunaannya dalam perancangan jaringan jalan. Mengakomodir jalur sepeda pada jalan-jalan kolektor Sekunder dan jalan lokal Sekunder dan jalan-jalan alternatif bagi pengguna sepeda (dapat dilihat pada peta jalur Sepeda).



9. Melengkapi rambu dan marka jalan pada seluruh ruas jalan kota dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban lalu lintas.
10. Membatasi lalu lintas angkutan barang yang masuk ke kota.
11. Penetapan disinsentif berupa biaya dampak pembangunan bagi kegiatan-kegiatan yang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum, seperti kemacetan, kebisingan, keselamatan, keindahan, bau, dan gangguan lainnya.
12. Penyediaan lahan dan atau gedung parkir di pusat-pusat Pelayanan Kota.
13. Menghilangkan secara bertahap kegiatan parkir on street pada kawasan-kawasan rawan macet.
14. Rencana pengembangan sistem perparkiran meliputi parkir sisi jalan (on street parking) dan parkir dalam areal khusus parkir (off street parking) .

RENCANA STRUKTUR JARINGAN TRANSPORTASI

Rencana pengembangan struktur jaringan transportasi disusun untuk mewujudkan pelayanan aksesibilitas yang merata di seluruh wilayah Kota Pontianak dan mengarahkan pertumbuhan wilayah dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumberdaya daerah. Rencana Struktur Jaringan Transportasi Kota Pontianak meliputi jaringan jalan dan terminal serta Transportasi sungai dan laut.

- A. Rencana struktur jaringan jalan meliputi rencana pengembangan jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, dan kolektor sekunder dan lokal primer. Jaringan jalan sebagai prasarana transportasi darat yang paling utama untuk ditinjau dalam pengembangan wilayah perkotaan. Rencana pengembangan jaringan jalan didasari oleh



penentuan fungsi hirarki jaringan jalan, baik untuk jalan yang sudah ada maupun jaringan jalan baru yang direncanakan. Klasifikasi fungsi jalan berdasarkan UU No. 38/2004 tentang Jalan dan PP No. 34/2006 tentang Jalan adalah sebagai berikut:

1. Sistem jaringan jalan primer disusun mengikuti rancana tata ruang dan memperhatikan keterhubungan antar kawasan perkotaan yang merupakan pusat-pusat kegiatan sebagai berikut;
 - a) Menghubungkan secara terus menerus PKN (pusat kegiatan nasional), PKW (pusat kegiatan wilayah), PKL (pusat kegiatan lokal) sampai ke PK-Ling (pusat kegiatan lingkungan),
 - b) Menghubungkan antar-PKN.
2. Kawasan yang mempunyai fungsi primer adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan, baik untuk kawasan perkotaan maupun untuk wilayah di luarnya.
3. Kawasan yang mempunyai fungsi sekunder adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan hanya dalam wilayah kawasan perkotaan yang bersangkutan.
4. Kawasan fungsi sekunder kesatu adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan seluruh wilayah kawasan perkotaan yang bersangkutan.
5. Kawasan fungsi sekunder kedua adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan yang merupakan bagian dari pelayanan kawasan fungsi sekunder kesatu.
6. Kawasan fungsi sekunder ketiga adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan yang merupakan bagian dari pelayanan.



B. Rencana Pengembangan Angkutan Umum dan Terminal Kota Untuk menjamin pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kebutuhan angkutan dibutuhkan fasilitas jaringan angkutan yang saling menghubungkan antara wilayah kota, pemukiman, daerah komersil dan rekreasi. Sasaran umum kebijakan pemerintahan di dalam lalu lintas dan angkutan umum adalah untuk menciptakan suatu sistem transportasi sehingga mobilitas orang dan barang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan sosial, perniagaan dan rekreasi.

Rencana pengembangan sistem angkutan umum Kota Pontianak dilakukan dengan berbagai pertimbangan beberapa aspek sebagai berikut :

Struktur jaringan jalan perkotaan

- ❖ Kebutuhan pelayanan guna lahan yang didasari dengan rencana penggunaan lahan perkotaan.
- ❖ Pola pengaturan lalu lintas yang efisien yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang fisik kota.
- ❖ Tingkat aksesibilitas antar komponen pembentuk ruang kota .

Rencana pengaturan lalu lintas jalan raya dimaksudkan agar lalu lintas tersebut tidak mengganggu mekanisme kegiatan kehidupan dalam kota, sedangkan angkutan kota diusahakan pengaturannya agar dapat melayani kebutuhan aktivitas penduduk kota. Sedangkan untuk angkutan barang, kendaraan yang dapat digunakan adalah truk ukuran menengah dengan bobot maksimum 8 ton. Untuk jenis angkutan penumpang umum regional biasanya memerlukan waktu perjalanan yang relatif lama, maka



kendaraan yang dapat digunakan adalah yang memiliki ukuran besar seperti mini bus dengan kapasitas 16-25 penumpang.

Pengembangan angkutan umum yang direncanakan berkaitan dengan pengembangan jenis armada angkutan umum dan penataan lintasan pelayanannya, penyediaan angkutan umum massal, penataan ulang sistem terminal dan pelayanan angkutan paratransit. Adapun arahan pengembangan angkutan umum ini adalah sebagai berikut :

1. Penataan rute angkutan umum dalam rangka meningkatkan distribusi pelayanan serta efisiensi penggunaan jalan.
2. Pemisahan antara moda angkutan dalam kota dan luar kota.
3. Pengembangan sistem angkutan umum massal yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar, yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal dan berfrekuensi tinggi pada koridor-koridor utama (jalur primer). Dalam hal ini angkot diarahkan sebagai angkutan pengumpan (feeder) untuk moda angkutan dengan hirarki yang lebih tinggi (mini bus) dan diteruskan kepada jalur jalur primer (bis kota) yang dilayani oleh angkutan umum massal.
4. Pengembangan terminal untuk melayani pergerakan regional.
5. Pengembangan terminal Tipe C dengan pengaturan kembali terminal untuk pergerakan lokal yang sudah ada.
6. Pengembangan terminal angkutan barang terpadu yang dilengkapi dengan pergudangan, perkantoran, pool kendaraan dan terpadu dengan angkutan lanjutannya yaitu kereta api maupun angkutan laut dan sungai.



7. Pemisahan pergerakan lokal dan regional dengan cara penempatan terminal-terminal regional yang tidak mengganggu arus pergerakan lokal.

Terminal angkutan kota (terminal Tipe C) diarahkan pembangunannya menyebar lebih di pinggiran-pinggiran kota, sedangkan terminal yang saat ini berada di pusat kota hanya berfungsi sebagai selter atau pemberhentian sementara. Pertimbangan utama penempatan terminal ini untuk lebih didasarkan pada konsep pelayanan rute angkutan kota. Pengembangan terminal di wilayah Kota Pontianak di masa mendatang diarahkan untuk beberapa kategori terminal, sebagai berikut:

1. Terminal Tipe C sebagai berikut (Berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor : 527/DISHUBKOMINFO/Tahun 2016, tentang Penetapan Terminal Tipe C Kota Pontianak) :
 - a. Terminal Batu Layang di Kecamatan Pontianak Utara.
 - b. Terminal Nipah Kuning di Kecamatan Pontianak Barat.
 - c. Terminal Pal Lima di Kecamatan Pontianak Barat.
 - d. Terminal Pasar Dahlia di Kecamatan Pontianak Barat.
 - e. Terminal Siantan di Kecamatan Pontianak Utara.
 - f. Terminal Pasar Cempaka di Kecamatan Pontianak Kota.
2. Didukung dengan beberapa Shelter (tempat pergantian moda) angkutan umum kota yang tersebar di pusat dan sub pusat pelayanan kota.

Dengan distribusi terminal tersebut di atas diharapkan dapat mengakibatkan berkembangnya pelayanan angkutan umum kota



direncanakan akan berpengaruh besar terhadap perkembangan kawasan sekitarnya, karena terminal yang ada direncanakan untuk mengurangi intensitas pengguna jalan yang menggunakan kendaraan pribadi.

Sistem Transportasi Regional Kota Pontianak yang di dukung dengan adanya terminal Internasional yang mana menurut SK. 448/AJ.106/DRDJ/2002 Tentang Penetapan lokasi Terminal Penumpang Tipe A Lintas Batas Negara di Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sei Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi terminal tepatnya berada di ruas jalan Pontianak - Sei Ambawang - Tayan (jalan lingkaran Timur). Dengan adanya terminal internasional tersebut arus transportasi dalam hal ini angkutan perkotaan dan transportasi kota sebagai satu kesatuan kawasan Metropolitan Pontianak juga akan mengarah ke wilayah tersebut.

- C. Rencana Sistem Transportasi Sungai Wilayah di Kalimantan Barat tidak semua dapat terjangkau dengan transportasi darat dengan mudah. Keberadaan Sungai-sungai yang ada menjadi salah satu jenis akses yang sejak dahulu telah dipergunakan sebagai salah satu alur transportasi sungai. Selama lebih kurang puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun transportasi Sungai di Kalimantan Barat menjadi satu jenis model transportasi yang berperan penting dalam mendukung perkembangan wilayah-wilayah di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas dan Sistem Aliran Sungai lainnya berkembang sebagai jalur angkutan dan perdagangan. Selain itu juga angkutan penyeberangan berperan cukup penting dalam perkembangan arus transportasi antara dua bagian kota yang dipisahkan oleh sungai besar.



Dermaga atau terminal dalam sistem transportasi dikelompokkan dalam permintaan turunan (derivatif demand), artinya bahwa sebuah pergerakan dengan moda kendaraan tidak mempunyai tujuan utama ke terminal. Fasilitas tersebut hanya sebagai transit saja dan kemudian melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Faktor kemudahan perpindahan moda transportasi menjadi salah satu aspek utama dalam fasilitas ini, sehingga prinsip mudah, murah, aman, nyaman dan cepat dalam transportasi terpenuhi.

Keberadaan dermaga dan pelabuhan di Kota Pontianak yang terletak pada alur Sungai Kapuas yang menguntungkan bagi kelancaran arus barang dan pemasukan pendapatan Kota Pontianak, ternyata menimbulkan beberapa permasalahan yang relatif besar dalam penataan ruang Kota Pontianak. Adapun masalah yang dihadapi antara lain:

1. Angkutan Barang dari dan Ke Pelabuhan menimbulkan Hambatan dan kerusakan jalan.
2. Belum tersedianya terminal bongkat Muat peti kemas dan angkutan berat dari pelabuhan.
3. Kedalaman Alur sungai yang perlu penanganan ekstra.

Rencana Sistem Transportasi Sungai meliputi jaringan sungai, danau dan penyeberangan. Adapun yang menjadi alur pelayaran sungai adalah Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Dalam sistem transportasi Sungai terdapat dua lokasi dermaga dengan intensitas yang cukup tinggi di antaranya dermaga penyeberangan di Alun-alun Kapuas dan Dermaga Sheng Hie, gambaran jelasnya diuraikan sebagai berikut:



1. Dermaga penyeberangan Bardan-Siantan merupakan sarana penyeberangan yang menghubungkan dua bagian wilayah kota antara bagian Selatan (di Bagian Alun-alun Kapuas/Bardan) dan Bagian Utara di Pasar Siantan, sejalan dengan rencana pengembangan jembatan di lokasi penyeberangan ini, maka kegiatan penyeberangan akan dialihkan ke wilayah kabupaten Kubu Raya dan atau kabupaten Pontianak.
2. Dermaga Sheng Hie berfungsi sebagai pelabuhan Pengumpan yang melayani Kota Pontianak dan wilayah kabupaten lainnya di provinsi Kalimantan Barat. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. Dermaga ini merupakan tempat bongkar-muat orang dan barang untuk Transportasi Sungai dan Laut antara Pontianak-Ketapang, Pontianak-Sukadana dan Pontianak- Teluk Melano.

Sejauh ini manajemen transportasi sungai diselenggarakan oleh Perum ASDP sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang berusaha dalam bidang jasa ASDP, penyediaan dan pengusahaan jasa terminal, dermaga dan fasilitas lainnya untuk kegiatan tambat kapal, naik turun penumpang dan kendaraan seta bongkar muat barang, penyediaan dan pengusahaan kolam-kolam pelabuhan, perairan untuk menunjang kelancaran lalu lintas dan berlabuhnya kapal-kapal penyeberangan,



penyediaan tenaga listrik, air bersih, BBM dan instalasi limbah serta jasa konsultan, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan jasa angkutan.

Dalam Pengembangan transportasi sungai di Kota Pontianak diarahkan dengan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Pelayanan ulang alik dengan frekuensi tinggi, terjadwal dengan Headway konstan dan tepat waktu bagi penumpang atau barang sangat dituntut oleh pemakai yang diharapkan efisiensi transport.
2. Pelayaran yang aman dan nyaman, dimana aman dituntut pada semua jarak pelayaran, sedang nyaman dituntut terutama pada pelayaran yang memerlukan waktu tempuh yang lama.
3. Tarif yang murah.
4. Akseptabilitas ke Terminal Angkutan Penyeberangan dimana lokasi terminal diharapkan tidak terlalu jauh dari pusat lalu lintas sehingga waktu dapat dipersingkat.

Berdasarkan telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah Kota Pontianak, beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak, yaitu :

1. Dalam upaya pembangunan bidang Perhubungan harus dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi dengan melakukan penataan moda transportasi Darat dan Sungai, serta jenis dan mekanisme transportasi yang sesuai.



2. Sistem jaringan Transportasi memperhatikan rencana jaringan jalan yang disusun mengikuti rencana tata ruang dan memperhatikan keterhubungan antar kawasan perkotaan yang merupakan pusat-pusat kegiatan serta kawasan-kawasan permukiman.
3. Pembangunan Bidang Perhubungan menitikberatkan pada Peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi, rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana serta pembangunan infrastruktur transportasi.
4. Berupaya meningkatkan penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau.
5. Melakukan penataan dan pemanfaatan transportasi sungai sebagai alternatif peningkatan aksesibilitas masyarakat yang menghubungkan arus transportasi antara dua bagian kota yang dipisahkan oleh sungai besar.
6. Melakukan penataan terminal dan meningkatkan manajemen pengelolaan terminal yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan, kelancaran dan ketertiban bagi pengguna jasa terminal.
7. Penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif



3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kota Pontianak di masa datang. Analisis isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi, serta mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Dari isu-isu strategis ini, dianalisa dan dituangkan dalam analisa SWOT dimana isu-isu strategis yang merupakan faktor eksternal dijabarkan kedalam Peluang dan Tantangan (sebagaimana telah dituangkan pada Bab II sebelumnya), sedangkan faktor internal akan dituangkan sebagai Kekuatan dan Kelemahan (yang akan dituangkan berikut ini).

Adapun Kekuatan dan Kelemahan yang merupakan faktor internal yang ada dan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak adalah :

3.5.1. Kekuatan Dinas Perhubungan.

1. Adanya tujuan dan sasaran dinas yang jelas sebagai arah dan tujuan Dinas.
2. Sarana dan Prasarana kerja (fasilitas kerja) yang cukup memadai.
3. Adanya Kode Etik Pegawai Dinas Perhubungan yang menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk menciptakan Budaya Kerja yang baik.
4. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas.
5. Adanya SOP dan SP, sebagai acuan pelaksanaan tugas.



3.5.2. Kelemahan Dinas Perhubungan.

1. Belum Optimalnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan prima dibidang perhubungan (Kualitas dan Kuantitas SDM).
2. Belum tersedianya database yang memadai serta terbatasnya bahan kebijakan teknis bidang transportasi, khususnya yang berkaitan dengan rencana sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Kurang Optimalnya Koordinasi, baik internal maupun eksternal (antar instansi terkait).
4. Kurang Optimalnya Anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan bidang Perhubungan.
5. Kurang optimalnya Sarana dan Prasarana transportasi serta kurangnya penyesuaian terhadap kemajuan teknologi, sehingga fasilitas peralatan khususnya peralatan pengujian kendaraan bermotor perlu ada peningkatan dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi yang ada.

Dari faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) serta faktor internal (kekuatan dan kelemahan), dilakukan analisa melalui SWOT Matric sebagai berikut :



Tabel SWOT Matric

	STRENGTHH (KEKUATAN)	WEAKNESS (KELEMAHAN)
		1. Tujuan, Sasaran Dinas yang Jelas. 2. Sarana & Prasarana Kerja cukup memadai. 3. Kode Etik Pegawai (Komitmen dan Budaya Kerja yang Baik). 4. Struktur Organisasi dan Tupoksi. 5. SOP & SP, acuan pelaksanaan tugas.
OPPORTUNITY (PELUANG)	S - O	W - O
1. Undang-Undang No. 32 Th 2004.	1. Implementasikan Tujuan, Sasaran Ke Bidang, UPTD.	1. Lakukan pengembangan SDM.
2. Potensi Retribusi yg blm tergali.	2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi PAD.	2. Usulkan penambahan pegawai Yang sesuai kebutuhan.
3. Dukungan Instansi terkait.	3. Berdayakan sarana prasarana Kerja yang ada.	3. Mengoptimalkan sarana dan Prasarana transportasi.
4. Berkembangnya Teknologi dan informasi.	4. Berdayakan kode etik pegawai.	4. Meningkatkan ketersediaan data.
5. Perubahan Paradigma Kewenangan (UU No. 22 th 2009).	5. Berdayakan struktur organisasi.	5. Usulkan Rasionalisasi Anggaran.
	6. Berdayakan SOP dan SP yang ada.	6. Penyesuaian/peningkatan Peralatan sesuai teknologi.
	7. Berdayakan Undang-Undang/ Kewenangan yang ada.	7. Intensifkan koordinasi internal dan antara instansi terkait.
THREAT(HAMBATAN/ANCAMAN)	S - T	W - T
1. Kemacetan Lalu Lintas.	1. Kembangkan & tingkatkan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	1. Optimalkan jumlah Personil yang Ada.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat	2. Dan sistem transportasi yang ada. Serta Lakukan Survey LHR.	2. Berdayakan pegawai yang Mempunyai keahlian/kemampuan Sesuai spesialisasi yang ada.
3. Pertumbuhan jasa usaha dan Perdagangan (kesemrautan perparkiran).	2. Intensifkan Sosialisasi, diseminasi, Pembinaan & Penegakan hukum.	3. Optimalkan penggunaan teknologi Yang ada.
4. Pesatnya Perkembangan kawasan Permukiman & perdagangan, serta Angkutan umum yg berkurang.	3. Meningkatkan Manajemen dan Penataan/pengembangan Perparkiran.	4. Optimalkan pemanfaatan anggaran yang ada
5. Pesatnya perkembangan Teknologi (ketidaksesuaian SDM dan Peralatan).	4. Penataan kembali trayek yang diintegrasikan inter & antar moda Transportasi sesuai RTRW serta studi penataan & pengembangan angkutan Umum/massa.	5. Manfaatkan sarana dan prasarana Transportasi yg ada.
	5. Kembangkan dan tingkatkan Kemampuan SDM dan teknologi Peralatan yang ada.	



Urgensi Faktor terhadap Misi :

NU : Nilai Urgensi

BF : Bobot Faktor

Analisa kuantitatif SWOT – Strengths (Kekuatan)

No	Strengths (Kekuatan)	NU	BF	NU x BF
1.	Tujuan dan Sasaran Dinas yang Jelas.	5	35	175
2.	Sarana & Prasarana Kerja cukup memadai.	2	15	30
3.	Kode Etik Pegawai (Komitmen dan Budaya Kerja Baik).	1	15	15
4.	Struktur Organisasi dan Tupoksi.	4	20	80
5.	SOP dan SP, acuan pelaksanaan tugas.	3	20	60
	Jumlah		100	360

Analisa kuantitatif SWOT – Weaknesses (Kelemahan)

No	Weaknesses (Kelemahan)	NU	BF	NU x BF
1.	Rendahnya Kapasitas SDM.	5	30	150
2.	Lemahnya data base dan bahan Kebijakan Teknis terbatas.	1	15	15
3.	Lemahnya koordinasi.	2	15	30
4.	Alokasi Anggaran terbatas.	3	20	60
5.	Sarana Prasarana transportasi kurang optimal.	4	20	80
	Jumlah		100	335

Analisa kuantitatif SWOT – Opportunities (Peluang)

No	Opportunities (Peluang)	NU	BF	NU x BF
1.	Undang-Undang No. 32 Th 2004.	2	15	30
2.	Potensi Retribusi yg blm tergali.	4	20	80
3.	Dukungan Instansi terkait.	3	15	45
4.	Berkembangnya Teknologi dan Media informasi.	1	10	10
5.	Perubahan Paradigma Kewenangan (UU No. 22 th 2009).	5	40	200
	Jumlah		100	365



Analisa kuantitatif SWOT – Threats (Ancaman/Hambatan)

No	Threats (Ancaman/Hambatan)	NU	BF	NU x BF
1.	Kemacetan Lalu Lintas.	3	20	60
2.	Rendahnya kesadaran masyarakat.	5	30	150
3.	Pertumbuhan jasa usaha dan Perdagangan (kesemrautan parkir)	4	25	100
4.	Perkembangan kawasan permukiman & perdagangan, serta angkutan umum yang berkurang.	2	15	30
5.	Pesatnya perkembangan Teknologi (ketidaksesuaian SDM dan Peralatan).	1	10	10
Jumlah			100	350

Adapun hasil dari analisis tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

No.	URAIAN	FORMULA	HASIL	JUMLAH
1.	Strategi SO	Hasil Tabel S + O	360 + 365	725
2.	Strategi WO	Hasil Tabel W + O	335 + 365	700
3.	Strategi ST	Hasil Tabel S + T	360 + 350	710
4.	Strategi WT	Hasil Tabel W + T	335 + 350	685

Dari penilaian tersebut dapat dilihat bahwa Strategi SO merupakan faktor yang dominan dalam pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Pontianak dengan nilai 725 yang berarti menggunakan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang. Faktor lain yang mendukung yaitu Strategi ST dengan nilai 710, yang berarti Dinas Perhubungan harus dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menghindari atau mengatasi ancaman. Dasar analisa sederhana ini akan dituangkan kedalam penetapan Misi, Sasaran, Kebijakan dan Program serta kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Berdasarkan Visi dan Misi Walikota serta telaahan terhadap Visi, Misi Kementerian Perhubungan, Visi Misi Dinas Perhubungan Propinsi Kalbar dan Telaahaan terhadap RTRW Kota Pontianak sebagaimana dituangkan pada Bab III, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk periode tahun 2020-2024.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini :

4.1.1. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Pontianak

Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dari Visi, Misi Walikota serta telaahan terhadap arah dan kebijakan yang ingin dicapai oleh kementerian dan Dinas Perhubungan Propinsi yang dirumuskan dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai dan menghasilkan apa, dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan Dinas Perhubungan Kota Pontianak merupakan permasalahan pokok bidang perhubungan yang ada di Kota Pontianak yang dirumuskan dan menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan bidang perhubungan dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota. Jadi berdasarkan Permasalahan yang dan dan dipadukan dengan telaahan terhadap Visi dan Misi Walikota serta telaahan terhadap Renstra Kementerian, Dinas



Perhubungan Propinsi dan telaahan terhadap RTRW Kota Pontianak, dapat dirangkum bahwa permasalahan pokok yang ada yang harus ditangani dan menjadi fokus untuk periode 5 tahun kedepan (2020-2014), dalam mencapai Misi ke 2 Walikota Pontianak yaitu “*Menciptakan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Representatif*” adalah bagaimana Dinas Perhubungan Kota Pontianak berupaya memberikan pelayanan berupa Peningkatan dan penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan yang berkualitas dan representatif, serta meningkatkan Kualitas Transportasi di Kota Pontianak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan tujuan khusus Bidang Perhubungan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020–2024 berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Pontianak adalah :

“Meningkatkan Kualitas Transportasi di Kota Pontianak”

Dengan dirumuskannya tujuan Dinas Perhubungan Kota Pontianak, diharapkan akan dapat mendukung pencapaian dari Misi ke 2 Walikota Pontianak dalam menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif.

4.1.2. Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak

Sasaran Strategis adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran strategis merupakan arah atau fokus masalah yang akan dibenahi



dari masalah pokok yang dirumuskan dalam tujuan yang akan dicapai pada periode 5 tahun.

Sasaran Strategis Dinas Perhubungan adalah sasaran dibidang perhubungan (transportasi darat dan sungai) yang dituangkan di dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020–2024. Adapun Sasaran Strategis Dinas Perhubungan dalam upaya pencapaian tujuan “*Meningkatkan Kualitas Transportasi Di Kota Pontianak*”, yaitu :

- 1) Meningkatnya Cakupan Penerangan Jalan Umum di Kota Pontianak.
- 2) Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi di Kota Pontianak.
- 3) Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai dan Penyeberangan di Kota Pontianak.

Secara ringkas Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel T-C. 25. berikut ini :



Tabel T-C. 25.

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Kualitas Transportasi di Kota Pontianak.	1.1. Meningkatnya Cakupan Penerangan Jalan Umum di Kota Pontianak.	1.1.1. Indek Penerangan Jalan Umum <i>Formulasi :</i> (Persentase cakupan Penerangan Jalan Umum + Persentase Cakupan Jalan Lingkungan) : 2	91,09	92,74	94,39	96,03	97,68
		1.2. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi di Kota Pontianak.	1.2.1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Transportasi. <i>Formulasi :</i> (Jumlah persentase ketersediaan fasilitas transportasi yang baik)	78,59	80,53	83,33	85,27	87,20
		1.3. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai dan Penyeberangan.	2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan (Kelancaran Lalu Lintas) Kota Pontianak. <i>Formulasi :</i> (Volume / Capacity Ratio)	B 0,32	B 0,28	B 0,24	A 0,20	A 0,18

**BAB****V****STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. **Strategi** adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran dalam pencapaian Visi dan Misi Walikota. Adapun Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak juga akan ditempuh dengan menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang di tetapkan oleh pihak yang berwenang untuk di jadikan pedoman bagi setiap organisasi, agar adanya keterpaduan dan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Adapun Strategi dan Kebijakan yang di tetapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024, sebagaimana berikut:

5.1.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pontianak

Berdasarkan tujuan Dinas Perhubungan tahun 2020-2024 yang akan dicapai dengan penetapan sasaran yang dituangkan melalui strategi dan kebijakan. Adapun Strategi dan Kebijakan yang diterapkan dalam pencapaian sasaran dan tujuan, sebagaimana berikut ini :



1. Sasaran 1 : Meningkatnya Cakupan Penerangan Jalan Umum di Kota Pontianak.

Upaya pencapaian Sasaran ini dilakukan melalui 1 Strategi, yaitu “*Meningkatkan Pembangunan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum*”, yang ditempuh dengan Kebijakan :

- a. Melakukan Pemeliharaan, Peningkatan dan Pengembangan Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan.
- b. Peningkatan pengawasan dan pemantauan serta pemasangan Meterisasi PJU.
- c. Peningkatan dan pengadaan sarana prasarana pendukung Operasional PJU.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi.

Upaya pencapaian Sasaran ini dilakukan melalui 4 Strategi, yaitu :

- a. **Strategi 2** : Pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
- b. **Strategi 3** : Meningkatkan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
- c. **Strategi 4** : Meningkatkan fungsi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- d. **Strategi 5** : Meningkatkan Prasarana dan Sarana ASDP.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi 2 sampai dengan stretegi 5, yaitu :

- a. Melakukan pengadaan fasilitas APILL .
- b. Melakukan pembuatan Zebra Cross, Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Marka Jalan dan Marka Parkir.



- c. Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.
- d. Pengadaan dan pengembangan CCTV/ATCS.
- e. Pengadaan dan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan lainnya.
- f. Meningkatkan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
- g. Melakukan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas.
- h. Pemeliharaan dan peningkatan CCTV/ATCS.
- i. Peningkatan Traffic Light.
- j. Peningkatan fungsi melalui optimalisasi operasional peralatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Dermaga dan Pelabuhan.
- k. Pembangunan pelabuhan dan dermaga Kota Pontianak.
- l. Peningkatan sarana pendukung fasilitas dermaga dan pelabuhan serta pengawasan.
- m. Pengadaan CCTV dan perangkatnya untuk kawasan tepian sungai.
- n. Penyusunan master plan rencana detail penataan dan pengembangan dermaga dan pelabuhan Kota Pontianak.

3. **Sasaran 3** : Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai dan Penyeberangan Kota Pontianak.

Upaya pencapaian Sasaran ini dilakukan melalui 3 Strategi, yaitu :

- a. **Strategi 6** : Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ.
- b. **Strategi 7** : Peningkatan Pelayanan ASDP.
- c. **Strategi 8** : Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor



Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan Strategi 6 sampai dengan Strategi 8 ini, yaitu :

- a. Melakukan pengawasan dan patroli serta penjagaan lalu lintas, parkir dan terminal.
- b. Penyusunan rencana dan masterplan transportasi kota pontianak serta pendataan lalu lintas.
- c. Meningkatkan koordinasi antar instansi teknis dan pihak terkait dalam mengatasi permasalahan lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.
- d. Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan penertiban Dermaga dan Pelabuhan serta Angkutan sungai.
- e. Meningkatkan pelayanan angkutan sungai dan penyeberangan.
- f. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan Angkutan umum dan barang.
- g. Meningkatkan Sarana peralatan pengujian kendaraan bermotor.
- h. Meningkatkan fasilitas prasarana pengujian kendaraan bermotor.
- i. Meningkatkan kualitas pelayanan.

Dari 8 strategi dengan beberapa arah kebijakan yang dituangkan di atas, akan menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam menetapkan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa periode 2020-2024, sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota tahun 2020-2024.

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024, secara ringkas dapat dilihat pada Tabel T-C.26. berikut ini :



Tabel T-C. 26.

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024 DALAM PENCAPAIAN MISI 2 PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

VISI PEMERINTAH KOTA : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat.

Misi II PEMERINTAH KOTA : Menciptakan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Representatif.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1. Meningkatkan Kualitas Transportasi di Kota Pontianak	1.1. Meningkatnya Cakupan Penerangan Jalan Umum di Kota Pontianak.	1.1.1. Meningkatkan Pembangunan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	1.1.1.1. Melakukan Pemeliharaan, Peningkatan dan Pengembangan Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan 1.1.1.2. Peningkatan pengawasan dan pemantauan serta pemasangan Meterisasi PJU 1.1.1.3. Peningkatan dan pengadaan sarana prasarana pendukung Operasional PJU	
		1.2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi di Kota Pontianak.	1.2.1. Pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1.2.1.1. Melakukan pengadaan fasilitas APILL 1.2.1.2. Melakukan pembuatan Zebra Cross , Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Marka Jalan dan Marka Parkir 1.2.1.3. Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas 1.2.1.4. pengadaan dan pengembangan CCTV/ATCS 1.2.1.5. Pengadaan dan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan lainnya.
			1.2.2. Meningkatkan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1.2.2.1. Meningkatkan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1.2.2.2. Melakukan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas 1.2.2.3. Pemeliharaan dan peningkatan CCTV/ATCS 1.2.2.4. Peningkatan Traffic Light
	1.2.3. Meningkatkan fungsi Prasarana Dermaga Sungai Danau dan Penyeberangan		1.2.3.1. Peningkatan fungsi melalui optimalisasi operasional peralatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Dermaga dan Pelabuhan	
	1.2.4. Meningkatkan Prasarana dan Sarana ASDP		1.2.4.1. Pembangunan pelabuhan dan dermaga Kota Pontianak 1.2.4.2. peningkatan sarana pendukung fasilitas dermaga dan pelabuhan serta pengawasan 1.2.4.3. pengadaan CCTV dan perangkatnya untuk kawasan tepian sungai 1.2.4.4. Penyusunan master plan rencana detail penataan dan pengembangan dermaga dan pelabuhan Kota Pontianak	
	1.3. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai dan Penyeberangan Kota Pontianak.	2.1.1. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ	2.1.1.1. Melakukan pengawasan dan patroli serta penjagaan lalu lintas, parkir dan terminal 2.1.1.2. penyusunan rencana dan masterplan transportasi kota pontianak serta pendataan lalu lintas 2.1.1.3. meningkatkan koordinasi antar instansi teknis dan pihak terkait dalam mengatasi permasalahan lalu lintas dan rekayasa lalu lintas	
			2.1.2. Peningkatan Pelayanan ASDP	2.1.2.1. Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan penertiban Dermaga dan Pelabuhan serta Angkutan sungai 2.1.2.2. Meningkatkan pelayanan angkutan sungai dan penyeberangan
		2.1.3. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	2.1.3.1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan Angkutan umum dan barang 2.1.3.2. Meningkatkan Sarana peralatan pengujian kendaraan bermotor 2.1.3.3. Meningkatkan fasilitas prasarana pengujian kendaraan bermotor 2.1.3.4. Meningkatkan kualitas pelayanan	



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1. PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM 2020-2024

Program Dinas Perhubungan merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan yaitu dari Tahun 2020-2024 dalam upaya pencapaian Sasaran dan Tujuan yang ditetapkan. Program-program pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 sebanyak 15 Program, yang terdiri dari 7 (tujuh) Program Rutin Administrasi Perkantoran dan 8 (delapan) Program Pokok Pembangunan (Program Strategis).

Adapun Program-program tersebut sebagaimana berikut :

Program Rutin Administrasi Perkantoran :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Sasaran Program "Terselenggaranya Administrasi Perkantoran".
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor.
Sasaran Program "Terpenuhinya Fasilitas/Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor yang memadai".
3. Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur.
Sasaran Program "Meningkatnya Disiplin Aparatur".
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Sasaran Program "Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur".



5. Program Peningkatan Pelayanan Prima.
Sasaran Program “Meningkatnya Kualitas Pelayanan”.
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.
Sasaran Program “Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja dan Capaian Kinerja”.
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan.
Sasaran Program “Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan”.

Program Pokok Pembangunan :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
Sasaran Program “Meningkatnya Fasilitas Pendukung dan Perlengkapan Lalu Lintas Angkutan Jalan”.
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
Sasaran Program “Terpeliharanya Fasilitas Pendukung dan Perlengkapan Lalu Lintas Angkutan Jalan”.
3. Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan.
Sasaran Program “Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas Pendukung Dermaga Sungai Danau dan Penyeberangan”.
4. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP).
Sasaran Program “Meningkatnya Fasilitas Pendukung Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan”.



5. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.
Sasaran Program “Meningkatnya Cakupan Fasilitas Penerangan Pada Jalan Umum dan Jalan Lingkungan di Kota Pontianak”.
6. Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ.
Sasaran Program “Meningkatnya Ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas”.
7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP).
Sasaran Program “Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan”.
8. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
Sasaran Program “Meningkatnya Kelaikan Angkutan Umum dan Barang”.

6.2. KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan berdasarkan 7 (tujuh) Program Rutin Administrasi Perkantoran dan 8 (delapan) Program Pokok Pembangunan tersebut di atas, maka rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak dari Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

6.2.1. Program Rutin Administrasi Perkantoran (Kesekretariatan)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program “Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi



Perkantoran". Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

Indikator Kegiatan (Output) "Tersedianya Rekening Telepon, Listrik, Ledeng dan Internet".

- b. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Indikator Kegiatan (Output) "Tersedianya Alat Tulis Kantor".

- c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Indikator Kegiatan (Output) "Tersedianya Blangko, Karcis Retribusi dan Penggandaan".

- d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Indikator Kegiatan (Output) "Terlaksananya Perbaikan dan Penggantian Komponen Instalasi Listrik dan Lampu Penerangan".

- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Indikator Kegiatan (Output) "Tersedianya Bahan Bacaan".

- f. Penyediaan Makanan dan Minuman.

Indikator Kegiatan (Output) "Tersedianya Makan Minum Harian Pegawai, Rapat, Tamu dan Lembur".

- g. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

Indikator Kegiatan (Output) "Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah".

- h. Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran.

Indikator Kegiatan (Output) "Tersedianya Honorarium Operator dan Biaya Lembur".



- i. Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah.
Indikator Kegiatan (Output) “Tersedianya Biaya Perjalanan Dalam Daerah”.
- j. Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Keuangan.
Indikator Kegiatan (Output) “Tersedianya Honor Pengelola Keuangan”.
- k. Penyediaan Jasa Kebersihan, Supir dan Pengamanan Kantor.
Indikator Kegiatan (Output) “Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Supir dan Pengamanan Kantor”.
- l. Sosialisasi Penyelenggaraan Pembangunan di Kota Pontianak.
Indikator Kegiatan (Output) “Tersedianya Biaya Penyelenggaraan Sosialisasi, Pembinaan dan Pameran Informasi Pembangunan”.
- m. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Indikator Kegiatan (Output) “Tersedianya Biaya Jasa Surat Menyurat”.

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor.

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program “Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor”. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut :

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Jenis Prasarana Kantor yg dilakukan pemeliharaan”.



- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan pemeliharaan”.
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan”.
- d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Jenis Sarana/Peralatan Kantor yang di beli”.
- e. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2.
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan Roda 2 yang dibeli”.
- f. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4.
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan Roda 4 yang dibeli”.

3. Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur.

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program “Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur”. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Jenis Pakaian dan Kelengkapan yang disediakan”.



4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program “*Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*”. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang difasilitasi”.

5. Program Peningkatan Pelayanan Prima.

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program “*Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan*”. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut :

- a. Survey Kepuasan Masyarakat dan Penyusunan Dokumen IKM.

Indikator Kegiatan (Output) “Kriteria Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Persemester”.

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program “*Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Laporan Capaian Kinerja yang berkualitas*”. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut :



a. Penyusunan Rencana Kerja.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Dokumen Rencana Kerja Yang Tersedia”.

b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Yang Tersedia”.

c. Penyusunan Dokumen Kelengkapan TU Aparatur Sekretariat.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Dokumen Kelengkapan TU Aparatur Sekretariat yang dihasilkan”.

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan.

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program “Tersedianya Laporan Keuangan yang tertip dan Akuntabel”. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut :

a. Penyusunan Laporan Keuangan.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dibuat”.



6.2.2. Program Pokok Pembangunan (Program Strategis)

1. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana LLAJ.

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program “Persentase Tersedianya Kebutuhan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas Yang Baik”. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut :

- a. Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu) yang Tersedia”.

- b. Pengecatan Marka Jalan.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan (Marka) yang Tersedia”.

- c. Pengadaan Papan Informasi Elektronik.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Papan Informasi Elektronik Yang Terpasang”.

- d. Pengecatan Zebra Cross.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Lokasi Zebra Cross Yang Dibuat”.

- e. Pembangunan Sistem Tombol Penyeberangan Pejalan Kaki (Pelican Crossing).

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Pelican Cross yang dipasang/dibangun”.

- f. Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Lokasi/Simpang Yang dipasang Traffic Light”.

- g. Pengadaan, Peningkatan dan Pengembangan ATCS/CCTV.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Unit Fasilitas ATCS/CCTV yang tersedia”.



- h. Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS).

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Lokasi/Fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang Tersedia”.

- i. Pembuatan Marka Parkir.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Lokasi/kawasan Parkir yang dilakukan Penataan/Pengecatan”.

2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program “*Persentase APILL dan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas Terpelihara Dalam Kondisi Baik*”. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut :

- a. Pemeliharaan Rutin Traffic Light dan Countdown Light.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah traffic light dan Countdown Light dalam kondisi baik”.

- b. Pemeliharaan Rutin Warning/Flashing Light.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah warning/flashing light dalam kondisi baik”.

- c. Pemeliharaan Rutin Rambu-Rambu Lalu Lintas.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dilakukan pemeliharaan”.

- d. Rehabilitasi Jaringan Fiber Optic dan Pemeliharaan CCTV/ATCS.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Titik Fasilitas CCTV/ATCS yang dilakukan rehabilitasi/perbaikan Jaringan dan Pemeliharaan”.



e. Pemeliharaan Radio Komunikasi.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Radio Komunikasi dalam kondisi baik”.

f. Pemeliharaan Papan Informasi Elektronik.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Papan Informasi Elektronik dalam kondisi baik”.

g. Peningkatan Traffic Light.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Traffic Light yang dilakukan Peningkatan”.

h. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Halte Yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan”.

3. Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program “Persentase Berfungsinya Dermaga Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan”. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut :

a. Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Pelabuhan Penyeberangan Bardan-Siantan.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Peralatan Pelabuhan Penyeberangan Bardan - Siantan yang dilakukan pemeliharaan”.

b. Pemeliharaan Pelabuhan dan Dermaga Kota Pontianak.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Pelabuhan dan Dermaga Kota Pontianak serta fasilitas yang dilakukan pemeliharaan”.



- c. Rehabilitasi Pelabuhan dan Dermaga Kota Pontianak.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Pelabuhan dan Dermaga Kota Pontianak serta fasilitas yang dilakukan rehabilitasi”.

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP).

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program “*Persentase Peningkatan Fasilitas Pelayanan Angkutan Sungai*”. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut :

- a. Pembangunan Pelabuhan dan Dermaga Kota Pontianak.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Pelabuhan dan Dermaga kota Pontianak serta fasilitas yang dibangun”.

- b. Pengadaan Kapal Wisata Pemerintah Kota Ptk.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Pengadaan Kapal Wisata Pemerintah Kota Pontianak”.

- c. Pengadaan Alat-Alat Keselamatan Pelayaran Angkutan Sungai dan Penyeberangan.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Unit Pengadaan Alat-Alat Keselamatan Pelayaran Angkutan Sungai dan Penyeberangan”.

- d. Pembangunan Elektronik Gate.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah elektronik gate yang dibangun”.

- e. Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Revitalisasi Pelabuhan/Dermaga Kota Pontianak.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Dermaga/Pelabuhan yang di susun”.



- f. Pembuatan Tiang Sandar Kapal dan Dermaga Apung.
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Lokasi Tiang Sandar Kapal dan Dermaga Apung yang dibangun”.
- g. Pengadaan CCTV Kawasan Pelabuhan/Dermaga dan Tepian Sungai.
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Pengadaan CCTV dan Kelengkapannya”.

5. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program “Persentase Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan yang terpasang Dalam Kondisi Baik”. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut :

- a. Pembangunan Penerangan Jalan Umum.
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Fasilitas Penerangan pada Jalan Umum dan Jalan Lingkungan Yang terpasang”.
- b. Pemasangan Meterisasi Lampu PJU
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Pengatur Daya Meter PJU yang dipasang”.
- c. Operasional Penerangan Jalan Umum
Indikator Kegiatan (Output) “Pemenuhan Kegiatan Operasional PJU di Kota Pontianak”.
- d. Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dilakukan pemeliharaan”.



e. Pengadaan Mobil Truck Lift PJU

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Operasional PJU”.

f. Pembangunan Monitoring Centre PJU

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Monitoring Centre PJU yang dibangun”.

6. Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ.

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program *“Persentase Lokasi Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan lancar”*. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut :

a. Pengaturan dan penjagaan lalu lintas insedentil, rutin dan khusus.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah lokasi jalan dalam kondisi lancar, aman dan tertib pada lokasi dan waktu tertentu”.

b. Patroli dan Razia Pengawasan Penertiban Lalu Lintas.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Lokasi/Kawasan Dalam Kondisi Tertib Lalu Lintas”.

c. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Bahan Kebijakan Bidang Lalu Lintas Yang Dihasilkan”.

d. Pendataan Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) Ruas Jalan.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Dokumen Ruas Jalan dan Persimpangan Yang dilakukan pendataan”.



- e. Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Terminal.
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Kegiatan Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Terminal”
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Operasional BRT.
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Bus BRT yang dilakukan Pemeliharaan/Operasional Berkala”.
- g. Pengelolaan/Operasional Gedung Parkir.
Indikator Kegiatan (Output) “Pemenuhan Pengelolaan/Operasional Gedung Parkir”.
- h. Pendataan Angkutan Umum.
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Dokumen/Data Angkutan Umum di Kota Pontianak”.
- i. Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Perparkiran.
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Kegiatan Pengawasan, dan Penertiban Perparkiran”.
- j. Penyusunan Masterplan Transportasi Kota Pontianak.
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Dokumen Perencanaan Transportasi Yang Dihasilkan”.
- k. Studi Kelayakan Alih Fungsi Oplet Menjadi Angkutan Ramah Anak Sekolah.
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Angkutan Umum yang dihasilkan”.



7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP).

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program “Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai”. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut :

- a. Pengaturan dan Pengendalian Aktifitas Pelabuhan dan Dermaga Pedalaman.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Aktivitas Sandar Kapal Laut, Angkutan Sungai dan Pedalaman”.

- b. Operasional pengendalian, pengawasan dan penertiban angkutan perairan.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Surat Persetujuan Berlayar (SPB)/SIB yang dikeluarkan”.

- c. Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Lintas Barden-Siantan.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Trips Pelayanan Penyeberangan Penumpang dan Kendaraan”.

- d. Monitoring Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS).

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah DuKS yang sesuai dengan izin yang berlaku (yang diajukan)”.



8. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program “Persentase Angkutan Umum dan Barang Yang Lulus Uji KIR”. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut :

- a. Operasional Pengendalian Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor.
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Angkutan Umum dan Barang Yang Lulus Uji KIR”.
- b. Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban PKB.
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah kegiatan Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban PKB”.
- c. Pengadaan Mobil Uji Keliling.
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah unit pengadaan sarana pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor”.
- d. Pengadaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor.
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Unit Pengadaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor”.
- e. Pembuatan dan Pengembangan SIM PKB.
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Fasilitas dan Aplikasi SIM PKB yang dibuat dan dikembangkan”.
- f. Penyusunan Studi Kelayakan (FS) Rencana Pengembangan PKB.
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Dokumen FS Rencana Pengembangan PKB yang dibuat”.
- g. Penyusunan DED Pengembangan PKB.
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Dokumen DED Rencana Pengembangan PKB yang dibuat”.



h. Pembangunan/Pengembangan Gedung PKB dan Perlengkapannya.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Fasilitas PKB yang dibangun/dikembangkan”.

Secara ringkas Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini :



TABEL T-C. 27.a (Tabel V.1.a)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK
TAHUN 2020-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOMES) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
						TAHUN 1 (2020)		TAHUN 2 (2021)		TAHUN 3 (2022)		TAHUN 4 (2023)		TAHUN 5 (2024)					Target	Rupiah
						Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah				Target	Rupiah
1. Meningkatkan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	1.1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.			1.1.a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Perhubungan.		58	5,067,449,000	58	4,428,749,000	58	4,474,881,000	58	4,722,930,000	58	4,971,000,000	58	23,665,009,000			
				1.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	3,150,449,000	100	2,476,049,000	100	2,519,881,000	100	2,600,530,000	100	2,684,000,000	100	2,744,909,000			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.	1 Tersedianya Rekening Telepon, Listrik, sedang dan Internet.	12	247,360,000	12	257,360,000	12	267,000,000	12	270,000,000	12	275,000,000	60	1,316,720,000		
				2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2 Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	153,689,000	12	163,689,000	12	165,000,000	12	170,000,000	12	180,000,000	60	832,378,000		
				3	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	3 Tersedianya Barang, Kertas, Retribusi dan Pengandaan	12	492,800,000	12	504,000,000	12	506,800,000	12	520,000,000	12	530,000,000	60	2,553,600,000		
				4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Terlaksananya Perbaikan dan Penggantian Komponen Instalasi Listrik dan Lampu Penerangan	12	12,600,000	12	14,000,000	12	14,300,000	12	15,300,000	12	20,000,000	60	80,660,000		
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perstran Perundang-undangan	5 Tersedianya Bahan Bacaan	12	21,000,000	12	16,000,000	12	17,000,000	12	18,000,000	12	20,000,000	60	92,000,000		
				6	Penyediaan Makanan dan Minuman	6 Tersedianya Makanan Minum Harian Pegawai, Rapat, Tamu dan Lembar	12	84,000,000	12	91,000,000	12	84,000,000	12	88,000,000	12	104,000,000	60	471,000,000		
				7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	7 Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	12	145,000,000	12	155,000,000	12	155,000,000	12	160,000,000	12	165,000,000	60	780,000,000		
				8	Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran	8 Tersedianya Honorarium Operator dan Biaya Lembar	12	207,000,000	12	215,000,000	12	220,561,000	12	225,000,000	12	230,000,000	60	1,097,553,000		
				9	Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah	9 Tersedianya Biaya Perjalanan Dalam Daerah	12	30,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	55,000,000	12	60,000,000	60	245,000,000		
				10	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	10 Tersedianya Honor Pengelola Keuangan	12	512,000,000	12	585,000,000	12	590,000,000	12	600,000,000	12	610,000,000	60	2,897,000,000		
				11	Penyediaan Jasa Kesehatan, Suplai dan Pengamanan	11 Tersedianya Honor Petugas, Kesehatan, Suplai dan Pengamanan Kantor	12	1,105,000,000	12	1,250,000,000	12	1,250,000,000	12	1,260,000,000	12	1,270,000,000	60	2,135,000,000		
				12	Sosialisai Penyelenggaraan Pembangunan di Kota Pontianak	12 Terlaksananya Sosialisai, Pembinaan dan Pameran	12	110,000,000	12	160,000,000	12	170,000,000	12	180,000,000	12	200,000,000	60	820,000,000		
				13	Penyediaan jasa surat menyurat	13 Terlaksananya Surat Menyurat Dinas.	12	30,000,000	12	15,000,000	12	20,000,000	12	25,000,000	12	30,000,000	60	120,000,000		
						1.1.2. Program Peningkatan Sertifikasi dan Penyalangan Kantor		100	1,495,000,000	100	1,515,000,000	100	1,505,000,000	100	1,657,400,000	100	1,790,000,000	100	7,962,400,000	
						1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Jumlah jenis Pemeliharaan Rutin yg dilakukan pemeliharaan.	12	185,000,000	12	195,000,000	12	250,000,000	12	300,000,000	12	315,000,000	60	1,045,000,000	
						2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas/Operasional	2 Jumlah Kendaran Dinas/Operasional yang dilakukan pemeliharaan.	12	810,000,000	12	820,000,000	12	830,000,000	12	840,000,000	12	870,000,000	60	4,170,000,000	
						3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	3 Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan.	12	200,000,000	12	190,000,000	12	160,000,000	12	170,000,000	12	180,000,000	60	800,000,000	
						4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4 Jumlah Sarana/Peralatan Kantor yang di beli.	12	200,000,000	12	350,000,000	12	265,000,000	12	340,000,000	12	305,000,000	60	1,274,400,000	
						5 Pengadaan Kendaran Dinas/Operasional Roda 2	5 Jumlah Kendaran Dinas/Operasional Lapangan Roda 2 yang dibeli.	0	100,000,000	0	0	0	0	0	2	120,000,000	2	220,000,000		
						6 Pengadaan Kendaran Dinas/Operasional Roda 4	6 Jumlah Kendaran Dinas/Operasional Lapangan Roda 4 yang dibeli.	0	0	0	0	0	0	1	393,000,000	1	393,000,000	1	393,000,000	
						1.1.3. Program Peningkatan Disiplin & Kinerja Aparatur		100	300,000,000	100	330,000,000	100	335,000,000	100	340,000,000	100	360,000,000	100	1,665,000,000	
						1 Pengadaan Pakan Dinas Beretta Perengkapannya	1 Jumlah jenis Pakan dan Kelengkapan yang disediakan.	1	300,000,000	1	330,000,000	1	335,000,000	1	340,000,000	1	360,000,000	5	1,665,000,000	
						1.1.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100	100,000,000	100	85,000,000	100	90,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	475,000,000	
				1 Pendidikan dan Pelatihan Formal.	1 Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang difasilitasi.	12	100,000,000	12	85,000,000	12	90,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	60	475,000,000			
				1.1.5. Program Peningkatan Pelayanan Prima		58	22,000,000	58	22,700,000	58	25,000,000	58	26,000,000	58	27,000,000	58	121,700,000			
				1 Survey Kepuasan Masyarakat dan Penyusunan Dokumen IKM.	1 Dokumen Kriteria Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Penasmetar.	2	22,000,000	2	22,700,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	27,000,000	10	121,700,000			
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	2.1. Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur.			2.1.a. Nilai Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan.		A	120,000,000	A	124,000,000	A	127,000,000	A	130,500,000	A	132,500,000	A	634,000,000			
				2.2.1. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		100	120,000,000	100	124,000,000	100	127,000,000	100	130,500,000	100	132,500,000	100	634,000,000			
				1 Penyusunan Rencana Kerja	1 Jumlah Dokumen Rencana Kerja Yang Tersedia	7	50,000,000	7	50,000,000	7	52,000,000	7	53,000,000	7	55,000,000	35	261,000,000			
				2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	2 Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Yang Tersedia	6	45,000,000	6	45,000,000	6	45,000,000	6	45,000,000	6	45,000,000	30	219,000,000			
				3 Penyusunan Dokumen Kelengkapan TU Aparatur Sekretariat	3 Jumlah Dokumen Kelengkapan TU Aparatur Sekretariat yang dihasilkan.	3	30,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000	3	32,000,000	3	32,000,000	15	154,000,000			
					2.2.b. Perمتاض Temuan Yang Dibindaklanjuti.		100	40,000,000	100	37,000,000	100	41,000,000	100	43,000,000	100	45,000,000	100	206,000,000		
					2.2.2. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan		100	40,000,000	100	37,000,000	100	41,000,000	100	43,000,000	100	45,000,000	100	206,000,000		
			1 Penyusunan Laporan Keuangan	1 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dibuat.	4	40,000,000	4	37,000,000	4	41,000,000	4	43,000,000	4	45,000,000	20	206,000,000				
JUMLAH A (Program/Kegiatan Kesekretariatan)							5,227,449,000		4,589,749,000		4,642,881,000		4,896,430,000		5,148,500,000		24,585,009,000			



TABEL T-C. 27.b (Tabel V.1.b)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK
TAHUN 2020-2024

TUJUAN	SARAPAN STRATEGIS	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDOKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOMES) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI							
						TAHUN-1 (2020)		TAHUN-2 (2021)		TAHUN-3 (2022)		TAHUN-4 (2023)		TAHUN-5 (2024)											
						Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah										
1. Meningkatkan Kualitas Transportasi di Kota Pontianak.	1.1. Meningkatkan cakupan Penerangan Jalan Umum di Kota Pontianak			1.1.a. Index Penerangan Jalan Umum <i>Formulas : (Persentase cakupan Penerangan Jalan Umum + Persentase Cakupan Jalan Lingkungan) : 2</i>	91,09	%	26.089.180.000	92,74	%	26.604.851.000	94,39	%	28.309.389.000	96,03	%	26.825.813.000	97,68	%	26.999.904.000	97,68	%	134.829.137.000			
			1.1.1. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) <i>Persentase Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan yang terpasang</i>	12,94	%	26.089.180.000	43,04	%	26.604.851.000	72,14	%	28.309.389.000	86,57	%	26.825.813.000	100	%	26.999.904.000	100	%	134.829.137.000				
		1	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	1	Jumlah Fasilitas Penerangan pada Jalan Umum dan Jalan Lingkungan Yang terpasang	250	Titik	1.300.000.000	250	Titik	1.300.000.000	250	Titik	1.400.000.000	250	Titik	1.400.000.000	250	Titik	1.400.000.000	1250	Titik	6.800.000.000		
		2	Pemeliharaan Menerangi Lampu PJU	2	Jumlah Pengorbanan Biaya Pemeliharaan Menerangi Lampu PJU	30	Lokasi	200.000.000	35	Lokasi	300.000.000	35	Lokasi	300.000.000	35	Lokasi	300.000.000	35	Lokasi	300.000.000	370	Lokasi	2.279.504.000		
		3	Operasional Penerangan Jalan Umum	3	Pemeliharaan Tegangan Operasional PJU di Kota Pontianak	12	Bulan	23.469.180.000	12	Bulan	23.154.851.000	12	Bulan	23.609.389.000	12	Bulan	23.825.813.000	12	Bulan	23.700.000.000	60	Bulan	117.559.233.000		
		4	Pemeliharaan Rata-Rata Penerangan Jalan Umum (PJU)	4	Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dilakukan pemeliharaan.	15176	1000 Titik	1.120.000.000	1000	Titik	1.200.000.000	1000	Titik	1.300.000.000	1000	Titik	1.300.000.000	1000	Titik	1.300.000.000	5000	Titik	6.230.000.000		
		5	Pengadaan Mobil Truk Lini PJU	5	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Operasional PJU	2	0	Unit	0	Unit	0	1	Unit	1.500.000.000						1	Unit	1.500.000.000			
		6	Pembangunan Monitoring Centre PJU	6	Jumlah Monitoring Centre PJU yang dibangun.	0	0	Paket	0	1	Paket	450.000.000								1	Paket	450.000.000			
1.2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi di Kota Pontianak	1.2.a. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Transportasi			1.2.a. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Transportasi <i>Formulas : (Jumlah persentase ketersediaan fasilitas transportasi yang baik)</i>	78,59	%	4.413.300.000	80,53	%	3.947.000.000	83,33	%	4.155.500.000	85,27	%	3.981.500.000	87,20	%	7.153.000.000	87,20	%	23.650.300.000			
			1.2.1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LAL <i>Persentase Tersedianya Kebutuhan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas Yang Baik.</i>	19,58	%	1.380.000.000	32,62	%	1.821.000.000	58,43	%	2.095.000.000	80,67	%	2.630.000.000	100,00	%	2.066.500.000	100,00	%	5.992.500.000				
		1	Pembuatan Marka Parkir	1	Jumlah Lokasi/Anexasan Parkir yang dilakukan pemertan/pengaturan.	5	Lokasi	80.000.000			8	Lokasi	100.000.000			10	Lokasi	150.000.000	23	Lokasi	330.000.000				
		2	Pengadaan Papan Informasi Elektronik	2	Jumlah Papan Informasi Elektronik yang terpasang.	0	0	Lokasi	0	1	Lokasi	750.000.000	0	Lokasi	800.000.000	1	Lokasi	800.000.000	3	Lokasi	2.356.000.000				
		3	Pembangunan Sistem Tertentu Penyelenggaraan Pejalan Kaki (Pejalan Crossing)	3	Jumlah Fasilitas Crossing yang dibangun/dibangun.	0	0	Lokasi	0	2	Lokasi	200.000.000	2	Lokasi	200.000.000	0	Lokasi	0	0	Lokasi	0	6	Lokasi	600.000.000	
		4	Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZSS)	4	Jumlah Lokasi/Unit/lot Zona Selamat Sekolah (ZSS) yang tersedia.	16	2	Lokasi	200.000.000	2	Lokasi	200.000.000	3	Lokasi	300.000.000	3	Lokasi	300.000.000	3	Lokasi	286.500.000	13	Lokasi	1.286.500.000	
		5	Pengembangan dan pemeliharaan pemertan lalu lintas.	5	Jumlah fasilitas pemertan lalu lintas yang tersedia.	3923	60	Rambu	140.000.000	60	Rambu	150.000.000	60	Rambu	150.000.000	60	Rambu	150.000.000	60	Rambu	150.000.000	300	Rambu	750.000.000	
		6	Pengadaan dan Pemeliharaan Traffic Light	6	Jumlah lokasi/lampung yang dibangun traffic light	20	1	Lokasi	460.000.000	0	Lokasi	0	1	Lokasi	475.000.000	0	Lokasi	0	0	Lokasi	0	3	Lokasi	1.410.000.000	
		7	Pengadaan Marka Jalan	7	Jumlah Fasilitas perlengkapan jalan (Marka) yang tersedia.	67	3	Lokasi	200.000.000	4	Lokasi	215.000.000	7	Lokasi	400.000.000	4	Lokasi	230.000.000	4	Lokasi	230.000.000	22	Lokasi	1.275.000.000	
		8	Pengadaan Zebra Cross	8	Jumlah lokasi Zebra Cross yang di buat	51	8	Lokasi	100.000.000	5	Lokasi	110.000.000	5	Lokasi	120.000.000	6	Lokasi	135.000.000	10	Lokasi	150.000.000	34	Lokasi	605.000.000	
		9	Pengadaan, Perbaikan dan Pengembangan ATC/ACTV	9	Jumlah Unit Fasilitas ATC/ACTV yang tersedia.	88	10	CCTV	200.000.000	10	CCTV	200.000.000	16	CCTV	350.000.000	16	CCTV	350.000.000	14	CCTV	300.000.000	66	CCTV	1.400.000.000	
			1.2.2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LAL <i>Persentase APIL dan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas Terpenuhi Dalam Kondisi Baik.</i>	18,76	%	811.000.000	38,94	%	866.000.000	59,74	%	980.000.000	78,25	%	900.000.000	100,00	%	976.000.000	100,00	%	4.533.000.000				
		1	Pemeliharaan Rata-Rata Traffic Light dan Countdown Light	1	Jumlah Traffic Light dan Countdown Light dalam kondisi baik	20	20	Lokasi	215.000.000	22	Lokasi	220.000.000	22	Lokasi	220.000.000	23	Lokasi	230.000.000	23	Lokasi	235.000.000	110	Lokasi	1.120.000.000	
		2	Pemeliharaan Rambu Komunitas	2	Jumlah Rambu Komunitas dalam kondisi baik	25	25	Unit	15.000.000	25	Unit	15.000.000	25	Unit	20.000.000	25	Unit	20.000.000	25	Unit	20.000.000	125	Unit	90.000.000	
		3	Pemeliharaan Traffic Light	3	Jumlah Traffic Light dalam kondisi baik	11	11	Lokasi	11.000.000	11	Lokasi	11.000.000	11	Lokasi	15.000.000	11	Lokasi	15.000.000	11	Lokasi	11.000.000	30	Lokasi	63.000.000	
		4	Pemeliharaan Papan Informasi Elektronik	4	Jumlah Papan Informasi Elektronik dalam kondisi baik	0	0	Lokasi	0	1	Lokasi	75.000.000	1	Lokasi	75.000.000	1	Lokasi	150.000.000	2	Lokasi	150.000.000	4	Lokasi	300.000.000	
		5	Pemeliharaan Rata-rata Laju Lalu Lintas	5	Jumlah rambu tambahan lalu lintas yang dilakukan pemeliharaan.	120	100	Buah/lembar	85.000.000	110	Buah/lembar	100.000.000	130	Buah/lembar	110.000.000	135	Buah/lembar	110.000.000	135	Buah/lembar	110.000.000	650	Buah/lembar	495.000.000	
		6	Rehabilitasi dan pemeliharaan Marka	6	Jumlah Marka yang dilakukan pemertan/ pemertan	18	8	Marka	100.000.000	10	Marka	110.000.000	5	Marka	100.000.000	0	Marka	0	2	Marka	85.000.000	25	Marka	405.000.000	
		7	Rehabilitasi Filter Optik dan Pemeliharaan CCTV/ACTV	7	Jumlah Unit Fasilitas Filter Optik/ACTV yang dilakukan rehabilitasi/ perbaikan/ penggantian	20	3	Titik/Lokasi	210.000.000	3	Titik/Lokasi	220.000.000	3	Titik/Lokasi	250.000.000	2	Titik/Lokasi	165.000.000	14	Titik/Lokasi	165.000.000	14	Titik/Lokasi	1.095.000.000	
		8	Peningkatan Traffic Light	8	Jumlah Traffic light yang dilakukan Peningkatan.	20	Simpang	1	Lokasi	175.000.000	1	Lokasi	190.000.000	1	Lokasi	200.000.000	1	Lokasi	200.000.000	1	Lokasi	200.000.000	5	Lokasi	955.000.000
			1.2.3. Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungsai dan Perseberangan <i>Persentase Berfungsinya Dermaga Sungsai dan Fasilitas Perseberangan</i>	24,52	%	476.500.000	49,05	%	510.000.000	73,57	%	470.000.000	84,40	%	235.000.000	100,00	%	220.000.000	100,00	%	2.031.500.000				
		1	Pemeliharaan Perbaikan dan Dermaga Kota Pontianak	1	Jumlah Perbaikan dan Dermaga Kota Pontianak serta Fasilitas yang dilakukan pemertan	2	Fasilitas	150.000.000	2	Fasilitas	160.000.000	2	Fasilitas	100.000.000	1	Fasilitas	135.000.000	1	Fasilitas	100.000.000	8	Fasilitas	645.000.000		
		2	Rehabilitasi Perbaikan dan Dermaga Kota Pontianak	2	Jumlah Perbaikan dan Dermaga Kota Pontianak serta Fasilitas yang dilakukan rehabilitasi	2	Fasilitas	200.000.000	2	Fasilitas	250.000.000	2	Fasilitas	250.000.000	1	Fasilitas	100.000.000	7	Fasilitas	800.000.000	7	Fasilitas	800.000.000		
		3	Operasional dan Pemeliharaan Perbaikan Perseberangan Barden, Siantan	3	Jumlah Fasilitas Perbaikan Perseberangan Barden - Siantan yang dilakukan pemertan	6	Fasilitas	126.500.000	6	Fasilitas	100.000.000	6	Fasilitas	120.000.000	6	Fasilitas	120.000.000	6	Fasilitas	120.000.000	30	Fasilitas	586.500.000		
			1.2.4. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP <i>Persentase Peningkatan Fasilitas Pelayanan Angkutan Sungsai.</i>	24,60	%	1.745.800.000	49,21	%	720.000.000	64,88	%	610.500.000	68,06	%	186.500.000	100,00	%	3.790.500.000	100,00	%	7.093.800.000				
		1	Pembangunan Perbaikan dan Dermaga Kota Pontianak	1	Jumlah Perbaikan dan Dermaga Kota Pontianak serta Fasilitas yang dibangun	2	Fasilitas Dermaga	200.000.000	2	Fasilitas Dermaga	200.000.000	2	Fasilitas Dermaga	350.000.000	2	Fasilitas Dermaga	196.500.000	1	Fasilitas Dermaga	176.500.000	9	Fasilitas Dermaga	1.123.000.000		
		2	Pengadaan Kapal Wisata Pemerintah Kota Pk	2	Jumlah Pengadaan Kapal Wisata Pemerintah Kota Pontianak	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	3.000.000.000	1	Unit	3.000.000.000	1	Unit	3.000.000.000		
		3	Pengadaan Alat-Alat Keselamatan Pelayaran Angkutan Sungsai dan Penyelenggaraan	3	Jumlah Unit Pengadaan Alat-Alat Keselamatan Pelayaran Angkutan Sungsai dan Penyelenggaraan	30	Buah	55.800.000	0	Buah	0	30	Buah	60.500.000	0	Buah	0	0	Buah	0	60	Buah	116.300.000		
		4	Pembangunan Sistem Informasi	4	Jumlah Sistem Informasi yang dibangun	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	250.000.000	0	0	0	0	Unit	500.000.000	2	Unit	500.000.000	2	Unit	500.000.000	
		5	Pemantauan Detail Engineering Design (DED) Rehabilitasi Perbaikan Dermaga Kota Pontianak	5	Jumlah Dokumen Pemantauan Pengembangan Dermaga/Perbaikan yang di susun.	0	Dokumen	0	1	Dokumen	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6	Pengadaan CCTV Anexasan Perbaikan Dermaga dan Tegap Sungsai	6	Jumlah Pengadaan CCTV dan ketetapanannya	0	Titik/Lokasi	0	1	Titik/Lokasi	300.000.000	3	Titik/Lokasi	200.000.000	0	Titik/Lokasi	0	1	Titik/Lokasi	114.000.000	8	Titik/Lokasi	614.000.000		
		7	Pembuatan Tiang Sander Kapal dan Dermaga Apung	7	Jumlah Lokasi Tiang Sander Kapal dan Dermaga Apung yg dibangun.	2	Paket	1.490.000.000												2	Dokumen	1.490.000.000			



1.3. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai dan Penyeberangan Kota Pontianak		2.1.a. Tingkat Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan (Kelancaran Lalu Lintas) Kota Pontianak.		B	5,830,071,000	B	7,775,000,000	B	6,532,069,000	A	10,331,190,000	A	18,072,869,000	A	48,540,399,000												
		Formula: (Volume / Capacity Ratio)		0,32		0,28		0,24		0,20		0,18		0,18													
2.1.1. Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Jalan		Perentase Lokasi Jalan Utama Dalam Kondisi Terlibat dan lancar.		14,68	%	4,199,009,840	33,07	%	4,282,790,000	35,49	%	4,540,580,000	84,79	%	4,940,580,000	100,00	%	4,345,580,000	100,00	%	22,328,047,840						
1	Pengaturan dan pengisian lalu lintas (Tugaspantau) lokasi dan lokasi	1	Jumlah lokasi jalan dalam kondisi lancar, aman dan tertib pada lokasi dan waktu tertentu	30	20	Lokasi	210,000,000	20	Lokasi	210,000,000	22	Lokasi	230,000,000	23	Lokasi	230,000,000	107	Lokasi	1,095,000,000								
2	Penyediaan dan pengisian pembaruan lalu lintas	2	Jumlah lokasi/ruas jalan dalam kondisi terlibat lalu lintas	25	25	Lokasi	1,700,000,000	25	Lokasi	1,747,348,000	25	Lokasi	1,790,580,000	30	Lokasi	1,790,580,000	335	Lokasi	8,999,098,000								
3	Forum lalu lintas dan angkutan jalan	3	Jumlah forum kelancaran Bandung lalu lintas yang dihasilkan	8	10	Bahan Kelengkapan	132,000,000	10	Bahan Kelengkapan	135,000,000	12	Bahan Kelengkapan	135,000,000	15	Bahan Kelengkapan	140,000,000	59	Bahan Kelengkapan	677,000,000								
4	Pendataan lalu lintas harian rata-rata (LHR) ruas jalan	4	Jumlah Dokumen ruas jalan dan pembaruan yang dilakukan pendataan	1	3	Dokumen	170,000,000	2	Dokumen	117,950,000	2	Dokumen	120,000,000	2	Dokumen	120,000,000	11	Dokumen	647,950,000								
5	Pengendalian, pengawasan dan pembaruan terminal	5	Jumlah kegiatan pengendalian, pengawasan dan pembaruan terminal	12	12	Bulan	360,000,000	12	Bulan	174,000,000	12	Bulan	175,000,000	12	Bulan	175,000,000	60	Bulan	859,000,000								
6	Pemeliharaan Rutin/Periodik/Operasional BRT	6	Jumlah bus BRT yang dilakukan Pemeliharaan/Operasional Berkala	5	5	Unit	790,000,000	5	Unit	770,000,000	5	Unit	770,000,000	5	Unit	780,000,000	25	Unit	3,848,000,840								
7	Pengelolaan/Operasional Gedung Parkir	7	Pemeriksaan Pengelolaan/Operasional Gedung Parkir	12	12	Bulan	1,000,000,000	12	Bulan	1,000,000,000	12	Bulan	1,000,000,000	12	Bulan	1,000,000,000	60	Bulan	5,000,000,000								
8	Pendataan Angkutan Umum	8	Jumlah Dokumen/Data kendaraan angkutan umum di Kota Pontianak	1	0	Dokumen	0	0	Dokumen	60,000,000	0	Dokumen	70,000,000	0	Dokumen	70,000,000	2	Dokumen	130,000,000								
9	Pembinaan, Pengawasan, dan Pembaruan Pengoperasian	9	Jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pembaruan pengoperasian	12	12	Bulan	68,000,000	12	Bulan	68,000,000	12	Bulan	140,000,000	12	Bulan	150,000,000	60	Bulan	576,000,000								
10	Pemantauan, Mutu/layanan Transportasi Kota Pontianak	10	Jumlah Dokumen Transportasi yang Dihasilkan	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	545,000,000	1	Dokumen	545,000,000	1	Dokumen	545,000,000								
11	Studi Kelayakan Arah Fungsi Optimal Merajut Angkutan Ramah Anak/Sejahtera	11	Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Angkutan Umum yang dihasilkan	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	250,000,000	1	Dokumen	250,000,000	1	Dokumen	250,000,000								
2.1.2. Program Peningkatan Pelayanan ASP				Perentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai				18,81	%	761,063,160	38,28	%	1,229,722,000	58,24	%	1,252,882,000	78,96	%	1,257,882,000	100,00	%	1,257,882,000	100,00	%	5,759,429,160		
1	Pengaturan dan Pemeliharaan Kelembagaan Pelabuhan dan Dermaga Pelabuhan	1	Jumlah Aktivitas Sederet Kapal Laut, Angkutan Sungai dan Pelabuhan	7200	Kali Sander	199,540,000	7200	Kali Sander	200,000,000	7240	Kali Sander	210,000,000	7200	Kali Sander	210,000,000	80710	Kali Sander	1,029,540,000									
2	Operasional pengendalian, pengawasan dan pembaruan angkutan perantara	2	Jumlah Surat Perijinan Berlayar (SPB)/Dit yang diluncurkan	10000	SPB/SIB	343,287,200	10000	SPB/SIB	750,488,000	11000	SPB/SIB	750,488,000	11000	SPB/SIB	750,488,000	11500	SPB/SIB	750,488,000	5300	SPB/SIB	3,345,239,200						
3	Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Lintas	3	Jumlah Trip Pelayanan Penyeberangan Penumpang	34000	Trip	166,233,960	34000	Trip	226,234,000	34050	Trip	237,394,000	34100	Trip	237,394,000	34600	Trip	237,394,000	170750	Trip	1,104,649,960						
4	Monitoring Dermaga Untuk Kelestarian Sederet (DUKS)	4	Jumlah Studi yang selesai dengan nilai yang berlaku (yang dilakukan)	64	DUKS	52,000,000	74	DUKS	53,000,000	74	DUKS	55,000,000	85	DUKS	60,000,000	85	DUKS	60,000,000	382	DUKS	280,000,000						
2.1.3. Program Peningkatan Kelancaran Pengoperasian Kendaraan Bermotor				Perentase Angkutan Umum dan Barang Yang Lulus Uji KIR				7,35	%	870,000,000	39,75	%	2,362,980,000	57,26	%	718,607,000	77,32	%	4,132,728,000	100,00	%	12,468,607,000	100,00	%	20,452,932,000		
1	Operasional Pengendalian peralihan pengisian kendaraan bermotor	1	Jumlah Angkutan Umum, Online dan Barang Yangdi Uji KIR	16,000	Unit	190,000,000	16,300	Unit	265,960,000	16,700	Unit	367,352,000	17,000	Unit	367,352,000	17,500	Unit	267,352,000	83500	Unit	1,258,016,000						
2	Pengendalian, pengawasan dan pembaruan PKB	2	Jumlah Kegiatan Pengendalian, Pengawasan dan Pembaruan PKB	144	Hari	180,000,000	144	Hari	197,020,000	147	Hari	201,255,000	147	Hari	201,255,000	150	Hari	201,255,000	732	Hari	980,785,000						
3	Pengadaan Model Uji Kelembagaan	3	Jumlah uji/pengujian sarana pendukung/teknis kendaraan bermotor	1	Unit	3,000,000,000	1	Unit	3,000,000,000	1	Unit	3,000,000,000	1	Unit	3,000,000,000	1	Unit	3,000,000,000	1	Unit	3,000,000,000						
4	Pengalasan Peralatan Pengisian kendaraan bermotor	4	Jumlah Uji Pengalasan Peralatan Pengisian Kendaraan Bermotor	1	Unit	500,000,000	1	Unit	1,300,000,000	1	Unit	664,121,000	2	Unit	2,000,000,000	5	Unit	4,464,121,000									
5	Pembinaan dan Pengembangan SIM PKB	5	Jumlah Fasilitas dan Melaksanakan SIM PKB yang dibuat dan dikembangkan	0	Sistem	0	1	Sistem	250,000,000	0	Sistem	0	1	Sistem	250,000,000	1	Aplikasi	250,000,000									
6	Pemantauan Studi Kelayakan (SK) Rencana Pengembangan PKB	6	Jumlah Dokumen SK Rencana Pengembangan PKB yang dibuat	0	Dokumen	0	1	Dokumen	250,000,000	0	Dokumen	0	1	Dokumen	250,000,000	1	Dokumen	250,000,000									
7	Pemantauan OED Pengembangan PKB	7	Jumlah Dokumen OED Rencana Pengembangan PKB yang dibuat	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	250,000,000	0	Dokumen	0	1	Dokumen	250,000,000									
8	Pembinaan/Pengembangan Gedung PKB dan Peningkatannya	8	Jumlah Fasilitas PKB yang dibangun/dikembangkan	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	1	Unit	10,000,000,000	1	Unit	10,000,000,000									
Jumlah B (Program/Kegiatan Pembangunan)				36,332,551,000				38,316,851,000				38,996,958,000				41,138,503,000				52,224,973,000				207,019,836,000			
Jumlah A + B				41,562,000,000				42,833,600,000				43,029,819,000				46,034,933,000				57,379,473,000				211,234,845,000			



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 yang merupakan suatu keselarasan rencana pembangunan sesuai kurun waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Visi Kota “*Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat*”, serta Misi, Tujuan dan Sasaran Kota, maka dapat dilihat keselarasan indikator kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pontianak tahun 2020-2024. Adapun keselarasan tersebut dapat dilihat sebagaimana berikut :

7.1. Keselarasan Tujuan 2 dan Sasaran 2.5 pada Misi 2 RPJMD

MISI 2 RPJMD	: Menciptakan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Representatif.
Tujuan RPJMD	: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan.
Sasaran RPJMD	: Meningkatnya Kualitas Transportasi.



Indikator Tujuan Dinas Perhubungan yang merupakan Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kota Pontianak yaitu Rata-Rata Waktu Tempuh, yang merupakan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) WALIKOTA yang akan dicapai melalui pencapaian Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

Adapun Indikator Sasaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk mendukung tercapainya dan selaras dengan Sasaran, Tujuan, Misi ke 2 dan Visi Walikota Pontianak Tahun 2020-2024, yaitu :

1. Indeks Penerangan Jalan Umum.

Indikator ini juga merupakan salah satu komponen dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perkotaan, melalui peningkatan kualitas transportasi. Upaya ini akan dilakukan dengan menyediakan penerangan pada jalan umum dan jalan lingkungan serta meterisasi semua penerangan jalan, yang akan diwujudkan dengan pelaksanaan 1 program, yaitu Program Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.

Adapun Indikator Kinerja Indeks Penerangan Jalan Umum, yang merupakan indikator Kinerja Sasaran ke 1 Dinas Perhubungan yang tertuang dan mengacu pada Tujuan dan Sasaran pada Misi ke 2 RPJMD Kota Pontianak, dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut ini:



Tabel T-C. 28.a.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	<i>Indeks Penerangan Jalan Umum</i>	89,44	91,09	92,74	94,39	96,03	97,68	99,33

2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Transportasi.

Penyediaan fasilitas pendukung transportasi yang baik merupakan salah satu komponen dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perkotaan, melalui peningkatan kualitas transportasi. Upaya ini akan dilakukan dengan menyediakan fasilitas penunjang transportasi melalui penyediaan prasarana dan fasilitas LLAJ serta penyediaan prasarana dan fasilitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP), yang akan diwujudkan dengan pelaksanaan 4 program, yaitu :

- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ,
- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ,
- c. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas ASDP,
- d. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas ASDP.

Adapun Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Transportasi, yang merupakan indikator Kinerja Sasaran ke 2 Dinas Perhubungan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran pada Misi ke 2 RPJMD Kota Pontianak, dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut ini:



Tabel T-C. 28.b.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Transportasi Yang Baik	75,79	78,59	80,53	83,33	85,27	87,20	90,37
-	Persentase Rambu-Rambu lalu lintas yang terpasang	73,20	75,60	78,00	80,40	82,80	85,20	87,60
-	Persentase Traffic Light dalam keadaan baik	86,96	91,30	91,30	95,65	95,65	95,65	100
-	Persentase Lokasi Fasilitas CCTV dalam keadaan baik	45,45	52,73	60,00	67,27	74,55	81,82	90,91
-	Persentase Halte dalam kondisi baik	100	100	100	100	100	100	100
-	Persentase Fasilitas/prasarana dermaga dalam kondisi baik	73,33	73,33	73,33	73,33	73,33	73,33	73,33

3. Tingkat Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan (Kelancaran Lalu Lintas).

Tingkat Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan (Kelancaran Lalu Lintas) Kota Pontianak, merupakan indikator untuk mengukur kinerja ruas jalan maupun persimpangan pada jalan-jalan di Kota Pontianak untuk mengetahui tingkat kelancaran pada lokasi-lokasi tertentu sebagai dasar dalam melakukan rekayasa lalu lintas serta menyusun rencana masterplan transportasi. Upaya untuk meningkatkan kinerja jaringan jalan ini akan diwujudkan dengan pelaksanaan 3 program, yaitu :

- a. Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ.
- b. Program Peningkatan Pelayanan ASDP.
- c. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.



Adapun Indikator Kinerja Tingkat Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan (Kelancaran Lalu Lintas) Kota Pontianak, yang merupakan indikator Kinerja Sasaran ke 3 Dinas Perhubungan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran pada Misi ke 2 RPJMD Kota Pontianak, dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel T-C. 28.c.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	<i>Tingkat Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan (Kelancaran Lalu Lintas) Kota Pontianak</i>	B	B 0,32	B 0,28	B 0,24	A 0,20	A 0,18	A 0,18

Tingkat Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan (Kelancaran Lalu Lintas) atau tingkat pelayanan jalan (level of service) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kualitas suatu ruas jalan tertentu dalam melayani arus lalu lintas yang melewatinya. Adapun untuk rumus perhitungan tingkat pelayanan jalan, yaitu sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Pelayanan (LOS)} : \frac{\text{Volume Kendaraan (smp/jam)}}{\text{Kapasitas Jalan (smp/jam)}}$$



Tabel Karakteristik Tingkat Pelayanan
(Level Of Service)

Tingkat Pelayanan (LOS)	Batas Lingkup (Rasio V/C)	Karakteristik
A	0,0 - 0,20	Arus bebas, volume rendah dan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang dikehendaki
B	0,21 - 0,44	Arus stabil, kecepatan sedikit terbatas oleh lalu lintas, pengemudi masih dapat bebas dalam memilih kecepatannya.
C	0,45 - 0,74	Arus stabil, kecepatan dapat dikontrol oleh lalu lintas
D	0,75 - 0,84	Arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda, volume mendekati kapasitas
E	0,85 - 1,00	Arus tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda, volume mendekati kapasitas
F	>1,00	Arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume diatas kapasitas, sering terjadi kemacetan pada waktu yang cukup lama.

Penjelasan lebih rinci terhadap kategori tingkat pelayanan, dapat dilihat pada uraian berikut ini :

Tingkat pelayanan A

dengan kondisi:

- arus bebas dengan volume lalu lintas rendah dan kecepatan tinggi;
- kepadatan lalu lintas sangat rendah dengan kecepatan yang dapat dikendalikan oleh pengemudi berdasarkan batasan kecepatan maksimum/minimum dan kondisi fisik jalan;
- pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkannya tanpa atau dengan sedikit tundaan.



Tingkat pelayanan B

dengan kondisi:

- arus stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas;
- kepadatan lalu lintas rendah hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi kecepatan;
- pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih kecepatannya dan lajur jalan yang digunakan.

Tingkat pelayanan C

dengan kondisi:

- arus stabil tetapi kecepatan dan pergerakan kendaraan dikendalikan oleh volume lalu lintas yang lebih tinggi;
- kepadatan lalu lintas sedang karena hambatan internal lalu lintas meningkat;
- pengemudi memiliki keterbatasan untuk memilih kecepatan, pindah lajur atau mendahului.

Tingkat pelayanan D

dengan kondisi:

- arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas tinggi dan kecepatan masih ditolerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi arus;
- kepadatan lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu lintas dan hambatan temporer dapat menyebabkan penurunan kecepatan yang besar;



- pengemudi memiliki kebebasan yang sangat terbatas dalam menjalankan kendaraan, kenyamanan rendah, tetapi kondisi ini masih dapat ditolerir untuk waktu yang singkat.

Tingkat pelayanan E

dengan kondisi:

- arus lebih rendah daripada tingkat pelayanan D dengan volume lalu lintas mendekati kapasitas jalan dan kecepatan sangat rendah;
- kepadatan lalu lintas tinggi karena hambatan internal lalu lintas tinggi;
- pengemudi mulai merasakan kemacetan-kemacetan durasi pendek.

Tingkat pelayanan F

dengan kondisi:

- arus tertahan dan terjadi antrian kendaraan yang panjang;
- kepadatan lalu lintas sangat tinggi dan volume sama dengan kapasitas jalan serta terjadi kemacetan untuk durasi yang cukup lama;
- dalam keadaan antrian, kecepatan maupun arus turun sampai 0.



BAB **VIII** | **PENUTUP**

Perencanaan Strategis yang merupakan suatu proses yang mengarahkan para pimpinan Dinas dalam mengembangkan Visi yang merupakan acuan dasar untuk mengembangkan program, kegiatan dan kebijakan. Dengan demikian, perencanaan strategis bagi Dinas Perhubungan merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul pada Dinas Perhubungan.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan Dinas Perhubungan Kota Pontianak menerapkan manajemen Strategik sebagai langkah awal dalam menentukan strategi kedepan tentang apa yang akan dilaksanakan, bagaimana melaksanakannya serta evaluasi, untuk itu Dinas Perhubungan



Kota Pontianak memiliki Tujuan dan Sasaran yang dapat memudahkan bagi setiap orang untuk membaca, memahami dan mengerti apa yang diinginkan dan akan di lakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

Dalam perjalanan waktu serta perkembangan dan perubahan kondisi baik ekonomi, sosial maupun perubahan kebijakan Pusat dan Daerah, Dinas Perhubungan Kota Pontianak tentunya akan melakukan perubahan dan penyesuaian. Untuk itu, masukan dan saran tentunya sangat kami harapkan untuk Menjadikan Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang lebih baik.



LAMPIRAN 1

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, tentang Penetapan RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Pontianak 2020-2024



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Aliyayang Nomor 7 Telepon (0561) 767136 Fax. (0561) 767136
Pontianak 78116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan pasal 151 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah satuan kerja perangkat daerah/rencana strategis (RPJM / Renstra satuan kerja perangkat daerah (SKPD));
 - b. bahwa berdasarkan Visi dan Misi Walikota Pontianak periode 2020-2024 serta telah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2020-2024, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis SKPD periode 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008, tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008, tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kota Pontianak;
12. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2010 – 2014;
13. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 149);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 63 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak;
17. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 64 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 64);
18. Keputusan Walikota Pontianak Nomor 712/Dishubkominfo/Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2015-2019;
19. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019;
20. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019.
21. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **MENETAPKAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024.**

Pasal 1

Dengan keputusan ini ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

Pasal 2

Tujuan penetapan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah sebagai pedoman dalam :

- a. Penyusunan dan penetapan rencana Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Penyusunan dan penyampaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- c. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran (RKA/DPA);
- d. Penyusunan dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja (PK);
- e. Pengelolaan data kinerja;
- g. Pelaporan akuntabilitas kinerja (LAKIP);
- h. Evaluasi akuntabilitas kinerja; dan
- i. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

Ruang lingkup Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program serta Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pontianak serta berpedoman kepada RPJMD Kota Pontianak.

Pasal 4

Sistematika penyajian dan isi beserta uraian Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 5

Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

Pasal 6

Pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja dan kebijakan yang ditetapkan dalam renstra ini dilakukan oleh masing-masing kepala unit kerja (Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTD) di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

Pasal 7

Hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 menjadi bahan bagi penyusunan rencana kinerja tahunan untuk tahun-tahun berikutnya.

Pasal 8

Pada saat diberlakukannya peraturan ini, Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Nomor 66 tahun 2017 tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2015-2019 dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 28 Juni 2019

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Pontianak




Dra. Hj. Utin Sri Lena Candramidi, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19680410 199503 2 006

Tembusan :

1. Walikota Pontianak u.p. Bagian Organisasi Setda Kota Pontianak;
2. Kepala Bappeda Kota Pontianak.

Visi Kota Pontianak : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat
Misi 2 Kota Pontianak : Menciptakan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Representatif

TUJUAN	SABARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET KINERJA 2020 - 2024						PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN			PENANGGUNG JAWAB		
			SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN			
1. Meningkatkan Kualitas Transportasi di Kota Pontianak	1.1. Meningkatkan cakupan Penerangan Jalan Umum di Kota Pontianak	Rata-Rata Waktu Tempuh	Jam	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05						
		1.1.a. Indeks Penerangan Jalan Umum	%	91,09	92,74	94,39	96,03	97,68	1. Meningkatkan Pembangunan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.	1. Melakukan Pemeliharaan, Peningkatan dan Pengembangan Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan	1.1.1. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	1. Pembangunan Penerangan Jalan Umum		
		Formulasi: (Persentase cakupan Penerangan Jalan Umum + Persentase Cakupan Jalan Lingkungan) : 2							2. Peningkatan pengawasan dan pemantauan serta pemasangan Meterisasi PJU	2. Pemantauan Meterisasi Lampu PJU	2. Pemantauan Meterisasi Lampu PJU	3. Operasional Penerangan Jalan Umum		
									3. Peningkatan dan pengadaan sarana prasarana pendukung Operasional PJU	3. Pengadaan Mobil Truck LIR PJU	3. Pengadaan Mobil Truck LIR PJU	4. Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)		
												5. Pengadaan Mobil Truck LIR PJU		
												6. Pembangunan Monitoring Centre PJU		
1.2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi Di Kota Pontianak	1.2.a. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Transportasi	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Transportasi	%	78,59	80,53	83,33	85,27	87,20	2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi	1. Melakukan pengadaan fasilitas APILL	1.2.1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAL.	1. Pembuatan Marka Parkir.		
		Formulasi: (Jumlah persentase ketersediaan fasilitas transportasi yang baik)							2. Melakukan pembuatan Zebra Cross, "Zone Selamat Sekolah (ZSSS), Marka Jalan dan Marka Parkir	2. Pengadaan Papan Informasi Elektronik	2. Pengadaan Papan Informasi Elektronik	2. Pembangunan Sistem Tombol Penyeberangan Pejalan Kaki (Pedestrian Crossing)		
									3. Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas	3. Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas	3. Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZSSS)	3. Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZSSS)		
									4. Pengadaan dan pengembangan CCTV/ATES	4. Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	4. Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	4. Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas		
									5. Pengadaan dan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan lainnya.	5. Pengadaan Zebra Cross.	5. Pengadaan Zebra Cross.	5. Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas		
												6. Pengadaan dan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan lainnya.	6. Pengadaan, Peningkatan dan Pengembangan ATCS/CCTV.	
1.3. Meningkatkan Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai dan Penyeberangan Kota Pontianak.	1.3.a. Tingkat Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan (Kelancaran Lalu Lintas) Kota Pontianak.	Tingkat Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan (Kelancaran Lalu Lintas) Kota Pontianak.	Tingkat Pelayanan	B	B	B	A	A	6. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LAL	1. Melakukan pengawasan dan patroli serta pengajaran lalu lintas, parkir dan terminal	1.3.1. Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LAL.	1. Pengaturan dan pengajaran lalu lintas (Turgatantas) insidental dan khusus.		
		Formulasi: (Volume / Capacity Ratio)		0,32	0,28	0,24	0,20	0,18	2. penyusunan rencana dan masterplan transportasi kota pontianak serta pendataan lalu lintas	2. Forum lalu lintas dan angkutan jalan.	2. Patroli dan razia pengawasan penertiban lalu lintas.	2. Patroli dan razia pengawasan penertiban lalu lintas.		
									3. meningkatkan koordinasi antar instansi teknis dan pihak terkait dalam mengatasi permasalahan lalu lintas dan rekayasa lalu lintas	3. Pendataan lalu lintas harian rata-rata (LHR) ruas jalan.	3. Pendataan lalu lintas harian rata-rata (LHR) ruas jalan.	3. Pendataan lalu lintas harian rata-rata (LHR) ruas jalan.		
											4. Pendataan Angkutan Umum	4. Pendataan Angkutan Umum		
											5. Pembinaan, Pengawasan, dan Penertiban Perparkiran	5. Pembinaan, Pengawasan, dan Penertiban Perparkiran		
											6. Penyusunan Masterplan Transportasi Kota Pontianak	6. Penyusunan Masterplan Transportasi Kota Pontianak		
											7. Studi Kelayakan Alih Fungsi Opzet Menjadi Angkutan Ramah Anak Sejalan	7. Studi Kelayakan Alih Fungsi Opzet Menjadi Angkutan Ramah Anak Sejalan		
1.3. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Bermotor	1.3.a. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Transportasi	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Transportasi	%	78,59	80,53	83,33	85,27	87,20	4. Meningkatkan fungsi Prasarana Dermaga Sungai Danau dan Penyeberangan	1. Peningkatan fungsi melalui optimalisasi operasional peralatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Dermaga dan Pelabuhan	1.2.2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAL.	1. Pemeliharaan Rutin Traffic Light dan Countdown Light		
		Formulasi: (Jumlah persentase ketersediaan fasilitas transportasi yang baik)							2. Melakukan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	2. Pemeliharaan Rutin rambu-rambu lalu lintas.	2. Pemeliharaan Rutin rambu-rambu lalu lintas.	2. Pemeliharaan Rutin rambu-rambu lalu lintas.		
												3. Pemeliharaan Rutin Traffic Light dan Countdown Light		
												4. Pemeliharaan Rutin rambu-rambu lalu lintas.		
												5. Pemeliharaan Rutin rambu-rambu lalu lintas.		
												6. Rehabilitasi dan pemeliharaan Halt.		
												7. Rehabilitasi Fiber Optic CCTV/ATES.		
												8. Peningkatan Traffic Light		
1.3. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Bermotor	1.3.a. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Transportasi	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Transportasi	%	78,59	80,53	83,33	85,27	87,20	5. Meningkatkan Prasarana dan Sarana ASDP	1. Pembangunan pelabuhan dan Dermaga Kota Pontianak	1.2.4. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP.	1. Pembangunan Pelabuhan dan Dermaga Kota Pontianak		
		Formulasi: (Jumlah persentase ketersediaan fasilitas transportasi yang baik)							2. pembangunan sarana pendukung fasilitas dermaga dan pelabuhan serta pengawasan	2. Pembangunan Kapal Wisata Pemerintah Kota PKB	2. Pembangunan Kapal Wisata Pemerintah Kota PKB	2. Pembangunan Kapal Wisata Pemerintah Kota PKB		
									3. pengadaan CCTV dan perangkatnya untuk kawasan tepian sungai	3. Pengadaan Alat-Alat Keselamatan Pelayaran Angkutan Sungai dan Penyeberangan	3. Pengadaan Alat-Alat Keselamatan Pelayaran Angkutan Sungai dan Penyeberangan	3. Pengadaan Alat-Alat Keselamatan Pelayaran Angkutan Sungai dan Penyeberangan		
												4. Pembangunan Elektronik Gate		
												5. Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Revisulasi Pelabuhan/Dermaga Kota Pontianak.		
												6. Pengadaan CCTV Kawasan Pelabuhan/Dermaga dan Tepian Sungai.		
												7. Pembuatan Tiang Sandar Kapal dan Dermaga Apung		
1.3. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Bermotor	1.3.a. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Transportasi	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Transportasi	%	78,59	80,53	83,33	85,27	87,20	7. Peningkatan Pelayanan ASDP	1. Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan penertiban Dermaga dan Pelabuhan serta angkutan sungai	1.3.2. Program Peningkatan Pelayanan ASDP.	1. Pengaturan dan Pengendalian Aktifitas Pelabuhan dan Dermaga Pelabuhan.		
		Formulasi: (Jumlah persentase ketersediaan fasilitas transportasi yang baik)							2. Meningkatkan pelayanan angkutan sungai dan penyeberangan	2. pemertihan angkutan peraliran.	2. Operational pengendalian, pengawasan dan pemertihan angkutan peraliran.	2. Operational pengendalian, pengawasan dan pemertihan angkutan peraliran.		
												3. Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Lintas Bardan-Siantan.		
												4. Monitoring Dermaga Untuk Kepentingan Mandiri (DUKS)		
1.3. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Bermotor	1.3.a. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Transportasi	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Transportasi	%	78,59	80,53	83,33	85,27	87,20	8. Peningkatan Kelangkaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan Angkutan umum dan barang	1.3.3. Program Peningkatan Kelangkaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.	1. Operasional Pengendalian peralatan pengujian kendaraan bermotor		
		Formulasi: (Jumlah persentase ketersediaan fasilitas transportasi yang baik)							2. Meningkatkan Sarana peralatan pengujian kendaraan bermotor	2. Pengendalian, pengawasan dan pemertihan PKB.	2. Pengendalian, pengawasan dan pemertihan PKB.	2. Pengendalian, pengawasan dan pemertihan PKB.		
									3. Meningkatkan fasilitas prasarana pengujian kendaraan bermotor	3. Pengadaan Mobil Uji Kelling.	3. Pengadaan Mobil Uji Kelling.	3. Pengadaan Mobil Uji Kelling.		
									4. Meningkatkan kualitas pelayanan	4. Pengadaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	4. Pengadaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	4. Pengadaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor		
												5. Pembuatan dan Pengembangan SIM PKB		
												6. Penyusunan Studi Kelayakan (FS) Rencana Pengembangan PKB		
												7. Penyusunan DED Pengembangan PKB		
												8. Pembangunan/Pengembangan Gedung PKB dan Perlempapannya		

Kepla Dinas Perhubungan
Kota Pontianak

Dra. Hj. Umi Sri Lena Candramidi, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19680410 199503 2 006

DOKUMEN DAN SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya OPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Propinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan

VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1. Program dan Sasaran Program 2020 - 2024
- 6.2. Kegiatan dan Indikator Kinerja

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

VIII. PENUTUP

LAMPIRAN

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Pontianak



Dra. Hj. Utin Sri Lena Candramidi, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19680410 199503 2 006



LAMPIRAN 2

**Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kota Pontianak, tentang Penetapan IKU
Dinas Perhubungan Kota Pontianak
Tahun 2020-2024**



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Aliyayang Nomor 7 Telepon (0561) 767136 Fax. (0561) 767136
Pontianak 78116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9.M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (IKU) di lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan peraturan Kepala Dinas tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Pontianak;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008, tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008, tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kota Pontianak;
12. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2010 – 2014;
13. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 149);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 63 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak;
17. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 64 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 64);
18. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2015-2019;
19. Keputusan Walikota Pontianak Nomor 712/Dishubkominfo/Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2015-2019;
20. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019;
21. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: MENETAPKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

Pasal 1

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, merupakan pedoman dan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk :

- a. Menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- b. Menyusun dan menyampaikan Dokumen Anggaran (RKA/DPA);
- c. Menyusun dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja (PK);
- d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP);
- e. Melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024

Pasal 3

Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan ini, Sekretaris Dinas Perhubungan diberikan tugas untuk :

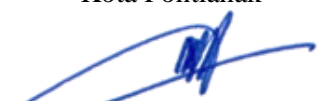
- a. Mengkoordinasikan penyusunan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Pontianak;
- b. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
- c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini dan melaporkannya kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 28 Juni 2019

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Pontianak


Dra. Hj. Utin Sri Lena Candramidi, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19680410 199503 2 006

Tembusan :

1. Walikota Pontianak u.p. Bagian Organisasi Setda Kota Pontianak
2. Ketua Bappeda Kota Pontianak.

Lampiran 1

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak

Nomor 57 Tahun 2019

Tanggal 28 Juni 2019

tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024

Misi 2 Kota : Menciptakan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Representatif

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KINERJA (Outcomes)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
			Indikator	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1 Meningkatkan Kualitas Transportasi di Kota Pontianak	1 Rata-rata waktu tempuh <i>Formulasi :</i> <i>Rata-rata jarak yang ditempuh (s)</i> <i>Rata-rata kecepatan (v)</i>								
		1 Meningkatnya Cakupan Penerangan Jalan Umum di Kota Pontianak	1 Indek Penerangan Jalan Umum <i>Formulasi :</i> <i>(Persentase Cakupan Penerangan Jalan Umum + Persentase Cakupan Jalan Lingkungan) : 2</i>	Jam	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		2 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi di Kota Pontianak	2 Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Transportasi <i>Formulasi :</i> <i>(Jumlah Persentase ketersediaan fasilitas transportasi yang baik)</i>	%	91.09	92.74	94.39	96.03	97.68
3 Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai dan Penyeberangan	3 Tingkat Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan (Kelancaran Lalu Lintas) Kota Pontianak <i>Formulasi :</i> <i>(Volume / Capacity Ratio)</i>	%	78.59	80.53	83.33	85.27	87.2		
				Tingkat Pelayanan	B 0.32	B 0.28	B 0.24	A 0.2	A 0.18

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak



Dra. Hj. Utin Sri Lena Candramidi, M.Si

Pembina Utama Muda

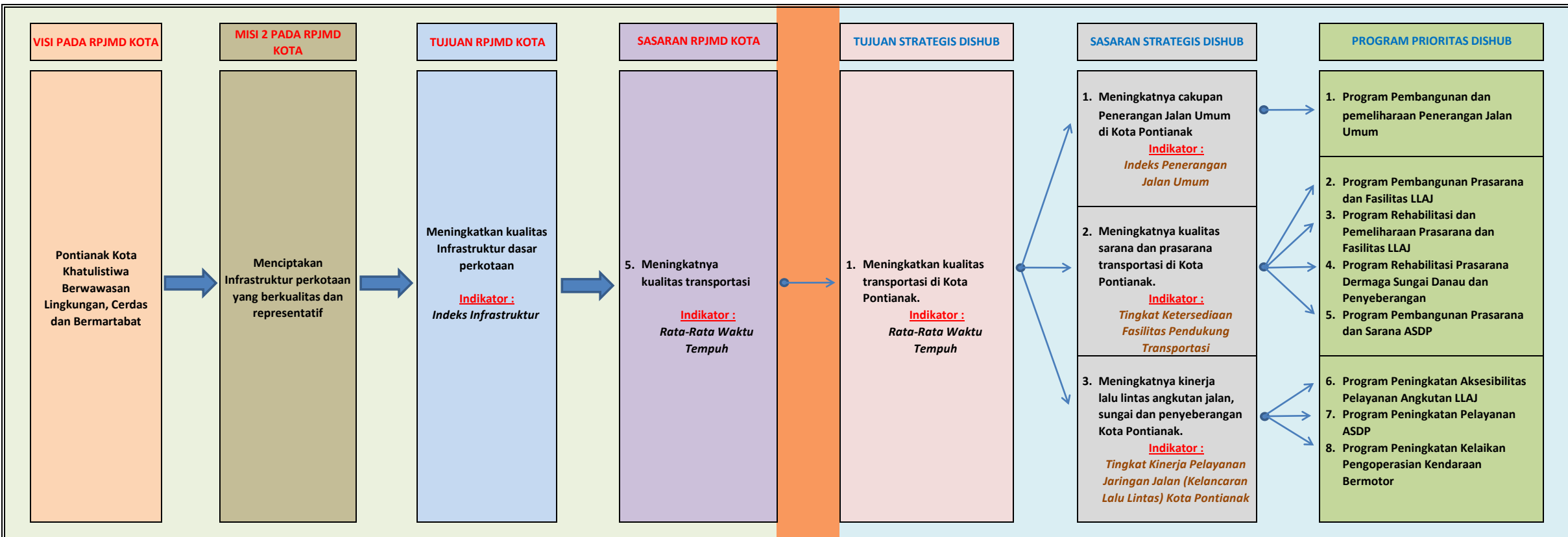
NIP. 19680410 199503 2 006



LAMPIRAN 3

TABEL LOGICAL FRAMEWORK 2020-2024

**ALUR SINKRONISASI RPJMD KOTA - RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK**



LOGICAL FRAMEWORK DINAS PERHUBUNGAN
PENCAPAIAN MISI 2 PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

VISI KOTA : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat.

TUJUAN KOTA	SASARAN KOTA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA		TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN SKPD	TARGET CAPAIAN						SASARAN SKPD	INDIKATOR SASARAN SKPD	TARGET CAPAIAN						PROGRAM PENDUKUNG
		URAIAN IKU	SATUAN			SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024			SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	
MISI 2 KOTA : Menciptakan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Representatif.																				
2.1. Meningkatkan kualitas infrastruktur Dasar Perkotaan	2.1.5. Meningkatnya kualitas transportasi	2.1.5.1. Rata-Rata Waktu Tempuh <i>Formulasi:</i> <i>Rata-Rata Jarak Yang Ditempuh (S)</i> <i>Rata-Rata Kecepatan (V)</i> (Pengukuran sementara pada 1 lokasi jalan Protokol di Kota Pontianak) Rata-rata waktu tempuh (di Jl. Tanjungpura) S = 2,11 km (Panjang Jalan/Jarak) v = 40 km/jam (Kecepatan maksimal) t = 0,05 jam (3 menit 10 detik)	Jam (Menit)	1. Meningkatkan Kualitas Transportasi di Kota Pontianak	Rata-Rata Waktu Tempuh <i>Formulasi:</i> <i>t = Rata-Rata Jarak Yang Ditempuh (S)</i> <i>Rata-Rata Kecepatan (V)</i> (Pengukuran sementara pada 1 lokasi jalan Protokol di Kota Pontianak) Rata-rata waktu tempuh (di Jl. Tanjungpura) S = 2,11 km (Panjang Jalan/Jarak) v = 40 km/jam (Kecepatan maksimal) t = 0,05 jam (3 menit 10 detik)	Jam	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	1. Meningkatnya cakupan Penerangan Jalan Umum di Kota Pontianak	1 Indeks Penerangan Jalan Umum <i>Formulasi:</i> (Persentase cakupan Penerangan Jalan Umum + Persentase Cakupan Jalan Lingkungan) : 2	Persentase	91,09	92,74	94,39	96,03	97,68	1. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.
												2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi di Kota Pontianak	1 Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Transportasi <i>Formulasi:</i> (jumlah persentase ketersediaan fasilitas transportasi yang baik) - Persentase Rambu-Rambu lalu lintas yang terpasang - Persentase Traffic Light dalam keadaan baik. - Persentase CCTV dalam keadaan baik. - Persentase Halte dalam kondisi baik. - Persentase Fasilitas/prasarana dermaga dalam kondisi baik.	Persentase	78,59	80,53	83,33	85,27	87,20	1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. 3. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP. 4. Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai Danau dan Penyeberangan.
												3. Meningkatnya kinerja lalu lintas angkutan jalan, sungai dan penyeberangan Kota Pontianak	3. Tingkat Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan (Kelancaran Lalu Lintas) Kota Pontianak. <i>Formulasi:</i> (Volume / Capacity Ratio)	Tingkat Pelayanan	B 0,32	B 0,28	B 0,24	A 0,20	A 0,18	1. Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ. 2. Program Peningkatan Pelayanan ASDP. 3. Program Peningkatan Kelainan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.



LAMPIRAN 4

TABEL CASCADING RENSTRA 2020-2024

CASCADING RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024 DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

IKU WALIKOTA : MENINGKATNYA KUALITAS TRANSPORTASI
(Rata-Rata Waktu Tempuh)

SASARAN 1	Meningkatnya Cakupan Penerangan Jalan Umum di Kota Pontianak		Tingkat Eselon II
INDIKATOR 1	Indek Penerangan Jalan Umum	97,68 %	(Kepala Dinas)
S.1.1	Meningkatnya Cakupan Fasilitas Penerangan Pada Jalan Umum dan Jalan Lingkungan Di Kota Pontianak		Tingkat Eselon III
IK.1.1	Persentase Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan yang terpasang Dalam Kondisi Baik	100 %	(Kepala Bidang)
S.1.1.1	Terpenuhinya Kebutuhan Penerangan Jalan Umum Kota Ptk		Tingkat Eselon IV
IK.1.1.1	Jumlah Fasilitas Penerangan pada Jalan Umum dan Jalan Lingkungan Yang terpasang	1.250 Titik	(Kepala Seksi)
S.1.1.2	Tersedianya Fasilitas Pengatur Daya Meter PJU yang terpasang		Tingkat Eselon IV
IK.1.1.2	Jumlah Pengatur Daya Meter PJU yang dipasang	170 Lokasi	(Kepala Seksi)
S.1.1.3	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Penerangan Jalan Umum		Tingkat Eselon IV
IK.1.1.3	Pemenuhan Kegiatan Operasional PJU di Kota Pontianak	60 Bulan	(Kepala Seksi)
S.1.1.4	Tersedianya Penerangan Jalan Umum dalam Kondisi Baik		Tingkat Eselon IV
IK.1.1.4	Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dilakukan pemeliharaan	5.000 Titik	(Kepala Seksi)
S.1.1.5	Tersedianya Fasilitas Kendaraan Operasional PJU		Tingkat Eselon IV
IK.1.1.5	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Operasional PJU	1 Unit	(Kepala Seksi)
S.1.1.6	Tersedianya Fasilitas Penunjang Operasional PJU		Tingkat Eselon IV
IK.1.1.6	Jumlah Monitoring Centre PJU yang dibangun	1 Unit	(Kepala Seksi)

SASARAN 2	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi		Tingkat Eselon II
INDIKATOR 2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Transportasi	87,20 %	(Kepala Dinas)
S.2.1	Meningkatnya Fasilitas Pendukung dan Perlengkapan Lalu Lintas Angkutan Jalan		Tingkat Eselon III
IK.2.1	Persentase Tersedianya Kebutuhan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas Yang Baik	100 %	(Kepala Bidang)
S.2.1.1	Terpenuhinya Kebutuhan marka parkir		Tingkat Eselon IV
IK.2.1.1	Jumlah Lokasi/kawasan Parkir yang dilakukan penataan/pegecatan	23 Lokasi	(Kepala Seksi)
S.2.1.2	Terpenuhinya Kebutuhan Papan Informasi Elektronik		Tingkat Eselon IV
IK.2.1.2	Jumlah Papan Informasi Elektronik yang terpasang	3 Lokasi	(Kepala Seksi)
S.2.1.3	Terpenuhinya Kebutuhan Sistem Tombol Penyeberangan Pejalan Kaki (Pelican Crossing)		Tingkat Eselon IV
IK.2.1.3	Jumlah Pelican Crossing yang dipasang/dibangun	6 Lokasi	(Kepala Seksi)
S.2.1.4	Terpenuhinya kebutuhan ZoSS di Kota Pontianak		Tingkat Eselon IV
IK.2.1.4	Jumlah lokasi/fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang tersedia	13 Lokasi	(Kepala Seksi)
S.2.1.5	Terpenuhinya kebutuhan rambu-rambu lalu lintas di Kota Ptk		Tingkat Eselon IV
IK.2.1.5	Jumlah Fasilitas perlengkapan jalan (Rambu) yang Tersedia	300 Rambu	(Kepala Seksi)
S.2.1.6	Tersedianya kebutuhan Traffic Liht di Kota Pontianak		Tingkat Eselon IV
IK.2.1.6	Jumlah lokasi/simpang yang dipasang traffic light	3 Lokasi	(Kepala Seksi)
S.2.1.7	Tersedianya pemenuhan marka jalan di Kota Pontianak		Tingkat Eselon IV
IK.2.1.7	Jumlah Fasilitas perlengkapan jalan (Marka) yang Tersedia	22 Lokasi	(Kepala Seksi)
S.2.1.8	Terpenuhinya kebutuhan Zebra Cross di Kota Pontianak		Tingkat Eselon IV
IK.2.1.8	Jumlah lokasi Zebra Cross yang di buat	34 Lokasi	(Kepala Seksi)
S.2.1.9	Tersedianya Fasilitas CCTV pada lokasi-lokasi strategis di Kota Ptk		Tingkat Eselon IV
IK.2.1.9	Jumlah Unit Fasilitas ATCS/CCTV yang tersedia	66 CCTV	(Kepala Seksi)
S.2.2	Terpeliharanya Fasilitas Pendukung dan Perlengkapan Lalu Lintas Angkutan Jalan		Tingkat Eselon III
IK.2.2	Persentase APILL dan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas Terpelihara Dalam Kondisi Baik	100 %	(Kepala Bidang)
S.2.2.1	Tersedianya Traffic Light dan Countdown Light dalam kondisi baik		Tingkat Eselon IV
IK.2.2.1	Jumlah Traffic Light dan Countdown Light dalam kondisi baik	23 Lokasi	(Kepala Seksi)
S.2.2.2	Tersedianya Radio Komunikasi dalam kondisi baik		Tingkat Eselon IV
IK.2.2.2	Jumlah Radio Komunikasi dalam kondisi baik	25 Unit	(Kepala Seksi)
S.2.2.3	Tersedianya Flashing Light dalam kondisi baik		Tingkat Eselon IV
IK.2.2.3	Jumlah Flashing Light dalam kondisi baik	11 Lokasi	(Kepala Seksi)
S.2.2.4	Tersedianya Papan Informasi Elektronik dalam kondisi baik		Tingkat Eselon IV
IK.2.2.4	Jumlah Papan Informasi Elektronik dalam kondisi baik	2 Lokasi	(Kepala Seksi)
S.2.2.5	Tersedianya Rambu-Rambu Lalu Lintas dalam kondisi baik		Tingkat Eselon IV
IK.2.2.5	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dilakukan pemeliharaan	650 Rambu	(Kepala Seksi)
S.2.2.6	Tersedianya Fasilitas Pendukung Angkutan Umum dengan baik		Tingkat Eselon IV
IK.2.2.6	Jumlah Halte yang dilakukan pemeliharaan/rehab	25 Halte	(Kepala Seksi)
S.2.2.7	Tersedianya Fasilitas CCTV/ATCS dalam kondisi baik		Tingkat Eselon IV
IK.2.2.7	Jumlah Titik/Lokasi Fasilitas CCTV/ATCS yang dilakukan rehabilitasi/perbaikan Jaringan dan Pemeliharaan	14 Titik/Lokasi	(Kepala Seksi)
S.2.2.8	Tersedianya Traffic Light dalam kondisi baik		Tingkat Eselon IV
IK.2.2.8	Jumlah Traffic Light yang dilakukan Peningkatan	5 Lokasi	(Kepala Seksi)

S.2.3	Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas Pendukung Dermaga Sungai Danau dan Penyeberangan		Tingkat Eselon III
IK.2.3	Persentase Berfungsinya Dermaga Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan	100 %	(Kepala Bidang)
S.2.3.1	Tersedianya Fasilitas Dermaga Pedalaman dalam kondisi baik		Tingkat Eselon IV
IK.2.3.1	Jumlah Pelabuhan dan Dermaga Kota Pontianak serta fasilitas yang dilakukan pemeliharaan	8 Fasilitas	(Kepala Seksi)
S.2.3.2	Tersedianya Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Bardan - Siantan dalam kondisi baik		Tingkat Eselon IV
IK.2.3.2	Jumlah Pelabuhan dan Dermaga Kota Pontianak serta fasilitas yang dilakukan rehabilitasi	7 Fasilitas	(Kepala Seksi)
S.2.3.3	Tersedianya Peralatan Pelabuhan Penyeberangan Bardan - Siantan dalam kondisi baik		Tingkat Eselon IV
IK.2.3.3	Jumlah Peralatan Pelabuhan Penyeberangan Bardan - Siantan yang dilakukan pemeliharaan	6 Fasilitas	(Kepala Seksi)

S.2.4	Meningkatnya Fasilitas Pendukung Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan		Tingkat Eselon III
IK.2.4	Persentase Peningkatan Fasilitas Pelayanan Angkutan Sungai	100 %	(Kepala Bidang)
S.2.4.1	Tersedianya Pemenuhan Pelabuhan dan Dermaga kota Pontianak serta fasilitas yang dibangun		Tingkat Eselon IV
IK.2.4.1	Jumlah Pelabuhan dan Dermaga kota Pontianak serta fasilitas yang dibangun	9 Fasilitas	(Kepala Seksi)
S.2.4.2	Tersedianya Kapal Wisata Pemerintah Kota Pontianak		Tingkat Eselon IV
IK.2.4.2	Jumlah Pengadaan Kapal Wisata Pemerintah Kota Pontianak	1 Unit	(Kepala Seksi)
S.2.4.3	Tersedianya Alat-Alat Keselamatan Pelayaran Angkutan Sungai dan Penyeberangan		Tingkat Eselon IV
IK.2.4.3	Jumlah Unit Pengadaan Alat-Alat Keselamatan Pelayaran Angkutan Sungai dan Penyeberangan	60 Buah	(Kepala Seksi)
S.2.4.4	Tersedianya Elektronik Gate Dermaga/Pelabuhan di Kota Ptk		Tingkat Eselon IV
IK.2.4.4	Jumlah elektronik gate yang dibangun	2 Unit	(Kepala Seksi)
S.2.4.5	Tersedianya CCTV pada Kawasan Pelabuhan/Dermaga dan Tepian Sungai		Tingkat Eselon IV
IK.2.4.5	Jumlah Pengadaan CCTV dan Kelengkapannya	8 Titik/Lokasi	(Kepala Seksi)
S.2.4.6	Tersedianya Dokumen Pengembangan Pelabuhan/Dermaga Kota Pontianak		Tingkat Eselon IV
IK.2.4.6	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Dermaga/Pelabuhan yang di susun	1 Dokumen	(Kepala Seksi)
S.2.4.7	Tersedianya Tiang Sandar Kapal dan Dermaga Apung		Tingkat Eselon IV
IK.2.4.7	Jumlah Tiang Sandar Kapal dan Dermaga Apung Yang di Bangun	2 Lokasi	(Kepala Seksi)

SASARAN 3	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai dan Penyeberangan		Tingkat Eselon II
INDIKATOR 3	Tingkat Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan (Kelancaran Lalu Lintas) Kota Pontianak	A (0,18)	(Kepala Dinas)
S.3.1	Meningkatnya Ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas		Tingkat Eselon III
IK.3.1	Persentase Lokasi Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan lancar	100 %	(Kepala Bidang)
S.3.1.1	Tercapainya Kelancaran lalu lintas pada lokasi dan jam tertentu		Tingkat Eselon IV
IK.3.1.1	Jumlah lokasi jalan dalam kondisi lancar, aman dan tertib pada lokasi dan waktu tertentu	23 Lokasi	(Kepala Seksi)
S.3.1.2	Terciptanya Ketertiban Lalu Lintas		Tingkat Eselon IV
IK.3.1.2	Jumlah Lokasi/kawasan dalam kondisi tertib lalu lintas	30 Lokasi	(Kepala Seksi)
S.3.1.3	Terciptanya koordinasi bidang lalu lintas angkutan jalan		Tingkat Eselon IV
IK.3.1.3	Jumlah bahan kebijakan Bidang lalu lintas yang dihasilkan	59 Bahan Kebijakan	(Kepala Seksi)
S.3.1.4	Tersedianya data pengembangan rekayasa lalu lintas		Tingkat Eselon IV
IK.3.1.4	Jumlah Dokumen ruas jalan dan persimpangan yang dilakukan pendataan	11 Dokumen	(Kepala Seksi)
S.3.1.5	Terwujudnya ketertiban angkutan umum		Tingkat Eselon IV
IK.3.1.5	Jumlah kegiatan pengendalian, pengawasan dan penertiban terminal	12 Bulan	(Kepala Seksi)
S.3.1.6	Tersedianya Bus BRT Dalam Kondisi Baik		Tingkat Eselon IV
IK.3.1.6	Jumlah Bus BRT yang dilakukan Pemeliharaan/Operasional Berkala	5 Unit	(Kepala Seksi)
S.3.1.7	Terlaksananya Pengelolaan/Operasional Gedung Parkir		Tingkat Eselon IV
IK.3.1.7	Pemenuhan Pengelolaan/Operasional Gedung Parkir	12 Bulan	(Kepala Seksi)
S.3.1.8	Tersedianya Data Angkutan Umum yang Uptodate		Tingkat Eselon IV
IK.3.1.8	Jumlah Dokumen/Data kendaraan angkutan umum di Kota Pontianak	2 Dokumen	(Kepala Seksi)
S.3.1.9	Terciptanya Ketertiban Perparkiran		Tingkat Eselon IV
IK.3.1.9	Jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan, dan penertiban perparkiran	12 Bulan	(Kepala Seksi)
S.3.1.10	Tersedianya Dokumen Masterplan Transportasi		Tingkat Eselon IV
IK.3.1.10	Jumlah Dokumen Transportasi Yang Dihasilkan	1 Dokumen	(Kepala Seksi)
S.3.1.11	Tersedianya Dokumen Perencanaan Angkutan Umum		Tingkat Eselon IV
IK.3.1.11	Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Angkutan Umum yang dihasilkan	1 Dokumen	(Kepala Seksi)
S.3.2	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan		Tingkat Eselon III
IK.3.2	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	100 %	(Kepala Bidang)
S.3.2.1	Terlaksananya kelancaran aktifitas Pelabuhan dan Dermaga Pemerintah Kota Pontianak		Tingkat Eselon IV
IK.3.2.1	Jumlah Aktivitas Sandar Kapal Laut, Angkutan Sungai dan Pedalaman	36.210 Kali Sandar	(Kepala Seksi)
S.3.2.2	Terciptanya ketertiban dan keamanan Angkutan Sungai dan Lalu Lintas Sungai Wilayah Kota Pontianak		Tingkat Eselon IV
IK.3.2.2	Jumlah Surat Persetujuan Berlayar (SPB)/SIB yang dikeluarkan	53.500 SPB/SIB	(Kepala Seksi)
S.3.2.3	Terlaksananya Kelancaran Aktivitas Pelayanan Pelabuhan		Tingkat Eselon IV
IK.3.2.3	Jumlah Trips Pelayanan Penyeberangan Penumpang dan Kendaraan	170.750 Trips	(Kepala Seksi)
S.3.2.4	Terciptanya Ketertiban dan Kesesuaian Peruntukan DuKS		Tingkat Eselon IV
IK.3.2.4	Jumlah DuKS yang sesuai dengan izin yang berlaku (yang diajukan)	85 DUKS	(Kepala Seksi)

S.3.3	Meningkatnya Kelaikan Angkutan Umum, dan Barang		Tingkat Eselon III
IK.3.3	Persentase Angkutan Umum dan Barang Yang Lulus Uji KIR	100 %	(Kepala Bidang)
S.3.3.1	Terlaksananya Proses Pengujian Kendaraan dengan lancar		Tingkat Eselon IV
IK.3.3.1	Jumlah Angkutan Umum, Online dan Barang Yang di Uji KIR	83.500 Unit	(Kepala Seksi)
S.3.3.2	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian, pengawasan dan penertiban PKB		Tingkat Eselon IV
IK.3.3.2	Jumlah Kegiatan Pengendalian, pengawasan dan penertiban PKB	732 Hari	(Kepala Seksi)
S.3.3.3	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor		Tingkat Eselon IV
IK.3.3.3	Jumlah unit pengadaan sarana pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Unit	(Kepala Seksi)
S.3.3.4	Terlaksananya Peningkatan Akurasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor		Tingkat Eselon IV
IK.3.3.4	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	5 Unit	(Kepala Seksi)
S.3.3.5	Tersedianya Akurasi Data Kendaraan Wajib Uji di Kota Ptk		Tingkat Eselon IV
IK.3.3.5	Jumlah Fasilitas dan Aplikasi SIM PKB yang dibuat dan dikembangkan	1 Aplikasi	(Kepala Seksi)
S.3.3.6	Tersedianya Dokumen FS Rencana Pengembangan PKB		Tingkat Eselon IV
IK.3.3.6	Jumlah Dokumen FS Rencana Pengembangan PKB yang dibuat	1 Dokumen	(Kepala Seksi)
S.3.3.7	Tersedianya Dokumen DED Rencana Pengembangan PKB		Tingkat Eselon IV
IK.3.3.7	Jumlah Dokumen DED Rencana Pengembangan PKB yang dibuat	1 Dokumen	(Kepala Seksi)
S.3.3.8	Tersedianya Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor yang Layak		Tingkat Eselon IV
IK.3.3.8	Jumlah Fasilitas PKB yang dibangun/dikembangkan	1 Unit	(Kepala Seksi)



LAMPIRAN 5

TABEL KERTAS KERJA EVALUASI (KKE) RENSTRA 2020-2024

KERTAS KERJA EVALUASI (KKE)
PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T/TS)	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T/TS)	IKU / Bukan IKU	NO	PROGRAM			KEGIATAN			Kondisi Hingga Tahun 2019	ANGGARAN (Rp)																											
									URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		2020			2021			2022			2023			2024			Total 5 Tahun												
																Rupiah	Output	Satuan	Rupiah	Output	Satuan	Rupiah	Output	Satuan	Rupiah	Output	Satuan	Rupiah	Output	Satuan	Rupiah	Output	Satuan	Rupiah	Output	Satuan							
1	Meningkatnya cakupan Penanganan Jalan Umum di Kota Pontianak	Ya	1.2. Tingkat Penerangan Jalan Umum	ya	IKU Kota	1	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	1	Meningkatnya Cakupan Fasilitas Penerangan Pada Jalan Umum dan Jalan Lingkungan yang	Penerangan Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan yang	Penerangan Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan yang	1	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Terdapatnya Fasilitas Penerangan pada Jalan Umum dan Jalan Lingkungan yang terpasang	1	Jumlah Fasilitas Penerangan pada Jalan Umum dan Jalan Lingkungan yang terpasang	26.083.180,00	12,94		26.664.851,00	43,04		28.309.389,00	73,14		26.825.813,00	86,57		26.999.904,00	100,00		134.829.137,00	100,00										
																	1.300.000,00	250	Truk	1.300.000,00	250	Truk	1.400.000,00	250	Truk	1.400.000,00	250	Truk	1.400.000,00	250	Truk	1.400.000,00	250	Truk	1.400.000,00	250	Truk	6.800.000,00	1.250	Truk			
																	200.000,00	30	Lokasi	500.000,00	35	Lokasi	500.000,00	35	Lokasi	500.000,00	35	Lokasi	500.000,00	35	Lokasi	500.000,00	35	Lokasi	500.000,00	35	Lokasi	500.000,00	35	Lokasi	2.299.904,00	170	Lokasi
																	23.469.180,00	12	Bulan	23.154.851,00	12	Bulan	23.409.389,00	12	Bulan	23.425.813,00	12	Bulan	23.425.813,00	12	Bulan	23.425.813,00	12	Bulan	23.425.813,00	12	Bulan	23.425.813,00	12	Bulan	117.529.233,00	69	Bulan
																	1.320.000,00	1000	Truk	1.300.000,00	1000	Truk	1.300.000,00	1000	Truk	1.300.000,00	1000	Truk	1.300.000,00	1000	Truk	1.300.000,00	1000	Truk	1.300.000,00	1000	Truk	1.300.000,00	1000	Truk	6.820.000,00	500	Truk
																	0	0	Unit	1.200.000,00	0	Unit	1.200.000,00	0	Unit	1.200.000,00	0	Unit	1.200.000,00	0	Unit	1.200.000,00	0	Unit	1.200.000,00	0	Unit	1.200.000,00	0	Unit	1.200.000,00	0	Unit
2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi di Kota Pontianak	Ya	2.1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Transportasi	ya	Bukan IKU Kota	2	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Transportasi	Meningkatnya Fasilitas Pendukung dan Perengkapan Fasilitas Pendukung Transportasi	Ketersediaan Fasilitas Pendukung dan Perengkapan Fasilitas Pendukung Transportasi	Ketersediaan Fasilitas Pendukung dan Perengkapan Fasilitas Pendukung Transportasi	Ketersediaan Fasilitas Pendukung dan Perengkapan Fasilitas Pendukung Transportasi	1	Pembuatan Marka Parkir	Terdapatnya Fasilitas Marka Parkir yang terpasang	1	Jumlah Fasilitas Marka Parkir yang terpasang	1.380.000,00	19,98		1.821.000,00	32,62		2.095.000,00	58,43		2.630.000,00	80,67		2.066.500,00	100,00		9.992.500,00	100										
80.000,00																	5	Lokasi	80.000,00	5	Lokasi	100.000,00	8	Lokasi	100.000,00	8	Lokasi	150.000,00	10	Lokasi	150.000,00	10	Lokasi	150.000,00	10	Lokasi	330.000,00	23	Lokasi				
0																	0	Lokasi	750.000,00	1	Lokasi	750.000,00	1	Lokasi	800.000,00	1	Lokasi	800.000,00	1	Lokasi	800.000,00	1	Lokasi	800.000,00	1	Lokasi	2.356.000,00	3	Lokasi				
0																	0	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	600.000,00	6	Lokasi	
200.000,00																	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	300.000,00	3	Lokasi	300.000,00	3	Lokasi	300.000,00	3	Lokasi	300.000,00	3	Lokasi	300.000,00	3	Lokasi	300.000,00	3	Lokasi	1.286.500,00	13	Lokasi	
140.000,00																	60	Rambu	140.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	730.000,00	300	Rambu	
490.000,00	1	Lokasi	490.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	1.410.000,00	1	Lokasi																	
200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi																	
140.000,00	60	Rambu	140.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	730.000,00	300	Rambu																	
490.000,00	1	Lokasi	490.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	1.410.000,00	1	Lokasi																	
200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi																	
140.000,00	60	Rambu	140.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	730.000,00	300	Rambu																	
490.000,00	1	Lokasi	490.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	1.410.000,00	1	Lokasi																	
200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi																	
140.000,00	60	Rambu	140.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	730.000,00	300	Rambu																	
490.000,00	1	Lokasi	490.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	1.410.000,00	1	Lokasi																	
200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi																	
140.000,00	60	Rambu	140.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	730.000,00	300	Rambu																	
490.000,00	1	Lokasi	490.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	1.410.000,00	1	Lokasi																	
200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi																	
140.000,00	60	Rambu	140.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	730.000,00	300	Rambu																	
490.000,00	1	Lokasi	490.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	1.410.000,00	1	Lokasi																	
200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi																	
140.000,00	60	Rambu	140.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	730.000,00	300	Rambu																	
490.000,00	1	Lokasi	490.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	1.410.000,00	1	Lokasi																	
200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi																	
140.000,00	60	Rambu	140.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	730.000,00	300	Rambu																	
490.000,00	1	Lokasi	490.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	1.410.000,00	1	Lokasi																	
200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi																	
140.000,00	60	Rambu	140.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	730.000,00	300	Rambu																	
490.000,00	1	Lokasi	490.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	1.410.000,00	1	Lokasi																	
200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi	200.000,00	2	Lokasi																	
140.000,00	60	Rambu	140.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	150.000,00	60	Rambu	730.000,00	300	Rambu																	
490.000,00	1	Lokasi	490.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	475.000,00	1	Lokasi	1.410.000,00	1	Lokasi																	
200.000,00																																											

